

JURNAL
AGRIBISNIS KERAKYATAN

Volume 3, Nomor 1, November 2013

JAK

Diterbitkan oleh
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas
bekerjasama dengan
Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Pascasarjana Universitas Andalas
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Komisariat Padang

JAK	Volume 3	Nomor 1	Hal. 1-76	Padang November 2013	ISSN 1979-9470
------------	-----------------	----------------	------------------	-------------------------------------	---------------------------

JURNAL AGRIBISNIS KERAKYATAN

Volume 3, Nomor 1, November 2013

Jurnal Agribisnis Kerakyatan adalah wadah informasi bidang agribisnis kerakyatan berupa hasil penelitian, studi kepustakaan dan tulisan ilmiah terkait. Terbit pertama kali tahun 2008 dengan frekuensi tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November

Ketua Penyunting

Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc

Wakil Ketua Penyunting

Dr. Ir. H. Nofialdi, M.Si

Sekretaris

Mahdi, SP, M.Si, P.hD

Penyunting Pelaksana

Dr. Ir. Faidil Tanjung, M.Si

Ir. Herry Bachrizal Tanjung, M.Si

Dr. Ir. Ira Wahyuni Syafri, M.Si

Ir. M. Refdinal, MS

Syofyan Fairuzi, STP, M.Si

Vonny Indah Mutiara, SP, MEM

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc (Universitas Lampung)

Dr. Ir. Djaswir Zein (Universitas Andalas)

Prof. Dr. Ir. Helmi (Universitas Andalas)

Prof. Dr. Ir. Maman Haeruman Karmana, M.Sc (Universitas Padjajaran)

Prof, Dr, Ir, Muchlis Muchtar, MS (Universitas Andalas)

Dr, Ir, Muktasam Abdurrahman, M.Sc (Universitas Mataram)

Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si (Institut Pertanian Bogor)

Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc (Universitas Andalas)

Dr, Agr, Sri Peni Wastutiningsih (Universitas Gadjah Mada)

Dr, Ir, Suardi Tarumun, M.Sc (Universitas Riau)

Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS (Institut Pertanian Bogor)

Prof. Dr. Ir. Sutriyono, MS (Universitas Jember)

Kesekretariatan

Yusmarni, SP, M.Sc

Rafnel Azhari SP M.Si

Cindy Paloma SP, M.Si

Ami Sukma Utami SP, M.Sc

Afrianingsih Putri SP, M.Si

Alamat Redaksi

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Kampus Unand Limau Manis, PADANG, 25163 Telp (0751) 72774

Email : jakfpua@faperta.unand.ac.id

Jurnal Agribisnis Kerakyatan diterbitkan oleh

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas

bekerjasama dengan

Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Pascasarjana Universitas Andalas

Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPPI) Komisariat Sumatera Barat

ISSN 1979-9470

JURNAL AGRIBISNIS KERAKYATAN

Volume 3, Nomor 1, November 2013

DAFTAR ISI

Assalamu'alaikum:

Agribisnis Kerakyatan: Api yang Jauh dari Panggang

Endry Martius

Analisis Keadilan Tataniaga Bengkuang di Kecamatan Kuranji Kota Padang

Yusri Usman

1-14

Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi Pupuk dan Tenaga Kerja Pada Usaha Tani Jagung di Kenagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat

M. Refdinal

15-24

Strategi Pengembangan Komoditi Sawo (*Achros Zapota, L*) di Kenagarian Sumpur Kab. Tanah Datar Sumatera Barat

Syahyana Raesi

25-33

Pembangunan Pedesaan Partisipatif

Hery Bachrizal Tanjung

34-43

Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Akses terhadap Lembaga Keuangan Mikro: Kasus Yayasan Peramu Bogor

Nunung Nuryantono

44-56

Kontribusi Pendapatan Usaha Ternak Sapi Potong pada Progran Sarjana Membangun Desa (SMD) terhadap Pendapatan Rumah Tangga Peternak di Kabupaten Pesisir Selatan

Pridma Gusti

57-63

Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Pangan Hewani pada Konsumen Rumah Tangga di Kota Padang

Noni Novarista

64- 74

ASSALAMU'ALAIKUM

Agribisnis Kerakyatan: Api yang Jauh dari Panggang

Endry Martius

Perspektif

Perspektif agribisnis kerakyatan berdasar pada keadilan sosial, prinsip yang mengatur pembagian beban dan nikmat dari kerjasama sosial yang termanifestasi melalui semua urusan agribisnis. Dengan kata lain, kesejatian agribisnis kerakyatan harus dilihat dari sejauh mana pembagian beban dan nikmat tersebut bisa dilakukan secara adil intragenerasi dan antargenerasi. Pembagian yang adil intragenerasi berarti perwujudan kerjasama sosial yang lintas-generasi atau dapat berkelanjutan.

Konsepsi keadilan sudah dikenal dalam karya klasik terkenal Plato, melalui argumen pembedaan antara kebaikan dan kewajiban. Pada mulanya, apa yang menguntungkan para elit sudah dianggap kebaikan dan karenanya tersebut adil. Namun ada pula pendapat bahwa keadilan tidak lebih sebuah kompromi, dikatakan adil cukup apabila orang bersikap fair dan jujur dalam membuat kesepakatan (dalam Rasuanto, 2005: 7–9). Kompromi tersebut ditaati bukan sebagai yang secara moral bernilai baik atau buruk, melainkan sebagai keharusan akibat alternatifnya hanyalah dalam psikologi manusia hobessian bahwa pilihan bekerjasama adalah irrasional—dalam kondisi alamiah (*state of nature*) yang adalah kondisi perang semua melawan semua (lihat juga Adian, 2013). Corak keadilan demikian kemudian mendapat pendasaran normatifnya pada etika deontologis Kant: hanya pada tindakan yang didasarkan kewajiban yang bernilai moral (Rasuanto, 2005: 1-10).

Berdasarkan rumusan John Stuart Mill tentang keadilan (Rasuanto, 2005: 14-15), keadilan dalam agribisnis seharusnya termasuk kewajiban, yang bukan dalam corak sekedar kebaikan, belas kasihan, atau semacam balas jasa, melainkan dengan corak kewajiban moral sempurna (*perfect moral obligation*). Sebagai kewajiban moral sempurna itu keadilan otomatis adalah sebagai etika sosial, yakni sebagai kewajiban yang melahirkan hak korelatif pada orang atau sejumlah orang, atau seluruh rakyat. Argumennya, bahwa keadilan dalam agribisnis bukan saja menjadi sesuatu yang hanya benar bila dilakukan dan salah bila dinafikan, tapi yang juga rakyat dan terutama petani bisa mengklaim manfaat agribisnis sebagai hak moralnya. Dengan kata lain, sebagai konsekuensi, agribisnis harus melahirkan hak korelatif (atau jangan tidak melahirkan hak apapun) wajar pada petani atau rakyat dari pembagian manfaat agribisnis.

Belakangan Jhon Rawls melahirkan konsepsi keadilan substantif yang bisa menjadi ukuran kewajiban moral yang korelatif tersebut (Rawls, 2000). Juga oleh Habermas, konsepsi itu bahkan dikembangkan lebih jauh menjadi prinsip yang menjamin dan mengekspresikan kepentingan bersama sebagai pengendalian pengaturan masyarakat majemuk. Hanya saja, Habermas sekalian juga menyediakan konsepsi tentang cara atau prosedur untuk mencapai persetujuan mengenai apa yang adil itu, sebagaimana difasilitasinya dalam teori yang disebutnya "*Discourse Ethic*". Dalam teori tersebut, "*the primacy of justice Ethics*" ditampilkan dalam distingsi tegas antara etik dan moral, yaitu antara persoalan evaluatif yang hanya berkenaan dengan preferensi subjektif dan persoalan normatif yang koekstensif dengan persoalan keadilan (lihat Rasuanto, 2005 : 19-21). Berdasar pada gagasan atau teori Habermas itu, keadilan dalam agribisnis haruslah termasuk dalam kategori konsesus, bukan persetujuan pada berdasar keseimbangan kekuatan atau kompromi para pelaku agribisnis agar sama-sama senang, melainkan persetujuan yang keabsahannya semata-mata didasarkan atas argumen yang terbaik, atau suatu persetujuan yang dihasilkan oleh tindakan (rasional) komunikatif (Habermas, 1984) dan lihat juga Hardiman, 2009). Paduan semua konsepsi di atas yang telah memberi dasar-dasar kerjasama sosial pada masyarakat majemuk, tentu saja bisa dipakai dalam mendiskusikan dinamika agribisnis kerakyatan (lihat Habermas, 1994; Furnivall, 2009 dan Rahardjo, 2011).

Sebagian Fakta

Gerak agribisnis kerakyatan ibarat api yang masih jauh dari panggangnya. Apa yang semestinya dan apa yang dipraktekkan sebagai fakta belum terhubung, sehingga substansi keadilan yang menjadi inti kesejatan agribisnis kerakyatan nyaris tak terpedulikan. Satu per satu gejala itu terbukti melalui tulisan-tulisan dalam Jurnal JAK volume kali ini. Hanya saja segala pembuktian soal keadilan dalam agribisnis masih terlihat secara tidak langsung, yakni hanya dengan menjelaskan gejala atau fenomena ketidakadilan sebagai akibat dari praktek umum agribisnis (ekonomi) yang berbasis pada pendekatan rekayasa logistik (Sen, 2001). Ketika produktifitas dan efisiensi pertanian berhasil ditingkatkan, gerak masif liberalisasi pasar malah luput dari perhatian. Liberalisasi pasar itu bukan saja menimbulkan pengarusutaman komodifikasi pertanian, tapi sekalian menciptakan ketergantungan petani pada mekanisme pasar dalam memperoleh kesejahteraan (Rahardjo, 2011). Belum muncul ikhtiar yang menonjol untuk mendapatkan penjelasan mengenai hakikat dibalik fenomena (noumena) ketidakadilan dengan memberikan banyak perhatian pada pertimbangan-pertimbangan etika sebagaimana yang sudah biasa dijumpai dalam khasanah ekonomi politik (lihat Sen, 2001 dan Rahardjo, 2011).

Walau begitu, keyakinan terhadap praktek agribisnis (dan ekonomi) rekayasa logistik tampaknya tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Paling tidak begitulah kesan dan pesan yang terbaca dari tulisan-tulisan berikut. Pada tulisan pembuka, Yusri Usman menyorot tataniaga bengkuang di kota Padang yang disimpulkannya sedang dalam kondisi yang tidak berkeadilan. Penyebabnya terutama terkait dengan bentuk pasar bengkuang yang monopsoni atau oligopsoni yang secara teknis dan

prosedural telah menyebabkan keuntungan yang diterima petani produsen jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Peluang perbaikan bagi praktek agribisnis diperlihatkan pula dalam temuan M. Refdinal dan Syahyana Raesi. Efisiensi teknis dalam berproduksi, misalnya pada usahatani jagung, masih bisa untuk dioptimasi melalui rekomendasi terukur pada penggunaan pupuk dan tenaga kerja. Dari strategi pengembangan komoditas (contohnya sawo), terlihat pula bahwa sejumlah faktor yang berkarakter kerekayasaan pada lingkungan internal ataupun eksternal yang masih berpeluang untuk dikembangkan.

Dua tulisan berikutnya mendiskusikan pendekatan pembangunan dan instrumentasi atau peralatan pengukuran hasil pembangunan dalam hal pendapatan rumahtangga yang dianggap dapat menopang tindakan pembangunan menjadi lebih akurat. Pertama adalah tulisan Hery Bachrizal Tanjung, walau tidak menyorot langsung soal agribisnis, tapi hasil diskusinya bisa dipakai sebagai pertimbangan dalam penerapan pendekatan praktis pembangunan agribisnis di pedesaan. Terlihat bahwa pengalaman atau peran pesantren yang sudah sangat panjang dengan pendekatan partisipatif dalam pembangunan pedesaan, bisa dijadikan model, dengan catatan bahwa prosesnya harus melalui ujicoba dan harus pula memfasilitasi terjadinya pembelajaran secara lokal.

Berikutnya adalah tulisan Nunung Nuryantono dan kawan-kawan tentang upaya pengentasan kemiskinan tingkat rumahtangga melalui peningkatan akses mereka terhadap lembaga keuangan mikro semi-formal. Upaya tersebut ternyata cukup berhasil, karena ditandai oleh penurunan pada angka-angka indikator kemiskinan rumahtangga: *headcount ratio*, *poverty depth index*, dan *severity index*. Tanda-tanda keberhasilan pengentasan kemiskinan ini amat bisa dipahami karena sebelumnya sudah ditegaskan bahwa pemakaian semua angka indikator itu mempunyai kekuatan aksiomatis pada komprehensivitas, bobot dan akurasi kepedulian, yaitu pada: (1) fenomena atau masalah kelompok rumahtangga miskin sasaran; (2) arah pengentasan kemiskinan yang fokus pada upaya melangkaui garis kemiskinan; dan (3) perbaikan tingkat keparahan disparitas pendapatan intra kelompok rumahtangga miskin. Tampaknya tidak itu saja harapan manfaat dari penggunaan angka-angka indikator tersebut. Bersamanya tertumpang pula semangat agar pertimbangan kebijakan makro bagi pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih jernih.

Dua tulisan terakhir membahas tentang peran sektor peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan hewani pada tingkat rumahtangga. Pertama adalah tulisan dari Pridma Gusti tentang kontribusi pendapatan usaha ternak sapi potong pada program sarjana membangun desa (SMD) terhadap pendapatan rumahtangga peternak. Upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui program ini belum cukup berhasil. Hal ini terlihat dari kontribusi pendapatan rumah tangga peternak dari program ini masih relatif kecil, yaitu sebesar 23,64 persen dari total pendapatan rumah tangga peternak, sehingga masih tergolong sebagai usaha sampingan. Sebagaimana fakta umum program pemerintah yang lain, Pridma Gusti juga

menemukan bahwa pelaksanaan program SMD masih jauh dari ketentuan-ketentuan teknis yang telah disepakati, hal tersebut terbukti dari tidak dilaksanakannya petunjuk teknis secara baik oleh petugas lapangan. Monitoring dan evaluasi sebuah program menjadi penting pada konteks ini.

Tulisan terakhir adalah dari Noni Novarista, yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan hewani pada konsumen rumah tangga di kota Padang. Temuan Noni Novarista menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat konsumsi pangan hewani pada konsumen rumah tangga adalah harga pangan hewani itu sendiri. Faktor ini berpengaruh pada semua jenjang pendapatan. Meskipun demikian, hal yang cukup mengembirakan adalah tingkat konsumsi pangan hewani di kota Padang sudah berada di atas standar norma gizi nasional yang disarankan oleh FAO. Demikian pengantar, dan selamat membaca.

Referensi

Adian, Donny Gahral. 2013. *Rasionalitas Kerjasama, Sebuah Teori Rekonsialisasi Sosial*. Depok: Penerbit Koekoesan.

Furnivall, J.S. 2009. *Hindia Belanda, Studi tentang Ekonomi Majemuk (terjemahan dari Netherlands India A study of Plural Economy)*. Jakarta: Freedom Institute.

Habermas, Jurgen. 1990. *Moral Consciousness and Communicative Action*. Cambridge: The MIT Press.

Hubermas, Jurgen. 1984. *The Theory of Communicative Action (trans. Thomas McArthy)*. Boston: Beacon Press.

Hardiman, F. Budi. 2009. Demokrasi Deliberatif, Menimbang “Negara Hukum” dan “Ruang Publik” dalam *Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Rahardjo, M. Dawam. 2011. *Nalar Ekonomi Politik Indonesia*. Bogor: IPB Prees.

Rasunto, Bur. 2005. *Keadilan Sosial, Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Rawls, Jhon. 1972 “The Arguments for the Principles of Natural Duty”, dalam *A Theory of Justice*. Oxford: University Press (hal. 333-342).

Sen, Amartya. 2001. *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin?: Sebuah Perbincangan tentang Etika dan Ilmu Ekonomi di Fajar Millenium Baru (terjemahan On Ethics and Economis)*. Bandung: Penerbit Mizan.

ANALISIS KEADILAN TATANIAGA BENGKUANG DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

Yusri Usman

Abstract: *The purpose of this study is to examine the fairness from the marketing channels of bengkuang in Kuranji Sub-district, Padang. This reserach used survey method, and data gathered from 20 samples. There are one trader and four retailers choosed randomly. Research reveals that there are two types of bengkoang marketing chanel in the reserch site:1) farmers → trader → retailers → consumers. 2) Farmers → retailers → consumers. Based on fairness analysis, this study finds that these marketing chanel are not fair, because the profit obtained by the farmers was lower than expected profit. Contrarely, the trader obtain the higher profit than profit that he was expected. Based on that findings, it is suggested that the farmers should sell their product in unit weight of Kg instead of sack, upgrade their product, sell the product as a group, develop marketing informations, cooperate with related companies such as restaurants, cosmetics and finally expand the market.*

Kata Kunci: pemasaran, saluran pemasaran, keadilan, bengkuang

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanaman bengkuang berasal dari Amerika Tengah dan masuk ke Indonesia sekitar tahun 1800. Tanaman ini termasuk *leguminosae* dengan tumbuhnya merambat lewat sulurnya, berbuah polong yang berisi biji dan berumbi berwarna putih berbentuk seperti gasing yang berasal dari akar primer dengan kulit yang mudah dikelupas. Umbi merupakan hasil produksi dengan rasa manis dan berair yang dapat dikonsumsi baik segar maupun olahan dan juga dijadikan bahan komestik (DPKKP, 1998). Perkembang biakannya bisa secara vegetatif lewat umbi dan stek dan generatif lewat biji. Tanaman bengkuang ini dikatakan kebal hama karena daunnya mengandung racun. Berkemampuan mengambil nitrogen dari udara dan perakaran mampu menembus lapisan tanah yang cukup dalam. Penyakit yang menyerang sangat jarang ditemui.

Dapat hidup dari dataran rendah sampai ke dataran tinggi dengan ketinggian 1000 m dpl (Lingga dkk, 1990).

Hasil produksi dari tanaman bengkuang, yaitu dari umbinya dapat dikonsumsi dalam keadaan segar. Dapat diolah menjadi sirup, keripik, jus, asinan, kue sagun dan bedak serta kosmetik lainnya. Disamping itu umbi bengkuang ini dapat dijadikan sebagai bahan baku kosmetik.

Perumusan Masalah

Bengkuang merupakan tanaman khas di Kota Padang sehingga Kota Padang dinamakan pula sebagai Kota Bengkuang. Banyak dijual pedagang sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang. Bengkuang yang berasal dari Kota Padang rasanya manis, banyak air dan enak dimakan. Diusahakan secara kurang intensif dengan menggunakan benih lokal. Sangat jarang dipupuk, dan kurang dalam kontrol bunga, yaitu memotong bunga yang muncul kalau mengharapkan umbinya

tumbuh sempurna. Menurut DPKKP (2005) produktivitasnya hanya 7,27 ton/ha dimana produktivitas bengkuang menurut Asriyunaldi (1996) dapat mencapai 20 ton/ha.

Walaupun menjadi tanaman khas di Kota Padang, perkembangan budidaya bengkuang Padang ini tidak begitu menggembirakan. Luas panennya hanya berkisar antara 106–140 ha per tahun dari tahun 2002–2004 dan hanya diusahakan di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kuranji, Pauh, Koto Tangah dan Nanggalo.

Bengkuang ini dijual sampai ke luar daerah seperti ke Pekanbaru di Provinsi Riau. Cara pelaksanaan panennya beragam yaitu ada yang dipanen oleh petani sendiri dan ada pula oleh pedagang pengumpul.

Tataniaga bengkuang di Kota Padang umumnya dari petani terus ke pedagang pengumpul kemudian terus ke pedagang pengecer yang banyak menjualnya di pasar-pasar baik di pusat pasar atau pasar satelit di Kota Padang. Dari hasil pra-survei tataniaga bengkuang diketahui margin tataniaganya cukup besar yaitu harga jual petani produsen ke pedagang pengumpul Rp 750,00/kg sedangkan harga pedagang pengecer ke konsumen Rp 1.500,00/kg. Dari data ini terdapat margin tataniaga sebesar Rp 750,00/kg yang mana jumlah ini sama besar dengan harga jual petani. Bagi petani harga jual Rp 750,00/kg ini termasuk biaya produksi, biaya tataniaga dan keuntungan. Sedangkan bagi pedagang margin tataniaga sebesar Rp 750,00/kg hanya merupakan biaya tataniaga dan keuntungan. Dari data ini dapat diduga bahwa petani produsen mendapatkan untung yang kecil dan pedagang mendapatkan untung yang besar, atau mungkin juga petani produsen merugi sehingga tataniaga bengkuang ini tidak adil. Tataniaga yang tidak adil adalah tataniaga yang tidak efisien. Muby-

arto (1984) mengatakan bahwa efisiensi tataniaga adalah mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan tataniaga barang tersebut. Yang dimaksud adil adalah pemberian balas jasa dari fungsi-fungsi produksi dan tataniaga sesuai dengan sumbangan masing-masing. Berdasarkan hal ini perlu diteliti efisiensi tataniaga bengkuang dari Kecamatan dan keadilan tataniaga bengkuang di Kota Padang.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kuranji Kota Padang yang merupakan sentra produksi bengkuang, dimana produksi terbanyak dihasilkan dari kecamatan ini. Daerah tataniaganya adalah di Pasar Raya Kota Padang dan di daerah terminal dan mangkalnya bus yang menuju ke luar Kota Padang. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Mei sampai dengan Juni 2006.

Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah petani produsen dan pedagang perantara bengkuang seperti pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. Penelitian dilakukan dengan metode survei dengan pengambilan sampel secara acak sederhana dengan alasan varietas bengkuang, lokasi tanam di lahan sawah, waktu tanam dan cara pemeliharaan yang homogen. Populasi petani berjumlah 47 orang pada waktu musim tanam tersebut dan sampel diambil sebanyak 20 orang petani. Pedagang pengumpul ditemui hanya 1 orang dan pedagang pengecer sebanyak 7 orang.

Data yang dikumpulkan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data dari petani sampel berupa identitas petani (umur, pendidikan, keluarga, pengalaman berusahatani, pekerjaan utama dan sam-

pingan, biaya produksi yang dikeluarkan (biaya benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja), informasi pasca panen (penentuan panen, pengangkutan, jumlah produksi, mutu produksi) dan informasi tataniaga (saluran tataniaga, harga, sistem penjualan dan pembelian). Data primer dari pedagang berupa identitas pedagang, kegiatan perdagangan (tempat pembelian sistem pembelian, tempat penjualan, penetapan harga, harga satuan dan biaya yang dikeluarkan selama tataniaga. Data sekunder berupa keadaan umum daerah penelitian dan data yang diperlukan yang berasal dari instansi yang terkait dengan penelitian ini.

Variabel yang diamati adalah lembaga tataniaga yang terlibat dalam penyaluran hasil produksi dari petani sampai ke konsumen, dan bentuk saluran tataniaga bengkuang, biaya-biaya usahatani, biaya tataniaga petani, harga jual, penerimaan dan keuntungan petani, biaya tataniaga pada masing-masing pedagang perantara, harga jual dan keuntungan pedagang perantara.

Tujuan penelitian efisiensi tataniaga dianalisis dengan efisiensi tataniaga berdasarkan keuntungan.

Pendapat Mubyarto (1984) mengatakan bahwa efisiensi tataniaga adalah mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan tataniaga barang tersebut. Yang dimaksud adil adalah pemberian balas jasa dari fungsi-fungsi produksi dan tataniaga sesuai dengan sumbangan masing-masing.

Balas jasa adalah berupa keuntungan yang diterima oleh petani dan pedagang perantara yang ikut serta dalam memasarkan barang itu. Sedangkan fungsi produksi dan fungsi tataniaga adalah korbanan atau input yang dikorbankan oleh petani dan pedagang

perantara dalam memproduksi dan menyampaikan barang itu ke konsumen akhir. Untuk itu efisiensi akan tercapai apabila keuntungan yang diterima sama dengan pemberian balas jasa dari korbanan (input) dari kegiatan produksi dan tataniaga yang dilaksanakan oleh petani dan lembaga tataniaga yang ikut serta dalam tata-niaga tersebut. Pemberian balas jasa dari korbanan kegiatan produksi dan tataniaga adalah merupakan keuntungan yang seharusnya diterima oleh petani dan pedagang perantara. Jadi efisien tataniaga ini dapat dicapai apabila keuntungan yang diterima sama dengan keuntungan yang seharusnya (Usman, 2010).

Rumus-rumus yang digunakan untuk menganalisa keadilan tataniaga berdasarkan keuntungan.

1. **Biaya dan Keuntungan Diterima Pada Petani dan Pedagang**

a. Biaya Total Petani

$$BT_t = BTU + Bpt$$

Dimana :

$$BT_t = \text{Biaya Total Petani (Rp/kg)}$$

$$BTU = \text{Biaya total usahatani (Rp/kg)}$$

$$Bpt = \text{Biaya tataniaga pada petani (Rp/kg)}$$

b. Keuntungan diterima Petani

$$Kt_a = Pt - BT_t$$

Dimana :

$$Kt_a = \text{Keuntungan yang diterima petani (Rp/kg)}$$

$$Pt = \text{Penerimaan petani (Rp/kg)}$$

$$BT_t = \text{Biaya tataniaga pada petani (Rp/kg)}$$

- a. Keuntungan yang diterima Pedagang

$$Kd_a = Pd - (Bpd + Hbd)$$

Dimana :

Kd_a = Keuntungan yang diterima pedagang yang ikut serta (Rp/kg)

Pd = Penerimaan pedagang yang ikut serta (Rp/kg)

Bpd = Biaya tataniaga pada pedagang yang ikut serta (Rp/kg)

Hbd = Harga beli pedagang yang ikut serta (Rp/kg)

2. Menghitung Keuntungan yang seharusnya

- a. Biaya Total

$$BT = BT_t + BT_{d_1} + \dots + BT_{d_n}$$

Dimana :

BT = Biaya total (Rp/kg)

BT_d = Biaya Tataniaga pada Pedagang yang ikut serta (Rp/kg)

- b. Keuntungan Total

$$KT = Kt_a + Kd_{a-1} + \dots + Kd_{a-n}$$

Dimana :

KT = Keuntungan total (Rp/kg)

Kt_a = Keuntungan yang diterima petani (Rp/kg)

Kd_a = Keuntungan yang diterima pedagang yang ikut serta (Rp/kg)

- c. Persentase biaya total petani

$$\%BT_t = \frac{BT_t}{BT} \times 100\%$$

Dimana:

$\%BT_t$ = Persentase biaya total pe-

tani (Rp/kg)

- d. Keuntungan seharusnya diterima petani

$$Kt_b = \%BT_t \times KT$$

Dimana:

Kt_b = Keuntungan seharusnya diterima petani (Rp/kg)

- e. Persentase biaya total pedagang

$$\%BT_d = \frac{BT_d}{BT} \times 100\%$$

Dimana:

BT_b = Persentase biaya total pedagang (Rp/kg)

- f. Keuntungan seharusnya diterima pedagang

$$Kd_b = \%BT_d \times KT$$

Dimana:

Kd_b = Keuntungan seharusnya diterima pedagang (Rp/kg)

3. Keadilan Tataniaga

- a. Berdasarkan Mubyarto (1984) keadilan Tata Niaga Pada Petani dihitung sbb:

$$Kt_a = Kt_b$$

Dimana:

Kt_a = Keuntungan yang diterima petani (Rp/kg)

Kt_b = Keuntungan yang seharusnya diterima petani (Rp/kg)

- b. Keadilan Tataniaga pada Pedagang

$$Kd_a = Kd_b$$

Dimana:

Kt_a = Keuntungan yang diterima pedagang (Rp/kg)

Kt_b = Keuntungan yang seharusnya diterima pedagang (Rp/kg)

dimana

- a. Adil: Apabila selisih keuntungan yang diterima dengan keuntungan yang seharusnya diterima kecil dari 5%
- b. Tidak adil: Apabila selisih keuntungan yang diterima dengan keuntungan yang seharusnya diterima besar dari 5%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Daerah Penelitian.

Kecamatan Kuranji terletak 6 km dari pusat Kota Padang. Ketinggian daerah 16 m dpl. Temperatur udara berkisar antara $24,0^{\circ}$ – $31,5^{\circ}$ C. Curah hujan rata-rata 305 mm/bulan dengan jumlah hari hujan 136,5 hari per tahun. Jenis tanahnya adalah aluvial yang terdapat di daerah aliran sungai dan podzolik merah kuning di daerah perbukitan dengan pH tanah 5,5–7,5. (Cabang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kec. Kuranji, 2005).

Kecamatan Kuranji punya 9 kelurahan dan 6 wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP), yaitu WKPP Pasar Ambacang, WKPP Lubuk Lintah, WKPP Kalumbuak, WKPP Korong Gadang, WKPP Kuranji, WKPP Gunuang Sariak dan WKPP Sungai Sapih. Luas kecamatan Kuranji 5.730,50 ha dengan luas sawah 2.126 ha dan tegalan 738 ha (Cabang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kec. Kuranji, 2005). Jumlah penduduk

99.542 jiwa. Mata pencaharian penduduk yang terbesar dari sektor pertanian (27%). Terdapat sarana irigasi, yaitu irigasi Batang Balimbiang, Irigasi Batang Kuranji dan Irigasi Batang Gua. Terdapat sebanyak 74 Kelompok Tani (KT), 2 buah Koperasi Unit Desa (KUD) 2 buah Koperasi Pertanian, 23 buah kios pupuk, 2 buah bank dan 1 buah pasar (Kantor Camat Kec. Kuranji, 2005).

Gambaran Usahatani Bengkuang di Kecamatan Kuranji

Sebagian besar umur petani di atas 55 tahun (55,00%), dimana umur ini kurang produktif dalam berusahatani. Hal ini bisa berpengaruh pada pelaksanaan usahatani, menurunkan produksi, penerimaan, pendapatan dan ke-untungan. Rata-rata pendidikan pet-ani terbanyak adalah tamat SLTA (sekolah lanjutan tingkat atas) yaitu 60,00%. Tingkat pendidikan ini cukup tinggi dan bisa memudahkan masuknya inovasi baru dalam melaksanakan usahatani bengkuang. Mudah-mudahan mene-rima inovasi baru akan memberikan pengetahuan usahatani yang lebih maju kepada petani.

Rata-rata luas lahan yang paling banyak adalah di bawah 0,5 ha yaitu 90,00%. Luas lahan di bawah 0,5 ha adalah luas lahan yang kecil. Hal ini akan mengakibatkan luas tanam dan luas panennya juga kecil sehingga mengakibatkan jumlah produksi beng-kuang pada masing-masing petani juga sedikit. Rata-rata status lahan yang terbanyak adalah milik sendiri (80%) dan hanya 20% lahan sewa. Banyaknya petani yang mengusahakan tanaman bengkuang di atas lahan milik sendiri berarti penda-patan dan keuntungan akan lebih banyak

diperoleh petani. Lebih banyaknya pendapatan dan keuntungan yang diperoleh akan menjamin modal untuk berusahatani selanjutnya. Di samping itu dengan status lahan milik sendiri mengakibatkan petani lebih bebas menentukan kebijaksanaan usahatannya tanpa dipengaruhi dan diatur oleh orang lain.

Rata-rata pengalaman berusahatani bengkuang sudah tinggi yaitu di atas 20 tahun (60,00%). Tingginya pengalaman berusahatani bengkuang mengakibatkan semakin mampunya petani dalam mengatasi kendala-kendala dan masalah-masalah dalam berusahatani. Tetapi disamping itu, makin tinggi pengalaman berusahatani semakin sulit pula menerima inovasi baru, karena petani merasa yakin dengan cara-cara yang mereka lakukan.

Jumlah anggota keluarga terbanyak adalah antara 4-6 orang (65,00%). Banyaknya anggota keluarga berarti banyak pula tenaga kerja yang tersedia dalam berusahatani, sehingga pelaksanaan usahatani akan lebih mudah dilakukan. Di samping itu dengan banyaknya tanggungan keluarga akan mendorong petani bekerja dan berusaha lebih giat disebabkan oleh tuntutan tanggungjawab terhadap keluarga yang besar.

Biaya Produksi

Pada Tabel 1 terlihat biaya produksi terdiri dari biaya yang dibayarkan dan biaya yang diperhitungkan. Yang termasuk biaya yang dibayarkan adalah biaya benih, tenaga kerja luar keluarga (TKLK), sewa lahan dan pajak (PBB). Sedangkan biaya yang diperhitungkan adalah biaya sewa lahan, tenaga kerja dalam keluarga (TKDK), bunga modal dan penyusutan alat.

Biaya benih adalah pembelian benih bengkuang untuk digunakan petani dalam usahatannya. Benih adalah berupa

butiran dari buah bengkuang yang berasal dari buah polong. Besarnya biaya ini berkisar antara Rp270.000– Rp 1.080.000 per luas lahan per musim tanam dengan rata-rata Rp. 434.763,28/luas la-han/MT. Terlihat biaya benih ini cukup besar yaitu 17,66% dari biaya total produksi. Besarnya biaya ini menyebabkan petani berfikir banyak untuk mengusahakan usahatani bengkuang ini.

Biaya tenaga kerja adalah berupa upah pekerja yang dibayarkan petani dalam membantunya dalam usahatani bengkuangnya. Upah tenaga kerja ini paling banyak dikeluarkan petani dalam mengolah tanah yang merupakan pekerjaan terberat dalam usahayani ini. Semua petani (100%) menggunakan bantuan tenaga kerja luar keluarga (TKLK) ini. Petani bersama TKLK mengolah lahannya untuk ditanami bengkuang. Biaya TKLK ini 12,82% dari biaya total produksi.

Sewa lahan adalah biaya yang dibayarkan petani untuk dapat menggunakan lahan petani lain untuk usahatani bengkuangnya. Hanya sebanyak 25% dari petani yang melakukan penyewaan lahan ini karena tidak memiliki lahan sendiri, atau lahannya digunakan untuk usahatani lain sedangkan 75% lainnya mengusahakan di lahannya sendiri. Cara penghitungan sewa lahan ini adalah 1/3 dari hasil padi kalau lahan ditanami dengan padi. Biaya sewa lahan yang dibayarkan ini cukup besar juga yaitu 10,61% dari biaya total produksi. Sewa lahan ada juga berupa biaya yang diperhitungkan dalam membayar sewa lahan milik sendiri. Biaya ini termasuk biaya yang besar yaitu 18,57% dari biaya total produksi. Penghitungannya berdasarkan biaya sewa yang dibayarkan, yaitu 1/3 dari hasil padi kalau sekiranya lahan itu ditanami tanaman padi.

Tabel 1. Rata-rata Penerimaan, Biaya Produksi, dan Keuntungan Pada Usaha-tani Bengkuang di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

No	Uraian	Rp/luas lahan	Rp/hektar	%
A.	Peneri-maan	2.528.281,12	6.742.082,99	
B.	Biaya Produk-si			
	1. Biaya Dibayarkan			
	a. Benih	434.763,28	1.159.368,75	17,66
	b. TKLK	315.612,50	841.633,33	12,82
	c. Sewa lahan	261.250,00	696.666,67	10,61
	d. Transportasi	133.136,50	355.030,67	5,41
	e. Pajak (PBB)	2.968,72	7.916,59	0,12
	Jumlah	1.147.730,50	3.060.616,01	46,62
	2. Biaya perhitungkan			
	a. Sewa lahan	457.187,50	1.219.166,67	18,57
	b. TKDK	740.937,50	1.975.833,33	30,10
	c. Bunga modal	101.767,87	271.380,99	4,13
	d. Penyusutan alat	14.015,63	37.375,01	0,57
	Jumlah	1.313.908,50	3.503.756,00	53,38
	3. Total biaya produksi	2.461.639,00	6.564.372,01	100,00
C.	Pendapatan	1.380.550,62	3.681.466,98	
D.	Keuntungan	66.642,12	177.710,98	

Biaya transportasi adalah biaya yang dikeluarkan petani bengkuang dalam mengangkut bengkuangnya ke pedagang perantara bagi petani bengkuang yang memanen sendiri bengkuangnya. Rata-rata biaya transportasi ini sebesar Rp 133.136,50/luas lahan/MT atau Rp 355.030,67/ha/MT (5,41% dari biaya total produksi).

Biaya pajak adalah besarnya biaya yang dibayarkan petani dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap lahan usahatannya. Biaya pajak ini berkisar antara Rp 5.000 – Rp 50.000 per luas lahan Rp 2.968,72/luas lahan/MT. Besarnya biaya pajak ini hanya 0,12% dari biaya total produksi.

Biaya tenaga kerja dalam keluarga (TKDK) adalah biaya yang persentasenya paling besar diantara biaya produksi (30,10%), yaitu Rp 740.937,50/luas lahan/MT atau Rp 1.975.833,33/ha/MT.

Tenaga kerja keluarga adalah tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga petani sendiri seperti bapak, ibu, anak-anak, saudara yang ikut dalam keluarga itu. Biaya TKDK adalah sumbangan anggota keluarga dalam usahatani. Walaupun biaya ini tidak dibayarkan tetapi perlu jadi perhatian petani, karena sebesar itulah biaya yang harus dia bayarkan kalau sekiranya anggota keluarganya itu tidak lagi membantunya dalam usahatani bengkuangnya.

Biaya bunga modal dihitung berdasarkan total biaya yang dibayarkan, yaitu 2%/bulan. Bunga modal juga merupakan biaya yang diperhitungkan. Tetapi juga harus menjadi perhatian petani, sebab sebesar itulah biaya yang harus dibayarkannya, kalau sekiranya dia menggunakan kredit bank untuk usahatani bengkuangnya.

Penyusutan alat adalah nilai penyusutan dari alat-alat yang digunakan petani selama dia be-rusahatani bengkuang, seperti cangkul, gunting tanaman dan pisau. Besarnya biaya penyusutan ini hanya 0,57% dari biaya total produksi.

Harga jual pada petani berkisar antara Rp 750,00/kg sampai Rp 1,187,50/kg. Harga Rp 750,00/kg terjadi pada petani yang pemanenannya dilakukan oleh pedagang pengumpul dan harga Rp 1.187,50/kg adalah harga pada petani yang memanen sendiri bengkuangnya. Untuk itu didapatkanlah rata-rata penerimaan petani Rp 2.528.281,12/luas lahan/MT dan Rp 6.742.082,99/ha/MT.

Pendapatan

Pendapatan petani adalah selisih jumlah penerimaan dengan biaya yang dibayarkan. Pendapatan ini merupakan uang yang betul-betul diterima petani di mana di dalamnya terdapat keuntungan usahatani dan biaya-biaya yang diperhitungkan seperti biaya sewa lahan, biaya TKDK, bunga modal dan penyusutan alat yang tidak pernah dibayarkan. Pendapatan yang di-dapat petani adalah sebesar Rp 1.380.550,62/luas lahan/MT atau Rp 3.681.466,98/ha/MT. Nilai pendapatan ini cukup besar yaitu 54,60% dari jumlah penerimaan.

Keuntungan

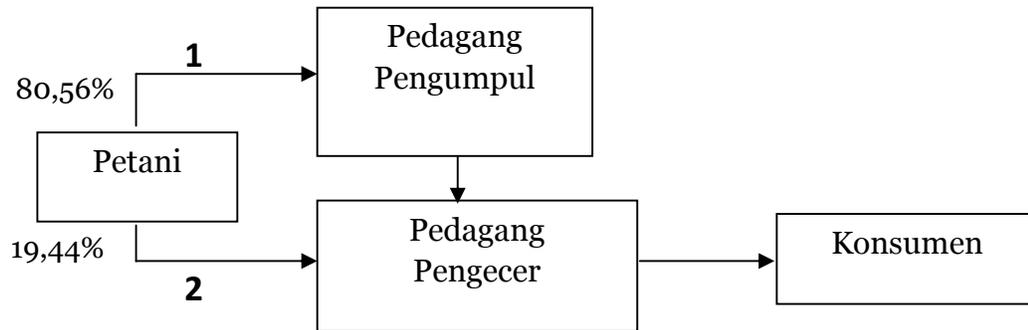
Nilai keuntungan yang di-dapatkan kecil sekali, yaitu Rp 66.642,12/luas lahan/MT atau Rp 177.710,98/ha/MT. Besarnya ke-untungan itu hanya 2,64% dari nilai pe-nerimaan. Kecilnya nilai ke-untungan disebabkan rendahnya jumlah produksi yang didapatkan. Produksi yang rendah disebabkan kurang baiknya cara budidaya bengkuang yang dilakukan petani. Dari Tabel 1 terlihat bahwa nilai keuntungan jauh lebih kecil dari nilai pendapatan yang disebabkan besarnya biaya yang diperhitungkan.

Tataniaga Bengkuang

Lembaga tataniaga yang terlibat dalam penyaluran bengkuang dari petani ke konsumen adalah pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. Dari hasil penelitian ditemukan 2 bentuk saluran tataniaga bengkuang yaitu :

1. Petani → Pedagang pengumpul → pedagang pengecer → konsumen.
2. Petani → pedagang pengecer → konsumen

Dari gambar 1 terlihat bengkuang lebih banyak disalurkan lewat saluran 1 yaitu dari petani terus ke pedagang pengumpul, pedagang pengecer dan terus ke konsumen, yaitu sebesar 80,56%. Selebihnya sebanyak 19,44% produksi bengkuang lainnya disalurkan petani melalui pedagang pengecer yaitu pada saluran 2. Di sini petani memanen sendiri bengkuangnya kemudian men-jualnya ke pedagang pengecer. Petani juga menjual dalam satuan karung, tetapi berat 1 karung 80 kg.



Gambar 1. Skema Saluran Tataniaga Bengkuang di Kecamatan Kuranji Kota Padang

Dalam penjualan dari petani ke pedagang pengumpul atau ke pedagang pengecer tidak dilakukan *grading*. Petani menjualnya dalam satuan karung dimana di dalam 1 karung tersebut berisi bengkuang dari ukuran kecil sampai besar dan dari bentuk pipih sampai dengan lonjong. *Grading* baru dilakukan oleh pedagang pengecer sewaktu mau menjual ke konsumen.

Sistem pembayaran oleh pedagang pengumpul dan pedagang pengecer kepada petani adalah sistem tunai, yaitu selesai setiap kegiatan panen oleh pedagang pengumpul langsung dibayar tunai ke petani. Demikian juga oleh pedagang pengecer ke petani.

Harga yang berlaku adalah harga yang disepakati waktu transaksi dilakukan. Biasanya harga lebih banyak ditentukan oleh pedagang pengumpul atau pedagang pengecer dibanding petani. Petani lebih banyak mempercayakan harga jual ini ke pedagang pengumpul dan pedagang pengecer karena antara petani dengan pedagang ini telah berhubungan lama. Pedagang pengumpul dan pedagang pengecer lebih mengetahui harga pasar dibanding petani. Penentuan harga oleh pedagang pengumpul dan pedagang pengecer berdasarkan harga pasar yang berlaku. Harga jual petani ke pedagang pengumpul Rp 75.000/karung dengan berat 100 kg dimana panen dilakukan oleh pedagang pengumpul. Harga jual

petani ke pedagang pengecer Rp 95.000/karung dengan berat 1 karung 80 kg dimana aktifitas panen dilakukan oleh petani.

Aktifitas panen yang dilakukan oleh pedagang pengumpul pada saluran tataniaga 1 dibiayai oleh pedagang pengumpul. Petani tidak mengeluarkan biaya panen dan biaya angkut. Tetapi pada saluran tataniaga 2, aktifitas panen dan pengangkutan dilakukan dan dibiayai oleh petani.

Keadilan Tataniaga

Pada Tabel 2 terlihat pada saluran tataniaga 1 biaya produksi petani mencapai 38,91% dari harga konsumen. Tidak ada biaya tataniaga pada petani sebab petani menjual bengkuangnya di lahan. Sedangkan biaya tataniaga pada pedagang pengumpul hanya 0,88% dari harga konsumen dan pada pedagang pengecer 6,21%. Terlihat di sini betapa besarnya persentase biaya yang ditanggung petani dibandingkan pedagang perantara.

Pada saluran tataniaga 2 petani menanggung biaya produksi dan tataniaga sebesar 68,36%, sedangkan pedagang pengecer hanya menanggung biaya sebesar 6,25%. Juga terlihat betapa besarnya biaya yang ditanggung oleh petani. Semakin besar biaya yang ditanggung

akan semakin besar pula resiko yang akan diterima.

Pada Tabel 2 secara umum terlihat pada saluran tataniaga 1 keuntungan per kg bengkuang tidak merata. Petani hanya dapat keuntungan sebesar 7,96%, pedagang pengumpul 28,12% dan pedagang pengecer 18,75% dari harga konsumen. Pada saluran tataniaga 2 keuntungan juga tidak merata. Petani dapat keuntungan yang terkecil juga yaitu hanya 5,86%,

pedagang pengecer mendapat 19,53% dari harga konsumen. lebih kecil.

Margin total pada saluran tataniaga 1 terlihat besar sekali yaitu Rp. 850,00/kg melebihi harga jual petani Rp 750,00/kg. Dapat dikatakan tidak terdapat pembagian yang adil pada saluran ini, dimana petani mendapatkan bagian yang kecil dari harga konsumen dibandingkan dengan pedagang perantara.

Tabel 2. Rata-rata Biaya Produksi dan Keuntungan Menurut Saluran Tataniaga pada Komoditi Bengkuang di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

No.	Uraian	Saluran Tataniaga 1		Saluran Tataniaga 2	
		Rp/kg	(%)	Rp/kg	(%)
A.	Petani				
	1. Biaya Produksi	622,62	38,91	961,91	60,12
	2. Biaya tataniaga	-	-	131,87	8,24
	a. Transportasi	-	-	25,00	1,56
	b. Biaya angkat	-	-	62,50	3,90
	c. Biaya lain-lain	-	-	44,37	2,78
	3. Jumlah biaya	622,62	38,91	1.093,78	68,36
	4. Harga jual	750,00	46,87	1.187,50	74,22
	5. Keuntungan	127,38	7,96	93,72	5,86
B.	Pedagang Pengumpul				
	1. Harga beli	750,00	46,87	-	-
	2. Biaya panen	95,50	5,97	-	-
	3. Biaya tataniaga	14,09	0,88	-	-
	a. Transportasi	12,50	0,78	-	-
	b. Biaya angkat	1,55	0,10	-	-
	c. Biaya lain-lain	0,00	0,00	-	-
	4. Jumlah biaya	109,59	6,85	-	-
	5. Harga jual	1.200,00	75,00	-	-
	6. Margin	450,00	28,12	-	-
	7. Keuntungan	340,41	28,12	-	-
C.	Pedagang Pengecer				
	1. Harga beli	1.200,00	75,00	1.187,50	74,22
	2. Biaya tataniaga	100,00	6,21	100,00	6,25
	a. Plastik + tali	30,00	1,87	37,50	2,34
	b. Keamanan	10,00	0,63	12,50	0,78
	c. Retribusi	10,00	0,63	12,50	0,78
	c. Biaya lain-lain	50,00	3,10	37,50	2,34
	3. Harga jual	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00
	4. Margin	400,00	25,00	412,50	25,78
	5. Keuntungan	300,00	18,75	312,50	19,53
D.	Total Biaya tataniaga	114,09	9,00	231,87	14,49
E.	Total Biaya	832,21	52,01	1.193,78	74,61
F.	Total Margin	850,00	53,13	412,50	25,78
G.	Total Keuntungan	767,79	47,99	406,22	25,39

Nilai distribusi biaya menunjukkan besarnya sumbangan lembaga tataniaga terhadap penyampaian suatu barang dari

produsen kepada konsumen. Makin besar nilai distribusi biaya pada lembaga tataniaga, maka makin besar sumbangan

lembaga tataniaga tersebut dalam penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Dari Tabel 3 pada saluran tataniaga 1 terlihat distribusi biaya pada petani jauh lebih besar (74,81%) dari pedagang pengumpul (13,17%) dan pedagang pengecer (12,02). Persentase distribusi biaya ini dari total keuntungan adalah merupakan keuntungan yang seharusnya diterima oleh petani dan pedagang perantara. Keuntungan yang seharusnya

diterima adalah sesuai dengan sum-bangan atau jasa yang diberikan oleh petani dan pedagang perantara dalam berproduksi dan menyampaikan barang ke konsumen. Makin besar sum-bangan/jasa yang diberikan maka makin besar pulalah keuntungan yang seharusnya diterima dan sebaliknya makin kecil sum-bangan/jasa yang diberikan maka makin kecil pulalah keuntungan yang seharusnya diterima.

Tabel 3. Distribusi Biaya Produksi dan Biaya Tataniaga pada petani Produsen dan lembaga Tataniaga Komoditi Bengkuang di Kecamatan Kuranji Kota Padang

No.	Uraian	Distribusi Biaya Pada Saluran Tataniaga 1		Distribusi Biaya Pada Saluran Tataniaga 2	
		Rp/kg	Persentase (%)	Rp/kg	Persentase (%)
A.	Petani				
	1. Biaya produksi	622,62		961,91	
	2. Biaya tataniaga	-		131,87	
	3. Jumlah	622,62	74,81	1.093,78	91,62
B.	Pedagang pengumpul				
	1. Biaya panen	95,50			
	2. Biaya tataniaga	14,09			
	3. Jumlah	109,59	13,17	-	-
C.	Pedagang pengecer				
	1. Biaya tataniaga	100,00		100,00	
	2. Jumlah	100,00	12,02	100,00	8,38
D.	Total biaya	832,21	100,00	1.193,78	100,00

Pada Tabel 4, terlihat pada saluran tataniaga 1 tidak satupun keuntungan yang diterima oleh petani (Rp 127,38) dan pedagang pengumpul (Rp 340,41/kg) serta pedagang pengecer (Rp 300,00/kg) sama dengan keuntungan yang seharusnya diterimanya yaitu Rp 574,38/kg untuk petani, Rp 101,12/kg untuk pedagang pengumpul dan Rp 92,29/kg untuk pedagang pengecer. Terlihat bahwa petani mendapatkan keuntungan yang diterimanya jauh lebih kecil dari keuntungan yang seharusnya dia terima. Sedangkan pedagang pengumpul dan pedagang pengecer menerima keuntungan yang jauh lebih besar dari keuntungan yang seharusnya dia

terima. Selisih antara keuntungan yang diterima dengan yang seharusnya diterima lebih besar dari 5%. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa saluran tataniaga 1 ini tidak efisien.

Pada Tabel 4 pada saluran tataniaga 2 juga terlihat tidak satupun keuntungan yang diterima oleh petani (Rp 93,72/kg) dan pedagang pengecer (Rp 312,50/kg) sama dengan keuntungan yang seharusnya diterimanya yaitu sebesar Rp 372,18/kg untuk petani, dan Rp 34,04/kg untuk pedagang pengecer. Terlihat bahwa petani mendapatkan keuntungan yang diterimanya juga jauh lebih kecil dari keuntungan yang seharusnya dia terima

dan pedagang pengecer menerima keuntungan yang jauh lebih besar dari keuntungan yang seharusnya dia terima. Selisih antara keuntungan yang diterima dengan yang seharusnya diterima lebih besar dari 5%. Untuk itu dapat pula disimpulkan bahwa saluran tataniaga 2 ini juga tidak efisien.

Tabel 4. Rata-rata Keuntungan yang diterima dan Keuntungan yang Seharusnya Diterima oleh petani dan Lembaga Tataniaga pada Komoditi Bengkuang di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

No.	Uraian	Keuntungan yang diterima (Rp/kg)	Keuntungan seharusnya diterima (Rp/kg)	Keadilan Tataniaga
A.	Saluran Tataniaga 1			
	1. Petani	127,38	574,38	Tidak adil
	2. Pedagang Pengumpul	340,41	101,12	
	3. Pedagang Pengecer	300,00	92,29	
B.	Saluran Tataniaga 2			
	1. Petani	93,72	372,18	Tidak adil
	2. Pedagang Pengecer	312,50	34,04	

Pada kedua saluran tataniaga ini terlihat betapa lemahnya petani bertransaksi dengan pedagang perantara, yaitu pedagang pengumpul dan pedagang pengecer sehingga dia mendapatkan keuntungan yang jauh lebih sedikit di-bandingkan keuntungan yang seharusnya dia terima dan sebaliknya pedagang perantara mendapatkan keuntungan yang diterimanya jauh di atas keuntungan yang seharusnya dia terima. Ada beberapa penyebab mengapa hal ini terjadi :

1. Terjadinya pasar monopsoni dalam menjual bengkuang dari petani ke pedagang pengumpul pada saluran tataniaga 1 dan pasar oligopsoni dari petani ke pedagang pengecer pada saluran tataniaga 2. Petani yang banyak jumlahnya terpaksa menjual hasil produksi bengkuangnya hanya kepada 1 orang pedagang pengumpul dan hanya beberapa pedagang pengecer. Hal ini menjadikan petani lemah dalam bertransaksi menyebabkan terjadinya

penekanan harga jual pada petani oleh pedagang perantara.

2. Ketakutan petani terhadap tidak terjualnya hasil produksinya sehingga dia menerima saja harga dan syarat menjual yang ditentukan oleh pedagang perantara. Hal ini disebabkan komoditi bengkuang punya sifat a) produk *perishable* yaitu cepat busuk dan mudah rusak, b) punya rentang waktu panen yang pendek, dimana kalau diluar rentang waktu panen, mutu hasil produk akan menurun, c) komoditi ini dikenal sebagai oleh-oleh. Jadi konsumen yang diharapkan membeli umumnya wisatawan kalau berkunjung ke Kota Padang sehingga permintaannya tidak banyak dan hanya meningkat pada waktu liburan.
3. Musim tanam umumnya serentak, karena bengkuang adalah tanaman sela yang ditanam di lahan sawah setelah tanaman padi sehingga ditanam setelah padi dipanen. Serentaknya menanam mengakibatkan panennya juga sere-

ntak, sehingga terjadi panen yang banyak. Akibatnya penawaran lebih besar dari permintaan sehingga harga jual pada petani jadi rendah.

4. Komoditi Bengkulu bukan makanan pokok yang tidak dikonsumsi konsumen terus menerus. Lagi pula Bengkulu ini kebanyakan dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang. Akibatnya permintaannya rendah. Rendahnya permintaan menjadikan penekanan harga jual pada petani.
5. Kurangnya informasi pasar dan pengetahuan petani dalam menjualkan hasil produksinya. Selain ke pedagang pengumpul dan pedagang pengecer, petani bisa menjualkan Bengkulu ke pengusaha restoran, pengusaha buah segar, pengusaha jus buah dan usaha pengolahan Bengkulu seperti usaha keripik Bengkulu, kosmetik dll.
6. Kurang jalannya peran organisasi petani yang ada (Kelompok Tani dan Koperasi Petani) dalam menjualkan hasil produksi anggotanya, sehingga tidak terkoordinirnya penjualan hasil produksinya secara sendiri-sendiri sehingga tidak ada kesatuan harga dalam menentukan harga jual Bengkulu diantara petani. Sendiri-sendirinya petani dalam menjual hasil Bengkulu mengakibatkan dia lemah dalam menentukan harga jual terhadap pedagang perantara yang jumlahnya tidak banyak.

Hal-hal di atas dapat diatasi dengan :

1. Membentuk Kelompok Tani atau Koperasi Petani. Kalau ini sudah ada maka organisasi ini perlu diaktifkan sehingga ada yang mengkoordinir dalam penjualan hasil produksi, menyatukan harga jual, sehingga terjadinya bentuk pasar monopsoni dan oligopsoni dalam penjualan Bengkulu

dari petani ke pedagang perantara. Kelompok Tani atau Koperasi Petani bisa berperan sebagai pedagang perantara yang bisa mencari pasar yang baru seperti restoran, pengusaha jus buah, pengusaha Bengkulu olahan, pengusaha kosmetik, mencari pasar di luar kota atau luar provinsi dll.

2. Mengembangkan informasi pasar, seperti memberikan informasi harga pasar dari komoditi Bengkulu. Hal ini mengurangi resiko tertipunya petani dalam menentukan harga jual produksinya.
3. Kelompok Tani atau Koperasi Petani bekerjasama dengan pengusaha restoran, jus buah, Bengkulu olahan, pengusaha kosmetik, baik dalam Kota Padang ataupun luar Kota Padang, dalam menampung hasil produksi petani, sehingga adanya keterjaminan pasar Bengkulu. Adanya keterjaminan pasar Bengkulu mengakibatkan petani terangsang untuk memproduksi secara kontinyu dan meningkatkan hasil produksi.
4. Mencari pasar di luar Kota Padang

Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Tataniaga Bengkulu di Kecamatan Kuranji tidak adil, dimana petani mendapatkan keuntungan yang diterimanya jauh lebih kecil dari keuntungan yang seharusnya dia terima. Sebaliknya pedagang pengumpul dan pedagang pengecer mendapatkan keuntungan yang diterimanya jauh lebih besar dari keuntungan yang seharusnya diterimanya.

2. Saran

Perlunya dilakukan penguatan kelembagaan baik yang berupa kelompok tani maupun koperasi petani serta melakukan perbaikan dalam

prosedur dan teknis pemasaran agar lebih berkeadilan.

Pertanian dan Kehutanan Kota Padang.

Daftar Pustaka

Cabang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kec. Kuranji, 2005. *Data inding Cabang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan kuranji*. Padang: Dinas Pertanian dan Kehutanan

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Padang, 1998. *Petunjuk Teknis Pengembangan Tanaman Palawija dan Sayuran. Proyek Peningkatan Produksi dan Pendapatan Petani*. Padang: Dinas

Kantor Camat Kec. Kuranji, 2005. "Laporan Tahunan Tahun 2004". Padang: Kantor Camat Kuranji, Kota

Lingga, Sarwono, Rahardi, Rahardja, Afriastini, Wudianto dan Harry Apriadji, 1990. *Bertanam Ubi-ubian*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Mubyarto, 1984. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.

Usman, Yusri. 2009. *Tataniaga Pertanian*. (Diktat Kuliah). Padang: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR PRODUKSI PUPUK DAN TENAGA KERJA PADA USAHATANI JAGUNG DI KENAGARIAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

M. Refdinal

Abstrak: *The purposes of this research are to analyze the impact of fertilizer and labour utilization on maize production and to examine the efficiency of fertilizer and labour utilization on maize farming. The research finds that there is no significant impact of the utilization from urea and SP-36 on maize production in the research site. However the utilization of NPK and labour impact significantly toward production. It means, the utilization of Urea and SP-36 have been maximum and no longer need to be increased, while the utilization of NPK and labour was not efficient and still can be increased. Moreover, based on efficiency analysis, The farming should use 270 Kg/ ha of NPK and 84,7 HKP/ha of labour in order to maximize the profit. By using that level of inputs, the profit could increase by 15.5%, from Rp 7.482.428,-/ha to Rp 8.655.998,-/ha.*

Kata Kunci : efisiensi, faktor produksi, usahatani jagung.

Pendahuluan

Jagung merupakan komoditas yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian Indonesia, karena tanaman ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku utama industri pakan serta industri pangan. Selain itu jagung juga berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto setelah padi dalam subsektor tanaman pangan (Syahyuti, 2012).

Dari sisi petani usaha tani jagung adalah sebuah bisnis, yang mengharuskan petani bertindak efisien untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

Menurut Soekartawi (2001) dalam melakukan usahatani, efisiensi usaha sangat dibutuhkan agar keuntungan yang diperoleh makin besar. In efisiensi dapat dihindari antara lain dengan menggunakan faktor produksi yang tepat.

Untuk mengetahui penggunaan faktor produksi yang tepat pada usahatani jagung, diperlukan suatu penelitian secara ilmiah. Dengan demikian

hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi petani dalam berusahatani jagung.

Perumusan Masalah

Di Sumatera Barat jagung hampir merata di usahakan disetiap kabupaten dengan sentra produksi terbesar ada di Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan data BPS (2013) produksi jagung di Sumatera Barat tahun 2012 berjumlah 495.497 ton, lima besar kabupaten penghasil jagung terbesar urutan tertinggi berturut-turut adalah: Pasaman Barat 264.764 ton (53 persen), Pesisir Selatan 89.175 ton (18 persen), Agam 49.269 ton (10 persen), Tanah Datar 17.492 ton (4 persen) dan Limapuluh Kota 15.421 ton (3 persen). Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jumlah produksi jagung selalu meningkat.

Berdasarkan penelitian Darma (2011) penggunaan input yang dilakukan oleh petani jagung tidak tepat sesuai anjuran, misalnya dosis penggunaan pupuk yang cenderung melebihi dosis yang dianjurkan dan penggunaan tenaga kerja di bawah anjuran. Anjuran

penggunaan pupuk untuk usahatani jagung adalah Urea 450 kg/ha, SP-36 100 kg/ha dan Kcl 100 kg/ha untuk pupuk tunggal. Alternatif lain yang dianjurkan untuk usahatani jagung adalah menggunakan pupuk majemuk dengan dosis Urea 200 kg/ha dan NPK (Phonska) 250 kg/ha dan tidak lagi menggunakan SP-36. Penggunaan pupuk oleh petani: Urea 401,36; SP-36 255,42 kg/ha; NPK 222,28 kg/ha. Jadi kelihatannya petani menggunakan dosis campuran dari kedua alternatif anjuran, sehingga secara keseluruhan jumlah pupuk yang digunakan melebihi anjuran. Untuk penggunaan tenaga kerja menurut anjuran adalah 100 HKP/ha, sedangkan yang digunakan petani masih 54,55 HKP /ha.

Berdasarkan data penggunaan pupuk dan tenaga kerja yang dikemukakan diatas secara akademik menimbulkan pertanyaan, bagaimana pengaruh pupuk dan tenaga kerja terhadap produksi dan seberapa besar penggunaan pupuk dan tenaga kerja yang efisien guna memperoleh keuntungan maksimal dalam usahatani jagung di Kinali Pasaman barat?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis bagaimana pengaruh penggunaan pupuk dan tenaga kerja terhadap produksi jagung di Kenagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
2. Menganalisis sejauh mana tingkat penggunaan pupuk dan tenaga kerja yang efisien untuk memperoleh keuntungan maksimal dalam usahatani jagung di Kenagarian Kinali Pasaman Barat.

METODE PENELITIAN

Data penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang ada pada penelitian Darma (2011) tentang analisa usaha tani jagung di Kenagariaian Kinali Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah produksi, penggunaan pupuk dan tenaga kerja usahatani jagung di Kenagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat .

No.	Produksi jagung (kg / ha)	Pupuk Urea (kg/ha)	Pupuk SP-36 (kg/ha)	Pupuk NPK (kg/ha)	Penggunaan tenaga kerja (HKP/ha)
1	3.667	367	233	200	37
2	4.643	393	250	214	63
3	4.500	425	275	225	44
4	4.500	425	250	250	48
5	4.667	400	267	233	57
6	4.250	425	250	225	54
7	4.500	425	250	225	49
8	4.500	400	275	225	47
9	4.667	400	267	233	58
10	4.500	400	250	200	66
11	4.500	400	250	200	64
12	4.500	400	250	250	45
13	4.500	425	275	225	48
14	4.667	400	267	233	58
15	4.667	375	250	208	73
16	4.500	425	250	225	48
17	4.500	425	250	225	48

18	4.250	400	275	250	44
19	4.500	400	200	200	49
20	4.500	400	250	200	74
21	4.667	400	267	233	52
22	3.667	367	233	200	31
23	4.250	400	250	250	45
24	4.500	425	275	225	49
25	3.667	367	233	200	31
26	4.500	375	250	188	81
27	4.625	400	313	250	53
28	3.667	367	233	200	33
29	4.250	425	250	225	43
30	4.500	400	275	250	43
Rata2	4.392	401,36	255,42	222,28	54,55

Sumber : Darma (2011) Analisa Usahatani Jagung di Kenagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Analisa Data

Untuk mencapai tujuan pertama, yaitu menganalisis pengaruh faktor produksi pupuk dan tenaga kerja terhadap produksi jagung dengan menggunakan model fungsi produksi Cobb-Douglas, yaitu dengan rumus :

$$Y = a X_1^{b_1} X_2^{b_2} X_3^{b_3} X_4^{b_4} e^u \dots \dots \dots (1)$$

Untuk memudahkan dalam perhitungan, rumus (1) diubah menjadi bentuk regresi linier berganda, dengan menggunakan logaritma natural, sebagai berikut:

$$\ln Y = \ln a + b_1 \ln X_1 + b_2 \ln X_2 + b_3 \ln X_3 + b_4 \ln X_4 + \dots + u \dots \dots (2)$$

- Y = Produksi jagung (kg/ha)
- X1 = Pupuk Urea ((kg/ha)
- X2 = Pupuk SP-36
- X3 = Pupuk NPK
- X4 = Tenaga kerja (HKP/ha)
- A = Konstanta
- B = Koefisien regresi
- u = Kesalahan (disturbance term)
- e = Logaritma natural (e = 2,718)

Untuk mengetahui kebaikan model yang digunakan dilakukan perhitungan nilai koefisien determinasi yaitu R-Square dan Adjusted R-Square.

Koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar variasi variabel dependen (Y) dalam hal ini adalah produksi jagung, bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen (X) yaitu pupuk dan tenaga kerja. Dengan mengetahui nilai koefisien determinasi, bisa menjelaskan kebaikan model. Nilai koefisien determinasi yang makin besar menunjukkan model makin baik. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1 (0 ≤ R ≤ 1).

Untuk mengetahui pengaruh penggunaan faktor produksi pupuk dan tenaga kerja secara serentak atau bersama-sama terhadap produksi jagung dilakukan Uji F, dengan hipotesa sebagai berikut :

- Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = 0
- H1 : paling sedikit salah satu bi ≠ 0 (i=1,2,...., i)

Perhitungan statistik Uji F (Soekartawi, 2003)

$$F_{hit} = \frac{KTR}{KTS} = \frac{b_i \sum X_i Y / k}{\sum Y^2 - b_i \sum X_i Y / n - k - 1} \dots (4)$$

dimana :

- n = Jumlah sampel
- k = Jumlah variabel
- Xi = Faktor produksi pupuk dan Tenaga kerja (satuan/ha)
- Y = Produksi jagung (Kg/ha)
- KTR = Rata-rata kuadrat regresi
- KTS = Rata-rata kuadrat sisa

Setelah dilakukan uji F dan hasilnya menunjukkan perbedaan yang nyata, maka selanjutnya dilakukan uji secara satu persatu (parsial) dengan menggunakan (uji t), yaitu untuk mengetahui faktor produksi pupuk dan tenaga kerja yang berbeda nyata terhadap produksi jagung. Hipotesis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor produksi pupuk dan tenaga kerja terhadap produksi jagung, adalah :

$$H_0 : b_i = 0$$

$$H_1 : b_i \neq 0$$

(i = 1, 2, 3,, i)

Perhitungan statistik uji t:
(Soekartawi, 2003)

$$|t| = \frac{b_i}{Sb_i}$$

$$Sb_i = \sqrt{\sum \frac{e_i^2}{n-k} \dots \dots} \quad (4)$$

dimana :

- bi = koefisien regresi penggunaan faktor produksi pupuk dan tenaga kerja
- Sbi = simpangan baku dari bi

Untuk mencapai tujuan kedua, menganalisis tingkat penggunaan faktor produksi pupuk dan tenaga kerja yang efisien, digunakan persamaan dimana Nilai Produk Marjinal (NPM) sama dengan Biaya Korbanan Marjinal (BKM).

$$NPM_x = BKM_x \quad \text{atau}$$

$$NPM_x / BKM_x = 1$$

Dalam kenyataan NPM_x tidak selalu sama dengan BKM_x, yang sering terjadi adalah :

- a) $NPM_x / BKM_x > 1$; artinya penggunaan input X belum efisien. Untuk mencapai efisien, input X perlu ditambah.
- b) $NPM_x / BKM_x < 1$; artinya penggunaan input X tidak efisien. Untuk menjadi efisien, maka penggunaan input X perlu dikurangi

Menurut Soekartawi (2003), NPM masing-masing faktor produksi dapat diketahui melalui persamaan :

$$NPM_x = P_y \cdot PM_x$$

$$PM_x = \partial Y / \partial X$$

Secara matematik fungsi keuntungan dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\Pi = Y \cdot P_y - \sum X_i \cdot P_x \quad \dots \dots \quad (5)$$

dimana :

- Π = keuntungan (Rp / ha)
- Y = rata-rata produks (kg / ha)
- Xi = rata-rata penggunaan faktor produksi ke -i
- Py = harga satuan produksi (Rp/kg)
- Px = harga satuan faktor produksi Xi (Rp/satuan faktor produksi).

Untuk mengetahui tingkat penggunaan faktor produksi yang efisien yang mendatangkan keuntungan yang maksimal dilakukan reorganisasi penggunaan faktor produksi (menambah atau mengurangi) dengan cara mencoba-coba (*trial and error*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penggunaan Faktor Produksi Pupuk dan Tenaga Kerja Terhadap Produksi Jagung Penggunaan Fungsi Produksi

Berdasarkan data sekunder sebagaimana telah dikemukakan pada metode penelitian, ditransformasikan menjadi logaritma natural dan diolah dengan menggunakan SPSS versi 15.00 (Besral , 2010) didapatkan hasil regresi seperti pada Tabel 2

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Fungsi Produksi Cobb Douglas Usaha tani Jagung di Kenagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Variabel	Koef. Regresi b	Std Error	Beta	T hit	Sig	Tolerance	VIF
Konstanta (a)	4,272	0,605	-	7,012	0,000	-	-
P.Urea (X1)	0,202	0,107	0,173	1,879	0,072	0,778	1,286
P.SP-36 (X2)	-0,027	0,064	-0,040	-0,420	0,678	0,722	1,384
P.NPK (X3)	0,375	0,092	0,423	4,062	0,000	0,606	1,651
Tenaga Kerja (X4)	0,263	0,026	0,814	9,954	0,000	0,983	1,017
F.hitung : 31,736 R Square : 0,835 Adjusted R Square : 0,809							

Berdasarkan koefisien regresi pada Tabel 5, maka fungsi produksi jagung:

$$\ln Y = 4,272 + 0,202 \ln X_1 - 0,027 \ln X_2 + 0,375 \ln X_3 + 0,263 \ln X_4 \dots\dots\dots(6)$$

Fungsi produksi ini dalam bentuk logaritma natural, dan kemudian dikembalikan menjadi bentuk fungsi produksi dasar, maka menjadi :

$$Y = 71,7 X_1^{0,202} X_2^{-0,027} X_3^{0,375} X_4^{0,263}$$

Koefisien Determinasi dan Uji Klasik

Sebelum fungsi yang didapat ditafsirkan, terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk menentukan apakah model yang digunakan dapat dikategorikan baik atau tidak dengan indikator R Squared dan Uji Klasik. Berdasarkan Tabel x terlihat bahwa nilai R

Squared cukup besar yakni 0,835 yang berarti bahwa variasi produksi jagung di lokasi penelitian 83,5 persen diterangkan oleh faktor produksi yang dimasukkan ke dalam model yakni faktor produksi pupuk dan tenaga kerja, hanya 16,5 persen ditentukan oleh faktor lain di luar model. Dengan nilai R squared yang cukup besar menunjukkan bahwa model yang digunakan dapat dikategorikan baik karena sebahagian besar variasi produksi jagung dapat dijelaskan oleh variasi penggunaan pupuk dan tenaga kerja. Secara teori, makin tinggi nilai R squared akan makin baik kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat.

Selanjutnya juga dilakukan Uji Asumsi klasik. Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan varians inflation factor (VIF) pada model. Berdasarkan nilai yang diperoleh kelihatannya model bebas dari multikolineritas karena nilai tolerance yang lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF yang

lebih besar dari 10. Uji Heteroskedasitas juga tidak ada masalah karena pola titik-titik pada *scatterplot* tidak menunjukkan pola tertentu atau pola yang jelas.

Uji statistik

Uji F

Proses selanjutnya adalah pengujian statistik yaitu Uji F dan Uji t. Uji F adalah pengujian untuk melihat apakah variabel bebas (pupuk dan tenaga kerja) secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel terikat (produksi jagung). Hasil pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 31,376

lebih besar dari F tabel 2,7587 pada tingkat alfa 5 persen. Dengan demikian variabel pupuk dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap variabel produk-si jagung.

Uji t

Uji t bertujuan untuk melihat apakah secara parsial (satu persatu) faktor produksi yang dimasukkan ke dalam model berpengaruh nyata terhadap produksi jagung pada tingkat alfa 5 persen. Hasil perhitungan Uji t dapat ditam-pilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pengujian Parsial (Uji t) Pengaruh Faktor Produksi Pupuk dan Tenaga Kerja Terhadap Produksi Jagung di Kenagariaian Kinali Kabupaten Pasamana Barat.

Variabel bebas	T hitung	T tabel	Hipotesis	Kesimpulan.
Pupuk Urea	1,879	2,060	t hit < t tabel	Ho diterima
Pupuk SP-36	-0,240	2,060	t hit < t tabel	Ho diterima
Pupuk NPK	4,062	2,060	t hit > t tabel	Ho ditolak
Tenaga kerja	9,954	2,060	t hit > t tabel	Ho ditolak

Berdasarkan Tabel 3. terlihat bah-wa faktor produksi pupuk urea dan SP-36 tidak berpengaruh nyata terhadap produksi, sedangkan faktor produksi pupuk NPK dan tenaga kerja berpe-ngaruh nyata terhadap produksi. Selanjutnya pengaruh masing-masing fak-tor produksi dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Pengaruh pupuk urea terhadap produksi jagung

Koefisien regresi faktor produksi pupuk Urea 0,202, yang berarti bahwa apabila penggunaan pupuk Urea di-tingkatkan 1 persen, maka akan mem-berikan peningkatan produksi jagung sebesar 0,202 persen. Jadi ada hu-bungan positif antara penggunaan pu-puk Urea dengan produksi jaung, tetapi peningkatan produksi yang terjadi tidak

nyata secara statistik. Hal ini mungkin disebabkan karena penggunaan faktor produksi pupuk Urea sudah inggi yakni rata-rata 401,36 kg/ha, pada hal menu-rut rekomendasi penggunaan pupuk Urea untuk tanaman jagung 450 kg/ha kalaudikombinasikan dengan pupuk tunggal (P, K) dan hanya 200 kg/ha kalau dikombinasikan dengan pupuk majemuk (NPK) (Anonim, 2012). Diduga penggunaan pupuk Urea di lokasi penelitian sudah mak-simal secara tek-nis, seangkan penggunaan Urea secara ekonomis tidak bisa ditentukan karena berdasarkan uji t pengaruhnya tidak nyata.

(2) Pengaruh pupuk SP-36 terhadap produksi jagung

Koefisien regresi faktor produksi pupuk SP-36 memperlihatkan tanda

yang negatif (-0,027), hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan pupuk SP-36 akan menurunkan produksi jagung, walaupun secara statistik penurunan tersebut tidak nyata. Berdasarkan informasi ini menandakan adanya indikasi penggunaan pupuk SP-36 telah berlebihan. Berdasarkan rekomendasi (Anonim, 2012) penggunaan pupuk SP-36 hanya 100 kg/ha bila dikombinasikan dengan pupuk tunggal dan tidak diajarkan lagi bila menggunakan pupuk majemuk (NPK). Dalam model ini penggunaan pupuk SP-36 secara ekonomis tidak bisa ditentukan karena pengaruhnya terhadap produksi tidak nyata.

(3) Pengaruh pupuk NPK terhadap produksi jagung

Koefisien regresi penggunaan pupuk NPK sebesar 0,375 dan secara statistik memberikan yang nyata terhadap produksi. Artinya penggunaan pupuk NPK masih belum efisien, masih dapat ditingkatkan dari penggunaan sekarang (222,28 kg/ha). Hal ini sejalan dengan rekomendasi Admin (2012), pupuk NPK, secara teknis dapat digunakan sampai dosis 270 kg/ha.

(4) Pengaruh tenaga kerja terhadap produksi jagung

Faktor produksi tenaga kerja, dengan nilai koefisien regresi 0,263, masih memberikan pengaruh yang nyata terhadap produksi kalau jumlah penggunaannya ditingkatkan. Penggunaan tenaga kerja untuk usahatani jagung meliputi kegiatan : pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, panen dan pasca panen. Menurut

Darma (2011) penggunaan tenaga kerja untuk pemeliharaan masih bisa ditingkatkan karena pemeliharaan yang dilakukan petani belum intensif. Menurut Adisarwanto dan Widystuti (2002) penyiangan untuk usahatani jagung dapat dilakukan 2-3 per musim tanam. Penyiangan yang dilakukan petani di lokasi penelitian hanya 1 kali.

Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor produksi pupuk dan tenaga kerja

Berdasarkan pendugaan fungsi produksi dan pengujian statistik dengan uji t maka hanya faktor produksi pupuk NPK dan tenaga kerja yang memberikan pengaruh nyata terhadap produksi jagung sedangkan pupuk urea dan SP36 tidak memberikan pengaruh yang nyata maka selanjutnya hanya faktor produksi pupuk NPK dan tenaga kerja yang dimasukkan kedalam model, sehingga fungsi produksi menjadi :

$$Y = 71,7 X_3^{0,375} X_4^{0,263}$$

Dimana

Y = produksi jagung (kg/ha)

X₃ = pupuk NPK (kg/ha)

X₄ = tenaga kerja (HKP/ha).

Efisiensi penggunaan faktor produksi untuk memperoleh keuntungan maksimal dapat dilihat dengan membandingkan Nilai Produk Marjinal dengan Harga Faktor Produksi. Sebelum menentukan penggunaan faktor produksi yang efisien, terlebih dahulu diketahui efisiensi penggunaan faktor produksi yang dilakukan petani saat ini, seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor Produksi Pupuk NPK dan Tenaga Kerja pada Tingkat Petani.

Variabel	RataRata Variabel (Xi)	MPPXi	Py	VMPx	Pxi	VMPxi/Pxi
Pupuk NPK	222,28	7,4095	2.200	16.300,9	2.400	6,792
Tenaga.Kerja	54,55	21,175	2.200	46,585	30.000	1,553
Produksi	: 4392 kg/ha					
BiayaProduksi	: Rp 2.169.972,-/ha					
Penerimaan	: Rp 9.662.400,-/ha					
Keuntungan	: Rp 7.492.428,-/ha					

Pada Tabel 4. Terlihat bahwa keuntungan usaha tani jagung pada tingkat petani sebesar Rp 7.492.428/ha (dalam perhitungan keuntungan biaya tetapi tidak dimasukkan karena fokus perhatian ditujukan untuk faktor produksi variabel). Sesuai dengan uji statistik yang dilakukan masih memungkinkan untuk meningkatkan produksi

secara nyata dengan meningkatkan penggunaan pupuk NPK dan tenaga kerja. Seberapa besar peningkatan faktor produksi, dilakukan reorganisasi penggunaan faktor produksi tersebut secara coba-coba (*trial and error*). Hasil akhir reorganisasi di ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Nilai Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor Produksi Pupuk NPK dan TenagaKerja (ReorganisasiOptimal Secara Statistik)

Variabel	Rata-Rata Variabel (Xi)	MPPXi	Py	VPPxi	Pxi	VMPxi/Pxi
P.NPK	1509,3	1,091	2.200	2.400,64	2.400	0,996
T.Kerja	84,7	13,637	2.200	30.001	30.000	1,000
Produksi	: 14.566,7 kg/ha					
Biaya Produksi	: Rp 6.163.320/ha					
Penerimaan	: Rp 32.046.740/ha					
Keuntungan	: Rp 25.883.420/ha					

Berdasarkan Tabel 5. Penggunaan pupuk NPK yang efisien secara statistik sebesar 1.509,3 kg/ha, tentu saja hal ini tidak logis secara teknis, karena rekomendasi teknis hanya 270,00 kg/ha. Penggunaan tenaga kerja sebesar 84,7 HKP/ha logis secara

teknis, dibandingkan dengan rekomendasi sebesar 100 HKP/ha. Untuk itu reorganisasi penggunaan faktor produksi yang lebih sesuai dengan syarat teknis, dengan hasil perhitungan seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Nilai Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor Produksi Pupuk NPK dan Tenaga Kerja (Reorganisasi Optimal yang Logis)

Variabel	Rata-Rata Variabel (Xi)	MPPXi	Py	VMPxi	Pxi	VMPxi/Pxi
P.NPK	270,0	6,100	2.200	13.420	2.400	5,591
T.Kerja	84,7	13,637	2.200	30.001	30.000	1,000
Produksi	: 5.384,09 kg/ha					
BiayaProduksi	: Rp 3.189.000/ha					
Penerimaan	: Rp 11.844.998/ha					
Keuntungan	: Rp 8.65.998/ha					

Pada Tabel 6, penggunaan pupuk NPK maksimal sebesar rekomendasi teknis yaitu 270,0 kg/ha. Kombinasi pupuk NPK 270,0 kg/ha dengan penggunaan tenaga kerja 84,7 HKP/ha dianggap paling logis karena memenuhi syarat teknis, sehingga kombinasi yang dianggap optimal. Pada tingkat penggunaan faktor produksi pupuk NPK dan tenaga kerja tersebut menghasilkan

keuntungan Rp 8.655.998/ha. Naik sebesar 15,5% dari keuntungan penggunaan faktor produksi pupuk NPK dan tenaga kerja yang dilakukan petani. Secara keseluruhan penggunaan faktor produksi pupuk NPK dan tenaga kerja antara anjuran, penggunaan tingkat petani dan penggunaan optimal dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Penggunaan Faktor Produksi Pupuk NPK dan Tenaga Kerja pada Tingkat Anjuran, Petani dan Optimal.

No	FaktorProduksi	Anjuran	Petani	Optimal
1	Pupuk NPK (kg/ha)	270,00	222,28	270,00
2	TenagaKerja (HKP/ha)	100,00	54,55	84,70

Berdasarkan Tabel 7, penggunaan pupuk NPK yang optimal merupakan rekomendasi teknis, sedangkan penggunaan faktor produksi tenaga kerja berada dibawah rekomendasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor produksi pupuk urea, SP-36, NPK dan tenaga kerja bersama-sama berpengaruh nyata terhadap produksi, sedangkan secara parsial hanya variabel pupuk NPK dan tenaga kerja yang berpengaruh nyata terhadap produksi jagung.

2. Untuk mencapai efisiensi ekonomis penggunaan faktor produksi pupuk NPK dapat ditambah sampai pada rekomendasi teknis sebesar 270 kg / ha dan penggunaan tenaga kerja dapat ditambah sampai tingkat penggunaan sebesar 84,7 kg / ha.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Kepada petani jagung kiranya dapat menggunakan faktor produksi pupuk NPK sampai batas rekomendasi teknis yang dianjurkan dan penggunaan tenaga kerja dapat ditingkatkan dari biasanya, terutama untuk kegiatan pemeliharaan.

2. Kepada pihak-pihak terkait kiranya dapat melakukan penelitian tentang dosis penggunaan pupuk NPK untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi daerah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisarwanto, T, Widyastuti, Y.E. 2002. *Meningkatkan Produksi Jagung di Lahan Kering, Sawah dan Pasang Surut*. Penebar Swadaya.
- Admin. 2012. *Cara Tepat Memupuk Jagung, Gagasan Pertanian*. Anonim. 2012. *Pupuk dan Pemupukan*, DuPont Pioneer.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2013. *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2012*
- Besral. 2010. *Pengolahan dan analisa data-1 menggunakan SPSS*. Departemen Biostatistika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
- Darma, S. 2011. *Analisa Usahatani jagung Di Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat*. Skripsi fakultas Pertanian Universitas
- Soekartawi. 2001. *Agribisnis, Teoridan aplikasinya*. PT Radja grafindo Persada, Jakarta.
- _____ 2003. *Teori Ekonomi Produksi, Dengan PokokBahasan Analisis Fungsi Produksi Cobb Douglas*. PT Radja grafindo Persada, Jakarta.

STRATEGI PENGEMBANGAN KOMODITI SAWO (*Achros Zapota, L*) DI KENAGARIAN SUMPUR KAB. TANAH DATAR SUMATERA BARAT

Syahyana Raesi

Abstrak: *Kenagarian Sumpur is the biggest producer of Sapodilla in West Sumatera. This product has a better taste than other varieties of Sapodilla, till Sapodilla of Kenagarian Sumpur is claimed as a superior local variety. The purpose of this study is to compose a recommendation of alternative strategy in developing of sapodilla in the research site. By using SWOT matrix, this study comes out with seven alternative strategies, which are: 1) developing networking with industries that use Sapodilla as a raw material. 2) Institutional Promoting to accelerate technology distribution and adoption, 3) developing policies to organize Sapodilla marketing, 4) Establishing a commucation forum of Sapodilla, 5) Improving and strenghtening cooperation among stakeholders, 6) Providing integrated training for the farmers, and 7) Improving the rule of agricultural extension.*

Kata kunci :Sapodilla, Kenagarian sumpur, Development strategy, IFE – EFE, SWOT

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sawo merupakan salah satu jenis buah yang sangat potensial untuk dikembangkan. Sawo merupakan buah-buahan yang memiliki rasa manis, serta menyehatkan, karena mengandung karbohidrat terutama adalah glukosa 4,2 gram/100 gram daging buah dan fruktosa 3,8 gram/100 gram daging buah. Kedua jenis gula ini mudah diserap oleh tubuh (Rismunandar, 1983). Tanaman sawo dapat tumbuh baik mulai dari dataran rendah sampai dengan ketinggian tempat 1200 m dpl. Budidaya sawo ini sudah meluas hampir seluruh Indonesia, Pada tahun 1993 terdapat lima propinsi sebagai sentra produsen terbesar di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta dan Kalimantan Barat (Badan Statistik Indonesia, 2000). Sedangkan di daerah Sumatera Barat sawo ini juga menyebar hampir diseluruh bagian

daerah ini. Hal ini terlihat dari terjadinya peningkatan luas panen sebesar 40% dan jumlah produksi sebesar 25 % dari tahun 2006 sampai tahun 2009. Salah satu daerah yang menghasilkan sawo terbesar di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Tanah Datar dengan luas panen 342,34 Ha. Disamping itu sawo juga merupakan komoditi buah-buahan unggulan Kabupaten Tanah Datar (BPS Kabupaten Tanah Datar, 2011). Kecamatan Batipuh Selatan merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 8.273 Ha dan terdiri dari 4 nagari yaitu Nagari Guguak Malalo, Nagari Padang Laweh, Nagari Sumpur dan nagari Batu Taba. Secara geografis Kecamatan Batipuh Selatan terletak pada 0°29'38"-0°35'30" lintang selatan dan 100°22' 36"-100° 31' 44" Bujur Timur (Profil Nagari Sumpur 2012).

Total luas panen untuk tanaman buah-buahan di Kecamatan Batipuh Selatan mencapai \pm 956,34 Ha, sebagian dari luas lahan tersebut ditanami dengan tanaman sawo. Luas panen tanaman sawo mencapai 65,13 persen dari total luas panen tanaman buah-buahan di kecamatan ini. (Badan Pusat Statistik Sumatera Barat .2008)

PERUMUSAN MASALAH

Di Kabupaten Tanah Datar Kecamatan Batipuh Selatan tepatnya nagari Sumpur merupakan salah satu sentra produksi sawo terbesar dibandingkan nagari lainnya dimana produksinya mencapai 7.596,60 ton dengan luas panen 201,60 Ha sedangkan nagari lainnya hanya mencapai 3000 ton (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanah Datar 2008).

Pada tahun 1994 Menteri Pertanian mengeluarkan SK pelepasan sawo lokal Sumpur sebagai varitas unggul, dan pada tahun 2004 anggota kelompok tani Sawah Tanjung yang merupakan satu satunya kelompok tani yang mengusahakan sawo di nagari Sumpur dan dalam bentuk perkebunan (Harmon ,2011)

Tahun 1997-1999 pemerintah mengembangkan sawo lebih luas lagi (\pm 20-25 ha). Sehingga masyarakat memperluas tanamannya pada lahan yang perbukitan dan lereng - lereng pegunungan. Peralihan penanaman sawo dari pekarangan ke perkebunan atau perbukitan menyebabkan terganggunya ekosistem alam disana, dimana binatang hutan mulai mencari makan kerumah rumah penduduk disekitarnya. Dari hasil penelitian Harmon (2011), akibat serangan hama monyet dan tupai terjadi penurunan produksi . karena petani melakukan pemanenan tanpa melihat apakah buah sawo sudah siap untuk dipanen atau belum sehingga menyebabkan penurunan kualitas yang ber-

pengaruh terhadap penurunan produksi seperti yang terjadi pada tahun 2008 sebesar 15,30% dan akibatnya pendapatan petani menjadi berkurang.

Komoditi sawo ini selain dikonsumsi sebagai buah juga dapat memberikan manfaat lain diantaranya sebagai 1. Tanaman penghijau hias dalam pot dan apotik hidup bagi keluarga 3. Tanaman penghasil buah yang bergizi tinggi dan dapat dijual didalam dan luar negeri yang merupakan sumber pendapatan ekonomi bagi keluarga dan negara, tanaman penghasil getah untuk bahan baku industri permen karet 4. Tanaman penghasil kayu yang bagus untuk pembuatan perabotan rumah tangga (Prihatman .2000).

Kajian dalam menganalisa strategi pengembangan komoditi sawo di daerah yang memiliki banyak potensi sumberdaya seperti di kenagarian Sumpur Kabupaten Tanah datar semakin penting sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan pendapatan petani. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian bagaimana rumusan strategi pengembangan sawo di Kenagarian Sumpur Kab. Tanah Datar. sedangkan tujuan penelitian adalah merumuskan bagaimana strategi pengembangan sawo di Kenagarian Sumpur Kab. Tanah datar

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kenagarian Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan, Kenagarian Sumpur merupakan penghasil sawo terbesar dan di tunjang dengan kesesuaian agroklimatologi. Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus 2013

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pada data sekunder di-

kumpulkan melalui studi literatur, pencarian melalui internet, dan mencari lembaga-lembaga sumber data, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Deputi, Pemerintahan daerah setempat. Dengan sumber data yang diambil, meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, IFE/EFE, dan SWOT. Analisis Deskriptif digunakan untuk mendeskriptifkan visi/misi pengembangan tanaman sawo, IFE/EFE digunakan untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bagaimana strategi pengembangan sawo, sedangkan analisa SWOT untuk merumuskan alternative strategi pengembangan sawo.

Matriks IFE / EFE

Evaluasi Faktor Internal (EFI) atau *Internal Factor Evaluation* (IFE) merupakan suatu alat formulasi strategi yang di dalamnya merangkum dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kunci dalam area fungsional bisnis serta memberikan dasar mengidentifikasi, mengevaluasi hubungan antara area-area tersebut. Matriks *External Factor Evaluation* (EFE) mengarahkan perumusan strategi untuk merangkum dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi dan tingkat persaingan (David, 2007)

Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah salah satu alat analisis pencocokan strategi (*strategic match*) antara kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman yang diciptakan oleh faktor-faktor eksternal organisasi, yang bertujuan untuk menghasilkan alternatif strategi yang layak dan terbaik (David, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah

Nagari Sumpur ini memiliki luas wilayah 7,87 km², yang terdiri dari lima jorong yaitu Jorong Batu Baragung, Jorong Kubu Gadang, Jorong Nagari, Jorong Seberang Air Taman, dan Jorong Sudut.

Secara umum keadaan topografi Nagari Sumpur merupakan daerah bergelombang dan berbukit-bukit yang terletak pada ketinggian 400- 500 meter dari permukaan laut (dpl) dan mempunyai rata-rata curah hujan 2100- 3000 mm/tahun. Nagari Sumpur berada pada dataran tinggi, sehingga memiliki cuaca dingin dan kelembaban tinggi, dengan suhu rata-rata 21-30 °C.. Jenis tanah di Nagari Sumpur bertekstur lempung berpasir yang subur, gembur banyak mengandung bahan organik, aerasi dan drainasinya baik. Jenis tanah ini disebut latosol. Derajat keasaman (pH) tanah di nagari ini antara 6,0-6,5 sehingga sangat cocok untuk tanaman sawo karena menurut Prihatman (2000), syarat tumbuh tanaman sawo yang baik antara lain : 1) memiliki iklim yang basah sampai kering, 2) berkembang biak pada suhu antara 22-32°C, 3) jenis tanah yang paling baik adalah tanah lempung berpasir (latosol), 4) memiliki derajat keasaman tanah (pH) yang cocok untuk perkembangan tanaman sawo adalah antara 6-7.

Nagari Sumpur memiliki pola penggunaan tanah yang masih didominasi oleh hutan yaitu dengan luas 331 Ha. Sedangkan untuk pertanian, ladang dan pekarangan 291 ha dan sisanya merupakan darah perairan danau atau kolam

Penggunaan tanah di daerah ini sebagian besar ditanami dengan tanaman perkebunan. Diantara tanaman perkebunan yang ditanam, sawo merupakan tanaman yang paling banyak ditanam dengan jumlah batang 12.700 batang

dengan jumlah produksi 297 ton/tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 1:

Tabel 1. Jenis Tanaman, Jumlah Batang dan Jumlah Produksi Tanama Perkebunan Nagari Sumpur Tahun 2012.

No	Jenis Tanaman	Jumlah Batang	Jumlah Produksi (Ton/Tahun)
1	Kelapa	8.750	218
2	Kopi	2.015	12
3	Cengkeh	670	7
4	Pala	319	1
5	Durian	256	63
6	Kuini	254	45
7	Vanilla	-	-
8	Kulit Manis	1.826	1
9	Sawo	12.700	297

Sumber : Profil Nagari Sumpur, 2012.

Profil komoditi Sawo di Kenagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan

Di daerah penelitian, sawo merupakan tanaman yang paling mendominasi untuk ditanami. Setiap kepala keluarga memiliki tanaman sawo di lahan pekarangan mereka.

Tanaman sawo Sumpur berasal dari Filipina yang dibawa pada masa kolonial Belanda pada tahun 1812. Dan biasanya ditanam dipekarangan. Komoditi sawo ini dibawa melalui Batavia langsung ke Bukittinggi setelah itu ke Danau Singkarak dalam rangka memenuhi kebutuhan akan buah serdadu Belanda. Bersamaan pada saat itu maka ditetapkanlah peraturan untuk setiap keluarga diwajibkan mengusahakan tanaman sawo tiga batang paling sedikit dipekarangan rumah masyarakat nagari Sumpur. Peraturan ini juga berlaku bagi semua anggota masyarakat nagari Sumpur yang akan berumah tangga. Tujuannya agar hasil produksi diberikan kepada Belanda sebagai pajak dan sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Namun peratur-

ran tersebut sekarang menjadi kebiasaan bagi masyarakat, sehingga dapat dilihat pohon-pohon sawo di setiap pekarangan rumah mereka yang menjadi ciri khas daerah nagari Sumpur dan hasil bisa dinikmati oleh anak cucu mereka nanti (Profil Nagari Sumpur. 2012)

Identifikasi faktor-faktor Strategi Internal

Faktor-faktor lingkungan internal yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan komoditi sawo di Nagari Sumpur Kabupaten Tanah Datar terdiri dari faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Faktor - faktor lingkungan internal yang menjadi kekuatan adalah : a) Potensi Sumber daya alam, b) Kesesuaian dengan kondisi agroklimat tanaman sawo, c) Budidaya tanaman sawo yang sudah dilakukan turun temurun, d) Keberadaan kelompok tani (KT. Sawah Tanjungan), e)Pengalaman berusaha tani yang sudah cukup lama, dan f) Secara nilai ekonomis mengun-tungkan.

Pada faktor - faktor lingkungan internal yang menjadi kelemahan adalah : a) Buah Sawo mudah busuk, b) Harga sawo ditingkat petani bervariasi, c) Pengolahan sawo belum ada, d)Informasi pasar terbatas, dan e) Kelembagaan pasar yang belum efektif

Identifikasi Faktor-faktor Strategi Eksternal

Faktor - faktor lingkungan eksternal adalah faktor- faktor di luar Dinas pertanian yang dapat mempengaruhi pengembangan sawo nantinya. Faktor eksternal tersebut dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman. Faktor- faktor lingkungan eksternal yang menjadi peluang adalah: a) Tanaman sawo merupakan tanaman yang akan dijadikan prioritas sebagai komoditi unggulan Kab. Tanah Datar, b) Adanya SK Menteri Pertanian tentang pelepasan sawo lokal Sumpur sebagai Varitas Unggul, dan c) Permintaan Pasar cukup besar. Sedang-

kan untuk faktor-faktor lingkungan eksternal yang menjadi ancaman adalah: a) Adanya persaingan harga pada waktu musim buah dengan buah lainnya, b) Serangan hama tupai dan kera, dan c) Belum adanya asosiasi tanaman sawo

Evaluasi Faktor Internal (IFE)

1. Kekuatan

- a) Potensi Sumber daya alam.
Sawo merupakan buah-buahan yang rasanya manis, menyegarkan dan menyehatkan, hal tersebut karena, sawo mengandung karbohidrat terutama adalah glukosa 4,2 gram/100 gram daging buah dan fruktosa 3,8 gram/100 gram daging buah.
- b) Kesesuaian agroklimat tanaman sawo.
Jenis tanah di Nagari Sumpur bertekstur lempung berpasir yang subur, gembur banyak mengandung bahan organik, aerasi dan drainasinya baik. Jenis tanah ini disebut latosol. Derajat keasaman (pH) tanah di nagari ini antara 6,0-6,5. (Profil Nagari Sumpur, 2012). Menurut Prihatman (2000), syarat tumbuh tanaman sawo yang baik antara lain : 1) memiliki iklim yang basah sampai kering, 2) berkembang biak pada suhu antara 22-32°C, 3) jenis tanah yang paling baik adalah tanah lempung berpasir (latosol), 4) memiliki derajat keasaman tanah (pH) yang cocok untuk perkembangan tanaman sawo adalah antara 6-7, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanaman sawo ini sangat cocok diusahakan di nagari Sumpur karena kondisi agroklimatnya yang sangat mendukung
- c) Budidayatanaman sawo yang sudah dilakukan turun temurun Masyarakat Sumpur sudah mengusahakan sawo mulai dari pemerintahan belanda sampai sekarang, sehingga sawo sudah men-

jadi bagian dari kehidupan masyarakat kenagarian Sumpur

- d) Keberadaan kelompok tani (KT. Sawah Tanjungan).
Kelompok Tani Sawah Tanjung merupakan satu-satunya kelompok tani yang melakukan budidaya sawo di kenagarian Sumpur dalam bentuk perkebunan sawo. Dimulainya adalah pada tahun 2004 setelah dikeluarkannya SK Menteri Pertanian : pelepasan sawo lokal sumpur sebagai varietas unggul.
- e) Ekonomis menguntungkan.
Berdasar hasil penelitian Fahri (2013) dengan umur ekonomis 20 tahun dan dengan discount faktor DF (25%) menghasilkan B/C = 3.61, Nilai NPV yang positif sebesar Rp 153,968,919.4, dari internal rate of return (IRR) =65% Dari hasil penilaian kriteria investasi, mengindikasikan bahwa perkebunan sawo di Nagari Sumpur adalah layak untuk dilaksanakan.

2. Kelemahan

- a) Buah Sawo mudah busuk.
Seperti produk pertanian lainnya, sawo juga merupakan komoditas yang tidak tahan lama, sehingga beresiko tinggi dalam pemasaran.
- b) Harga sawo di tingkat petani bervariasi.
Harga sawo sangat bervariasi atau berbeda disebabkan oleh rantai tataniaga yang panjang. Harga sawo ditingkat petani adalah sebesar Rp 4.000/kg sedangkan harga jual sawo ke konsumen Jakarta adalah sebesar Rp 10.000/kg.
- c) Pengolahan sawo belum ada.
Tanaman sawo merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi karena masih dapat diolah menjadi produk lanjutan. Tanaman sawo yang biasa dikonsumsi dalam bentuk segar, bisa diolah

menjadi bahan penganan seperti es krim, selai, sirup, atau difermentasi menjadi anggur atau cuka.

d) Informasi pasar terbatas.

Dari hasil penelitian Hidayat (2013) dapat diketahui bahwa lembaga-lembaga dipemasaran yang berperan penting dalam pemasaran sawo adalah petani, pedagang pengumpul, pedagang besar dan pedagang pengecer. Dari sini tergambar bahwa harga yang diterima ditingkat petani rendah sekali.

e) Pasar yang belum efektif.

Saat ini pasar sawo masih belum efektif. Hal ini disebabkan karena masih panjangnya tataniaga sawo. Petani masih lebih memilih menjual kepada pedagang pengumpul, sehingga hal ini menyebabkan rantai tataniaga yang panjang dan petani hanya mendapat margin yang sedikit.

Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)

Evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana aspek Peluang dan ancaman yang ada dapat dimanfaatkan dan di tanggulasi.

1. Peluang

a) Tanaman sawo akan dijadikan sebagai komoditi unggulan Kabupaten Tanah Datar.

Perkembangan pertumbuhan tanaman sawo di Nagari Sumpur semakin pesat dan berbuah bagus serta mempunyai cita rasa yang lebih baik di dibandingkan daerah asalnya mendorong pemerintah Kabupaten Tanah Datar mensosialisasikan tanaman sawo dibudidayakan pada lahan perkebunan.

b) Adanya SK Menteri Pertanian tentang pelepasan sawo lokal Sumpur sebagai Varitas Unggul.

Cita rasa dan produktifitas sawo yang lebih bagus dari daerah asal sawo membuat mentri mengeluarkan SK dan menjadikan sawo lokal sumpur sebagai varietas Unggul. Dengan adanya SK ini terbuka luas peluang dalam pengembangan sawo kedepannya.

c) Permintaan Pasar cukup besar.

Permintaan sawo sangat besar dan terus meningkat setiap tahun. Permintaan sawo tidak hanya berasal dari Kabupaten Tanah Datar tetapi juga berasal dari Padang, Pekanbaru, Medan, Bengkulu bahkan ke Jawa (Jakarta). di luar sumpur dan juga sampai ke Jawa. Dari semua pasar tujuan dalam pemasaran buah sawo ini, Kota Jakarta merupakan pasar tempat penjualan sawo terbesar dengan jumlah permintaan terbanyak yaitu sekitar 48 ton/bulan atau sekitar 40 persen dari total produksi sawo/bulan yaitu sekitar 120 ton/bulan (Hidayat .2013).

d) Tanaman sawo bermanfaat bagi kesehatan.

Sawo merupakan buah-buahan yang rasanya manis, menyegarkan dan menyehatkan, karena mengandung karbohidrat terutama adalah glukosa 4,2 gram/100 gram daging buah dan fruktosa 3,8 gram/100 gram daging buah. Kedua jenis gula ini mudah diserap oleh tubuh (Rismunandar, 1983). Disamping itu sawo juga memiliki kandungan gizi seperti 92,0 kal kalori, 0,5 gram protein, 0,1 gram lemak dan 60.00 SI vitamin (Rukmana,1997)

2. Ancaman

a) Adanya persaingan harga pada waktu musim buah dengan buah lainnya. Sebagai negara tropis yang kaya akan buah. Iklim di Indonesia sangat cocok untuk tumbuh kembangnya berbagai jenis buah-buahan. Peningkatan kualitas dan kuantitas buah lokal

juga merupakan salah satu upaya untuk peningkatan ekspor non-migas negara kita. Banyak sekali buah-buahan negara kita seperti rambutan, jeruk, pisang, mangga, salak, manggis, duku, jambu air, nenas, pepaya dan sawo, (Nuswamarhaeni, Endang dan Pohan, 1999). Hal tersebut selain memberikan keuntungan bagi negara juga memberikan ancaman bagi persaingan buah pada saat terjadinya panen yang bersamaan.

- b) Serangan hama tupai dan kera
Tanaman sawo ini dikelola secara tradisional dan tidak intensif. Lahan penanaman sawo yang beralih dari pekarangan ke lahan perbukitan dengan tujuan untuk komersialisasi menemui berbagai kendala, terutama dalam hal menanggulangi serangan hama tanaman yaitu hama tupai dan hama money.t serangan hama ini menyebabkan penurunan produksi sampai 15,30 % pada tahun 2008.
- c) Belum adanya asosiasi tanaman sawo. Asosiasi merupakan suatu wadah yang dapat menyalurkan aspirasi dan juga dapat menguatkan posisi dari suatu komoditi. Saat ini asosiasi yang mempunyai komitmen tinggi dalam pengembangan sawo belum ada, sehingga menyebabkan petani sawo berjalan sendiri-sendiri dalam semua aktifitasnya mulai dari hulu sampai pada pemasaran.

Perumusan Alternatif Strategi

Strategi dalam pengembangan komoditas sawo yang tepat di Kenagarian sumpur akan dirumuskan dengan menggunakan matriks *strengths, weaknesses, opportunities, threats* (SWOT). Dari matriks SWOT akan menghasilkan alternatif strategi yang dirumuskanvaluasi dari faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang ter-

cakup dalam kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dianggap akan memberikan dampak bagi pengembangan komoditi sawo ini. Dari Matriks SWOT didapatkan beberapa alternatif strategi sebagai berikut :

Strategi SO

1. Membangun kerjasama dengan industri yang menggunakan bahan baku sawo. Strategi ini perlu dilakukan untuk mendapatkan pasar yang dapat menampung bahan baku sawo, sehingga dapat diolah menjadi produk olahan lanjutan yang dapat memberikan nilai tambah. Strategi ini juga diperlukan karena mengingat sawo yang tidak tahan lama, sehingga dengan adanya pengolahan lanjutan dapat memperpanjang siklus dari sawo dalam bentuk olahan lanjut.
2. Menggalakkan kelembagaan untuk mempercepat penyampaian dan adopsi Iptek kepada petani. Strategi ini penting mengingat selama ini Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam pengembangan sawo belum maksimal disampaikan kepada petani dan diterapkan oleh masyarakat. Melalui kelembagaan diharapkan informasi mengenai perkembangan IPTEK dalam pengembangan sawo dapat terfokus dan terstruktur.

Strategi WO

1. Membuat Kebijakan yang mengatur tata niaga pemasaran sawo. Strategi ini sangat perlu dilakukan mengingat margin tataniaga yang didapat petani sangat kecil sehingga ini sangat merugikan petani. Kebijakan dalam hal ini adalah dalam bentuk menentukan harga terendah sawo di tingkat petani, sehingga petani masih dapat mendapatkan keuntungan

walaupun harga yang terus berfluktuasi

2. Membentuk Forum komunikasi sawo. Strategi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan komitmen bersama dalam pengembangan komoditas tanaman sawo. Sehingga semua permasalahan mengenai sawo dapat dirembukkan melalui forum komunikasi sawo.

Strategi ST

1. Meningkatkan kerjasama antara semua pihak (petani, dinas pertanian, swasta, perbankan) dalam upaya pengembangan sawo. Strategi ini sangat perlu dilakukan. Koordinasi yang serasi sehubungan dengan pengembangan tanaman sawo sangat diperlukan, karena akan sangat menentukan dalam memacu berkembangnya usaha kecil dan menengah dalam hal meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dan operasi pembinaan dan penguatan kelembagaan, penguatan sumberdaya dan teknologi serta peningkatan kemitraan yang saling menguntungkan. Koordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dapat berupa pembinaan dan penyuluhan serta pelatihan dalam pengelolaan sawo.
2. Memberikan pelatihan terpadu bagi petani dan memberikan penyuluhan tentang mutu. Strategi ini penting mengingat permintaan akan sawo yang terus meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut, pembinaan mutu dilakukan tidak hanya pada proses produksi, tetapi juga pada tahapan panen dan pascapanen yang pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan.

Strategi WT

Meningkatkan Peran penyuluh dalam upaya peningkatan hasil dan pembasmian hama. Peran penyuluh dalam upaya pengembangan tanaman sawo sangat diperlukan, hal ini mengingat banyaknya hama dan juga untuk peningkatan hasil panen sawo agar lebih meningkat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup petani sawo. Upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan baik petani maupun petugas melalui peningkatan pengetahuan dan penyuluhan dalam upaya pengembangan sawo

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi faktor strategi internal dan eksternal lingkungan dan dari analisis SWOT didapatkan beberapa alternatif strategi pengembangan komoditi sawo yaitu 1) Membangun kerjasama dengan industri yang menggunakan bahan baku sawo 2) Menggalakkan kelembagaan untuk mempercepat proses penyampaian dan adopsi Iptek kepada petani. 3) Membuat Kebijakan yang mengatur tata niaga pemasaran sawo 4) Membentuk Forum komunikasi sawo 5) Meningkatkan kerjasama antara semua pihak (petani, dinas pertanian, swasta, perbankan) dalam upaya pengembangan sawo 6) Memberikan pelatihan terpadu bagi petani dan memberikan penyuluhan tentang mutu 7) Meningkatkan peran penyuluh dalam upaya peningkatan hasil dan pembasmian hama

Saran

Perlu dibentuknya lembaga koperasi dan membuat program yang terarah untuk komoditi sawo dan melakukan pembinaan kepada penyuluh dan kelompok tani dalam meningkatkan kualitas serta kontinuitas komoditi sawo.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2008. "Laporan Tahunan 2008". Padang: BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar 2011. "Tanah Datar dalam angka 2010". Padang: BPS
- David, F.R. 2007. Manajemen Strategis— konsep. Edisi Ketujuh. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Pearson Education Asia Pte. Ltd. dan PT. Prehallindo.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanah Datar. 2008. *Laporan Tahunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanah Datar*. Kabupaten Tanah Datar.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat. 2008. *Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat*. Padang.
- Fakhri, A. 2013. Analisis Finansial perkebunan Sawo (achras Zapota L) Rakyat di nagari sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Padang: Skripsi Fakultas Pertanian Unand 93 hal.
- Harmon, F. 2011. *Analisa Usaha Tani Sawo (Achras Zapota. L) Di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar* [Skripsi]. Padang: Fakultas Pertanian. Universitas Andalas.
- Hidayat, R. 2013. Analisis Pemasaran Sawo (Achras Zapota , L) Dari nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar ke kota Jakarta (Skripsi). Padang: fakultas pertanian Universitas Andalas 88 Hal.
- Kelompok Tani Sawah Tanjung. 2008. *Standar Prosedur Operasional*
- Nuswamarhaeni, S, Endang D.P. dan pohan E.P. 1999, Mengenal Buah Unggul Indonesia .Jakarta: penebar Swadaya .
- Prihatman, K. 2000. *Sistem Informasi Manajemen Pembangunan di Pedesaan*. Jakarta: BAPPENAS.
- Rismunandar. 1983. *Membudidayakan Tanaman Buah-buahan*. Bandung: Sinar Baru.
- p Rukmana, R. 1997. Sawo. Yogyakarta : Kanisius.
- Wali Nagari Sumpur. 2012. *Profil Nagari Sumpur*. Nagari Sumpur Kabupaten Tanah Datar: Kecamatan Batipuh Selatan.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN: PENGALAMAN PESANTREN

Hery Bachrizal Tanjung

Abstract: *Participatory rural development is a strategic issue; however it's difficult to be implemented. All this time, participation is just be considered as people will to support the development. According to the Goverment and NGOs have tried to build an expectation to Pesantren to promote participatory rural development. The purpose of this paper is to analyze the potential of pesantren to develop participatory approach in rural development. The paper conludes that pesantren could follow the recent information and cutting- edge technology as well as participatory rural development.*

Kata kunci : Partisipasi, Pembangunan, Pesantren

Pendahuluan

Partisipasi dalam pembangunan tetap menjadi isu yang strategis dan perlu ditekuni oleh pengelola pemerintahan di Indonesia, karena kenyataan empiris masih menunjukkan pendekatan pembangunan selama ini belum sepenuhnya mampu merangsang timbulnya partisipasi masyarakat secara luas. Apa-lagi jika pembangunan hanya didasarkan pada asumsi ekonomi rasional dan perhitungan kuantitatif, yang menimbulkan kesan bahwa seluruh isu pembangunan dapat diatasi dalam pigura bersifat teknokratik dan strategi atas bawah. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sering hanya mudah diucapkan namun sulit dalam implementasi, karena partisipasi rakyat dalam pembangunan itu sesungguhnya adalah bentuk pembaruan kebudayaan politik yang memberikan ruang bagi prakarsa rakyat, padahal makna partisipasi yang difahami selama ini adalah adanya kemauan rakyat untuk mendukung pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah (Soetrisno, 1995).

Pesantren memiliki sejarah yang panjang dan berumur tua serta luasnya penyebaran, maka dapat difahami jika lembaga pendidikan ini memberi pengaruh

sangat besar kepada masyarakat sekitarnya (Kuntowijoyo, 1998). Kartodirdjo (1978) mencatat, banyak peristiwa sejarah abad 19 yang menunjukkan betapa besar pengaruh pesantren dalam mobilisasi masyarakat pedesaan untuk aksi-aksi protes terhadap kekuasaan birokrasi kolonial di pedesaan. Dengan asumsi yang sama, Kuntowijoyo (1998) melihat pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat mencoba meletakkan harapan pada pesantren dalam usaha memajukan pembangunan pedesaan dengan pendekatan partisipasi; dengan terlebih dahulu mencermati watak dan ciri barunya agar dapat menolong analisis sosialnya. Dengan demikian, tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis potensi pesantren, berdasarkan pengalaman empirisnya untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan.

Definisi dan Pandangan atas Partisipasi

Soetrisno (1995) menyatakan, ada dua definisi partisipasi yang beredar di masyarakat, yaitu: (a) partisipasi sebagai bentuk dukungan rakyat dalam rencana pembangunan yang dirancang dan ditentukan, dimana ukuran tinggi rendahnya

partisipasi dapat dilihat dari kemauan rakyat menanggung biaya pembangunan, baik dalam bentuk uang atau tenaga; (b) partisipasi merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai, dimana ukuran tinggi rendahnya partisipasi tidak hanya dilihat dari kemauan rakyat menanggung biaya pembangunan, tetapi dari ada atau tidaknya hak rakyat menentukan arah dan tujuan pembangunan, serta ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Sosiolog pembangunan masyarakat de Guzman (1989) memandang partisipasi dalam beberapa bentuk, yaitu: (a) hak rakyat, (b) aksi kelompok, (c) bagian esensial dari proses administrasi pembangunan, dan (d) satu indikator pembangunan pedesaan. Sedangkan bagi ahli penyuluhan pembangunan, Slamet (1992, 2003) partisipasi tidak hanya berarti pengerahan tenaga kerja rakyat secara sukarela tetapi justru yang lebih penting tergerakannya rakyat untuk mau memanfaatkan kesempatan yang tersedia melalui pembangunan guna memperbaiki kualitas hidupnya sendiri. Kemampuan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan harus didahului *proses belajar* untuk memperoleh dan memahami informasi serta memprosesnya menjadi pengetahuan tentang adanya sejumlah kesempatan bagi dirinya, kemudian melatih dirinya agar mampu berbuat dan termotivasi untuk bertindak. Jika rakyat telah bertindak menuju perbaikan kehidupannya, barulah dapat dikatakan rakyat telah berpartisipasi dalam pembangunan (Slamet, 1992; 2003 dan Sumardjo, 1999).

Catatan Kecil tentang Pembangunan

Soetrisno (1995) menyatakan bahwa di negara-negara berkembang,

juga termasuk Indonesia, pernah muncul gejala di mana pemerintah menempatkan pembangunan bukan lagi sebagai tugas rutin, tetapi telah diangkat sebagai satu ideology baru negara. Aspek positifnya adalah, pembangunan menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pelestariannya harus dijaga oleh semua warga negara; akan tetapi aspek negatifnya pembangunan menjadi sesuatu yang suci, serta tidak bebas dikritik dan dikaji ulang guna mencari alternatif, bahkan aparat negara menjadi sangat reaktif terhadap kritik yang muncul dari siapapun dan menempatkannya sebagai oposisi pemerintah. Padahal sebenarnya kritik adalah salah satu manifestasi dari partisipasi. Tentu saja lukisan kondisi tersebut sudah tidak berlaku lagi sekarang, karena negara Indonesia telah menjadi negara yang demokratis.

Hal menarik lainnya adalah, ternyata pilihan terhadap jenis partisipasi rakyat dalam pembangunan akan mempengaruhi model perencanaan yang dipilih oleh pihak perencana pembangunan dan pelebagaan sistemnya. Jika mobilisasi rakyat dipilih sebagai definisi partisipasi, maka model perencanaan yang muncul adalah perencanaan mekanistik, yang memandang fungsi perencanaan sebagai upaya mekanis untuk mengubah keadaan, dan menempatkan perencana sebagai ahli yang menciptakan "cetak biru" perubahan, yang harus diikuti oleh rakyat sesuai dengan buku petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Sudah pasti sesungguhnya model perencanaan ini tidak partisipatif dan tidak demokratis. Jika definisi partisipasi rakyat dalam pembangunan itu ialah bentuk kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai, maka model perencanaan yang muncul adalah *human action planning model*, yang menekankan peranan perencanaan sebagai usaha sistematisasi aspirasi pem-

bangunan yang ada di masyarakat dan menyusunnya ke dalam dokumen tertulis.

Mungkin merupakan gejala universal bahwa setiap elit politik negara atau pemerintah terhadap rakyatnya adalah seperti bapak terhadap anaknya. Sebagai bapak, dia merasa wajib terus membantu menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh anaknya atau rakyatnya. Namun tanpa disadari, nilai dan orientasi seperti ini akan menjadi kendala untuk bangkitnya kemauan rakyat berpartisipasi dalam pembangunan. Bahkan akan muncul rasa ketidakmampuan di kalangan rakyat dan sekaligus ketergantungan kepada pemerintah untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Padahal pembangunan menuntut adanya proses belajar menuju kemampuan rakyat guna memecahkan masalah mereka secara mandiri, tetapi paternalisme tidak memberi kesempatan untuk hal itu.

Untuk mengatasi budaya paternalisme di dalam suatu kelembagaan masyarakat, menurut Soetrisno (1995) dibutuhkan kemampuan kepemimpinan yang dapat menciptakan antusiasme di kalangan anggota kelembagaan tersebut, agar percaya terhadap kemampuan mereka menyelesaikan masalah secara mandiri. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk membangkitkan antusiasme, yaitu: (a) pemimpin kelembagaan masyarakat harus memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk ikut menentukan jenis program dan tujuannya, (b) pemimpin kelembagaan mau dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan dialogis agar dapat menumbuhkan kreatifitas para anggota untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Agar kelembagaan masyarakat dapat menjalankan dua fungsi tersebut dibutuhkan kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk memperkuat budaya demokrasi di kalangan aparat pelaksanaannya. Kebangkitan antusiasme rakyat itu pada dasarnya adalah motivasi rakyat

untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi rakyat dalam pembangunan masyarakat khususnya di pedesaan, bukan lagi persoalan mau atau tidak mau, tetapi bagaimana melalui partisipasi tersebut rakyat memperoleh manfaat sosial ekonomi dari pembangunan itu.

Nilai Dasar Pesantren

Mastuhu (1989) menyatakan, pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam, dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Tujuan dari pendidikan pesantren adalah untuk menciptakan dan mengembangkan pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt, berakhlak mulia, bermanfaat dan berkhidmat kepada masyarakat, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh kepribadian, mencintai ilmu untuk mengembangkan kepribadian muhsin, serta menegakkan dan menyebarkan agama dan kerjayaan umat Islam di tengah masyarakat. Selain sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal (baik dalam bentuk madrasah, sekolah umum, maupun perguruan tinggi), pesantren juga merupakan suatu komunitas tersendiri yang memiliki unsur-unsur orangnya, perangkat keras dan perangkat lunak, sistem nilai dan kebutuhan bersama, serta interaksi sesama dalam satuan waktu tertentu. Pelaku utama pesantren adalah kiai atau ulama, para ustadz dan ustadzah, para pengurus pelaksana, dan para santri. Kiai adalah tokoh kunci yang menentukan corak kehidupan pesantren, dimana semua warga pesantren tunduk kepada kiai dan berusaha keras melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya.

Nilai yang mendasari pesantren ada dua kelompok, yaitu: (a) nilai-nilai agama yang mengandung kebenaran

mutlak, bercorak fikih sufiistik dan berorientasi kepada kehidupan akhirat, dan (b) nilai-nilai kehidupan yang memiliki kebenaran relatif, bercorak empirik dan pragmatis untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan dengan tetap merujuk kepada hukum agama. Wahid (1987) melihat pesantren sebagai lingkungan pendidikan yang integral dan sekaligus sub kultur dalam masyarakat Indonesia. Tiga elemen yang membentuk pesantren sebagai sub kultur, yaitu: (a) pola kepemimpinan pesantren yang mandiri dan tidak terkooptasi oleh negara, (b) kitab-kitab klasik sebagai rujukan umum, dan (c) sistem nilai yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas.

Wahid (1987) menjelaskan, kepemimpinan kiai-kiai di pesantren sangat unik karena memakai sistem kepemimpinan pra-modern. Relasi sosial antara kiai-ulama-santri dibangun atas dasar kepercayaan, bukan karena patron-klien sebagaimana dilakukan masyarakat pada umumnya. Ketaatan santri kepada kiai ulama lebih dikarenakan mengharapkan barchah (*grace*) seperti difahami dari konsep sufi. Konsep kepemimpinan seperti ini sering dianggap mengabaikan usaha modernisasi pesantren di masa depan. Elemen ke dua, adalah memelihara dan mentransfer literatur-literatur atau kitab-kitab klasik umum dari generasi ke generasi, dimana hanya ulama-ulama besar yang memiliki otoritas untuk menginterpretasi dua sumber pokok Islam. Dengan cara ini, pesantren adalah model bagi pencarian pengetahuan masyarakat muslim. Masyarakat juga memandang pesantren sebagai komunitas yang ideal dalam mengembangkan perilaku kehidupan berlandaskan moral keagamaan. Elemen ketiga adalah keunikan sistem nilai yang bertumpu pada pemahaman literal tentang ajaran Islam, namun dalam kenyataan praktis, sistem nilai tidak dapat dipisahkan dengan elemen lain yaitu kepemimpinan kiai-ulama di satu sisi dan penggunaan literatur yang

dipakai pada sisi lain melalui pelem-bagaan ajaran Islam dalam praktek kehidupan kiai-ulama dan santri sehari-hari, sekaligus sebagai bentuk legitimasi pada kepemimpinan kiai-ulama dan literatur tersebut. Mastuhu (1989) mencatat beberapa prinsip pendidikan pesantren yang sekaligus telah menjadi nilai kehidupan santri sehari-hari, yaitu: teosentris, sukarela dan mengabdikan, kearifan, kesederhanaan, kolektivitas, kebebasan yang dipimpin, mandiri, serta mencari dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan.

Perkembangan pesantren telah dimulai sejak awal abad 20, meliputi kurikulum, metode mengajar, dan kelembagaan. Perkembangan kurikulum dimulai sejak 1906 ketika kerajaan Jawa mendirikan Mambaul 'Ulum tempat mendidik calon-calon pejabat agama, dengan memasukkan kurikulum ilmu pengetahuan umum ke dalam pendidikan agama itu; ternyata perkembangan serupa juga terjadi di Sumatera Barat. Dalam metode mengajar ada perkembangan dari sistem *salaf* ke sistem *madrasi*. Sistem *salaf* adalah metode mengajar secara tradisional dengan *sorogan* (bimbingan individu), dan *bondongan* (semacam kuliah umum). Dalam sistem *salaf* tidak ada pembagian tingkatan kemajuan belajar, karena setiap santri menentukan sendiri menentukan sendiri kemajuannya dengan menunjukkan kemampuan penguasaan buku-buku kepada kiai secara perorangan. Sistem *madrasi* yang sudah di kenal di Sumatera Barat sejak tahun 1907 dan di pesantren Jawa pada tahun 1920, diberlakukan sistem kelas atau tingkatan kemajuan belajar (Kuntowijoyo, 1998).

Pada era 1960-an ada perkembangan baru ketika banyak pesantren yang dilembagakan atau berbadan hukum yayasan, dimana biasanya akan ada beberapa orang teknokrat di dalam struktur organisasi dan itu artinya kiai bukan lagi satu-satunya penguasa di pesantren tersebut, bahkan mungkin hanya berfungsi simbolis. Pesantren Asy-

Syafi'iyah di Jakarta telah mempunyai badan hukum yayasan sejak tahun 1963, mempunyai pengurus dengan pembagian kerja yang terinci: yang mengasuh jenjang pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga universitas. Demikian juga Pesantren Salafiah Suafi'iyah Sukarejo Situbondo Jawa Timur telah berbadan hukum yayasan sejak tahun 1970, yang juga mengasuh jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga universitas.

Interaksi Pesantren dan Pembangunan Pedesaan

Pesantren bukan lagi hanya lembaga tingkat desa, tetapi telah menjangkau perkotaan atau setidaknya daerah batas kota. Besar kecilnya pesantren (setidaknya ditandai dengan jumlah dan asal daerah santri) dan sistem pendidikannya, akan mempengaruhi hubungan antara pesantren dan desa. Ketika jumlah santri masih sedikit dan berasal dari desa sekitar, pesantren sepenuhnya sebagai lembaga tingkat desa, namun ketika jumlah santri semakin besar dan berasal dari beragam daerah bahkan dari luar negeri, maka pesantren akan berdiri sendiri dan lepas dari desa. Kuntowijoyo (1998) menyatakan, biasanya perjalanan pesantren akan melewati tiga fase, yaitu: (a) fase pesantren masih terpadu dengan desa, (b) kemudian mulai terpisah dari desanya, dan (c) akhirnya pesantren menjadi lembaga yang mungkin saja terasing dari desanya.

Sebagai ilustrasi dapat dilihat riwayat pertumbuhan Pondok Pesantren Darussalam di Banyuwangi, yang didirikan tahun 1951 hanya dengan sebuah Mushalla kecil, sebagai tempat kiai-ulama mengajarkan kitab-kitab dan sekaligus tempat bermalam para santri. Kemudian pesantren tumbuh secara pelan-pelan dengan usaha para santri mengumpulkan dan membuat bahan bangunan (batu sungai, kayu hutan, dan batu bata) untuk membangun lokal belajar atau bangunan pesantren, yang mendapat bantuan dari

penduduk desa. Pesantren terus berkembang dengan jumlah santri yang semakin meningkat dan memilih bentuk sekolah, namun uniknya sampai tahun 1985 masih menggunakan sistem *salafi* dengan *bandongan* juga. Pesantren Darussalam juga aktif dalam pembinaan pengetahuan dan keterampilan santri pada isu-isu selain mata pelajaran agama, seperti manajemen, perpustakaan, kesehatan, teknologi tepat guna, dsb. Kerjasama pesantren dengan lembaga di luar desa, seperti LP3ES Jakarta dan LKNU pusat telah menempatkan pesantren sebagai lembaga yang berada di atas desa. Barangkali hanya kesamaan agama dan "tingkat ekonomi" para santri dengan masyarakat sekitar yang tetap mengikat pesantren dengan desa tersebut.

Contoh lain, adalah Pondok Pesantren Pabelan, Muntilan Jawa Tengah, yang lahir di tahun 1965 atas prakarsa dan musyawarah para tokoh masyarakat desa. Pada mulanya pesantren ini hanya tempat kursus keterampilan pemuda dan pengajian masyarakat desa, yang pembiayaannya ditopang dengan usaha pengumpulan beras oleh penduduk setempat, kemudian tumbuh berkembang sehingga di tahun 1985 pesantren dihuni oleh 1280 orang santri dan diasuh oleh 75 orang guru. Pesantren Pabelan memiliki hubungan dengan dunia luar, seperti ITB dan LP3ES; namun demikian pesantren tetap berusaha menjadi bagian dari desa dengan meniadakan jarak fisik dan psikis (Hidayat, 1985). Untuk kasus ini, menurut Kuntowijoyo (1998), pengelolaan pesantren tersebut memang terpisah dari kelembagaan desa, tetapi ada usaha yang keras dari pesantren untuk tidak lepas secara fungsional dari desa.

Lain halnya dengan Pondok Pesantren Darussalam, Gontor, Jawa Timur (terkenal dengan nama Pondok Modern Gontor) yang secara struktural memang bukan bagian dari desanya. Rahardjo (1982) menyebut Pondok Gontor ini bagai sebuah *enclave* di

tengah-tengah masyarakat pedesaan. Cita-cita sejak berdirinya pesantren ini memang bukan semacam pesantren level desa biasa, dengan sistem pengajaran bukan *salafi* seperti kebanyakan pesantren di Jawa Timur, tetapi merujuk pada model Universitas Al-Azhar di Mesir (yang terkenal sebagai kubu intelektual dunia Islam) dan pola sistem *boarding and full day school* seperti sekolah-asrama di banyak negara Eropa; serta juga memiliki sejumlah tanah wakaf seluas 230 hektar dan usaha-usaha pertanian untuk pengabdian pada masyarakat yang tersebar di seluruh Jawa Timur (Shai-fullah, 1982). Santri Pesantren Gontor tidak hanya berasal dari desa setempat tetapi dari seluruh daerah Indonesia bahkan luar negeri, dan kebanyakan dari kelas sosial ekonomi menengah ke atas. Dengan kondisi demikian, Pesantren Gontor dapat disebut sebagai pesantren yang terasing secara struktural dari desa (Kuntowijoyo, 1998).

Namun, pemisahan struktural tidak selalu juga berarti berpisah secara fungsional antara pesantren dan desa setempat. Pengalaman empirik menunjukkan pesantren tetap memiliki hubungan fungsional dengan desa-desa sekitar melalui pendidikan agama (setidaknya melalui dakwah di masjid setempat) dan kegiatan sosial ekonomi. Prasojo (1982) menyebut ada tiga macam pelayanan pesantren kepada masyarakat sekitar, yaitu: (a) kegiatan *tablig* atau ceramah umum tentang agama Islam kepada masyarakat yang dilakukan di dalam lingkungan pesantren, (b) kegiatan *majlis ta'lim* atau pengajian agama Islam yang lebih intensif kepada masyarakat umum, dan (c) bimbingan *hikmah* atau nasihat kiai-ulama kepada orang-orang yang datang berkunjung ke pesantren. Selanjutnya disebut oleh Prasojo, hampir semua elemen pesantren (kiai, ulama, ustadz, santri, dan fisik sarana-prasarana dan peralatan operasional pesantren) biasanya memiliki kaitan atau hubungan fungsional dengan masyarakat desa. Hubungan fungsional tersebut biasanya

dimulai dengan sumbangan desa kepada tahap penumbuhan pesantren, tetapi kemudian jika saatnya tiba akan terjadi sumbangan pesantren kepada desa. Pesantren adalah sumber banyak hal bagi masyarakat desa-desa sekitar, antara lain : (a) sumber pengetahuan agama dan umum, (b) sumber tumbuhnya para elit/pemimpin desa bahkan nasional, (c) tempat memperoleh manfaat sosial ekonomi (misal, operasional Pesantren Gontor pada tahun 1982 telah menyerap tidak kurang dari 350 orang tenaga kerja yang berasal dari desa sekitar, serta menumbuhkan banyak sekali usaha makanan ringan/ jajanan, dan transportasi local), serta (d) berperan sebagai agen pembaruan dan pembangunan desa.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pedesaan telah dilakukan oleh banyak pesantren dengan berbagai cara yang tentu sesuai dengan kondisi masyarakat. Pesantren An-Nuqayah, Guluk-guluk, Jawa Timur telah mengantarkan desanya menjadi desa swasembada beras pada tahun 1981, pesantrennya sendiri memperoleh Kalpataru pada tahun yang sama; setelah pesantren mendirikan Biro Pengembangan Masyarakat pada tahun 1979. Pesantren contoh berikutnya adalah Pesantren Maslakul Huda di desa Kajen, Pati, Jawa Tengah: setelah dua orang santri seniornya mengikuti latihan tentang pembangunan masyarakat dan menularkan gagasan itu kepada seluruh elemen pesantren yang direspon secara positif, dan dibuktikan dengan membentuk Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat pada tahun 1980, berfungsi mengkoordinasikan program pengembangan kelompok swadaya masyarakat di 13 desa sekitar pesantren (Mudatsir, 1985). Usaha-usaha nyata yang telah dilakukan pesantren adalah penghijauan desa dengan pohon buah-buahan, penataan lingkungan, usaha bersama simpan pinjam, usaha kesehatan masyarakat, dan program teknologi tepat guna. Kuntowijoyo (1988) menyatakan, contoh Pesantren Maslakul

Huda menunjukkan, jika ada sentuhan dari luar, pesantren bersikap positif terhadap pembangunan desa dan sanggup menjadi perantara yang baik dalam penyebaran gagasan ke masyarakat bawah. Keterbukaan pesantren terhadap dunia luar tentu tergantung dari kepribadian pengasuhnya dan pendekatan dari dunia luar ke pesantren.

Dalam bidang ekonomi, salah satu contoh yang tepat adalah Pesantren Darul Falah, Ciampea, Bogor; yang lahir tahun 1960 di atas tanah 20,5 hektar, dengan badan hukum yayasan. Sejak mula, pesantren memang telah memberi pelajaran campuran antara ilmu agama, pengetahuan umum, ilmu-ilmu pertanian, peternakan, perikanan, pascapanen, teknik irigasi, dan teknologi tepat guna, teknik bangunan dan mesin. Sebagai pesantren yang tidak memiliki akar tradisi di desa, Darul Falah tidak berkembang menjadi *enclave* di tengah desa, dibuktikan kegiatan pendidikan non formal (kursus, pelatihan dan penyuluhan) yang dikelola bersama masyarakat sekitar, mengembangkan kelompok - kelompok masyarakat, ikutserta memperbaiki prasarana desa, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi pedagang perantara dan konsumen dari produksi pertanian yang dihasilkan pesantren (Widodo, 1982). Sebagai lembaga ekonomi, koperasi juga menjadi wadah dan ajang pembelajaran penting di pesantren Darul Falah dan banyak pesantren untuk melayani keperluan mereka sendiri dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pesantren juga memberi perhatian tinggi terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu contoh baik adalah Pesantren An-Nuqayah yang terletak di daerah sulit air (waktu itu) di Madura, telah membangun pompa hidran dan pompa tali untuk mengalirkan air yang berasal dari bukit-bukit melalui pipa sehingga bisa menyediakan air untuk 15 desa sekitar. Atas prestasi tersebut, Pesantren An-Nuqayah mendapat

Kalpataru untuk penyelamatan lingkungan (Basyuni, 1985). Kalpataru sebagai penyelamat lingkungan tahun 1984 juga diperoleh Pondok Pesantren Hidayatullah, Gunung Tambak Kalimantan Timur. Pesantren Hidayatullah dibuka sejak tahun 1974 secara bertahap oleh para alumni Pesantren Gontor; dan melalui rangkaian pengajiannya sang kiai mampu meyakinkan masyarakat sekitar tentang pentingnya pembangunan desa mereka. Bersama masyarakat desa sekitar, pesantren telah membangun pemukiman penduduk, merubah rawa-rawa menjadi tambak ikan dan udang, membangun bendungan untuk mengalirkan air ke sawah-sawah masyarakat sehingga secara perlahan dapat merubah kebiasaan masyarakat dalam pertanian ber-pindah menjadi pertanian menetap. Sarana pendidikan yang sangat luas dan lengkap dibangun permanen yang mampu menampung santri lebih dari 6000 orang, termasuk anak-anak yatim dan penyandang cacat. Apa yang telah dilakukan Pesantren Hidayatullah adalah contoh spektakuler tentang *community development* lengkap berbasis ekologi untuk keadilan sosial (sebagaimana dilukiskan oleh Ife, 1995), yang semuanya dimulai hampir dari titik nol (Yacub, 1985).

Kemandirian Pesantren dan Pemikiran Pembangunan Pedesaan

Kuntowijoyo (1998) dan banyak pakar pembangunan pedesaan lainnya (antara lain, Korten, 1984; Norman, 1988; Soetrisno, 1995; Ife, 1995) menyatakan terdapat beberapa kecenderungan baru tentang pemikiran atau konsep pembangunan pedesaan, diantaranya ialah *people centered development*, *selfreliance*, *institution development*, *value boriented development*, dan *sustainable development*. Konsep *people centered development* dari David Korten (1984) adalah pendekatan pembangunan pedesaan yang memandang penting inisiatif kreatif masyarakat seba-

gai sumberdaya utama pembangunan, dan menekankan kesejahteraan material-spiritual masyarakat sebagai tujuan dari proses pembangunan. Pendekatan ini jelas sangat berbeda dengan pendekatan *production centered development* yang berusaha untuk lebih banyak mengejar pencapaian produksi yang melimpah produk-produk pangan dan sandang untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang meningkat pesat; tetapi pencapaian produksi itu seringkali dilakukan melalui cara yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip partisipasi, kesamaan dan kelestarian sumberdaya. Dari pengalaman empirik yang ada, pesantren tampaknya dapat didorong sebagai salah satu model pelaksanaan pembangunan pedesaan dengan konsep *people-centered development*.

Konsep *institution development* lebih menekankan pada pembangunan kelembagaan sosial sebagai norma pengatur dan akomodasi serta penggerak pembangunan pedesaan. Dalam konteks ini, pesantren sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial memiliki posisi strategis untuk dikembangkan sebagai kelembagaan sosial sebagai kontributor nilai sekaligus penggerak pembangunan pedesaan, mengingat potensi cakupan operasional dan pengaruhnya dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, pesantren mempunyai dan sekaligus dimiliki oleh lingkungan sosialnya. Sedangkan konsep *value oriented development* yang dekat dengan pemikiran Waberian tentang perlunya etika sosial dalam pembangunan. Pembangunan yang digerakkan berdasarkan dan berorientasi nilai adalah seluruh program dan aktivitas pembangunan yang lahir atas dorongan nilai atau yang mendapat pembenaran dari khazanah nilai yang hidup dalam masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama yang memiliki nilai-nilai luhur, antara lain: teosentris, sukarela dan mengabdikan, kearifan, kesederhanaan, kolektivitas, kebebasan yang terdorong, mandiri, serta mengapli-

kasikan ilmu pengetahuan (Mastuhu, 1989) tentu sangat potensial sebagai sumber nilai untuk menggerakkan pembangunan pedesaan. Asumsinya adalah, pembangunan yang mempertimbangkan nilai-nilai luhur tersebut akan lebih berakar di dalam masyarakat, jika dan hanya jika nilai-nilai itu hidup dan aplikatif di tengah masyarakat dan tidak terbatas hanya di dalam pesantren.

Konsep *self reliance* atau kemandirian masyarakat, kemungkinan adalah pemikiran yang sangat berkembang dewasa ini dalam pembangunan pedesaan. Kemandirian diartikan sebagai potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri, mewujudkan sumberdaya lokal, dan rakyat sebagai pelaku utama dan pengambil keputusan terbesar dari usaha-usaha pembangunan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki dan menepatkan nilai kemandirian dalam operasional serta menjalin hubungan struktural dan fungsional dengan masyarakat desa tentu memiliki kapasitas untuk mengembangkan kemandirian bagi dirinya sendiri dan (potensial) bagi masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Akhirnya, semua konsep pembangunan yang dijelaskan singkat di atas, sangat berhubungan dan dalam rangka mewujudkan konsep *sustainable development*, yang ditandai dengan adanya kemampuan (masyarakat dan gerak pembangunan itu sendiri) untuk mewujudkan sustainability atau keberlanjutan pembangunan. Pengembangan nilai dan sumberdaya lokal, ramah lingkungan ekologis kelembagaan sosial, dan berorientasi rakyat adalah upaya-upaya yang seharusnya terus dilakukan sehingga pembangunan mempunyai kemampuan untuk berlanjut atas dasar partisipasi masyarakatnya sendiri. Pesantren pada umumnya terbukti memiliki tingkat keberlanjutan operasional yang sangat tinggi dan banyak menghasilkan lulusan yang juga mempunyai jiwa kemandirian dan kewirausahaan yang kuat untuk mengembangkan potensi dirinya di tengah masya-

rakat. Dengan demikian, pesantren dapat dikatakan potensial dalam hal sebagai penggerak pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

Memang tidak semua pesantren terlibat dalam pembangunan pedesaan. Pesantren-pesantren *salafi* yang tradisional kebanyakan tidak memiliki cukup sumberdaya manusia dalam usaha mereka berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan. Namun, kontribusi mereka tentu saja sangat besar dalam pendidikan masyarakat secara spiritual, moral dan kultural. Pesantren Modern Gontor juga tidak banyak terlibat dalam pembangunan desa, dengan alasan ingin menghasilkan lulusan yang potensial tumbuh berkembang menjadi ulama, dan bukan untuk menghasilkan petani-wirausaha muslim. Namun, menurut Kuntowijoyo (1988) sekarang ada kecenderungan besar di banyak pesantren untuk menambahkan pengetahuan dan keterampilan santri tentang bagaimana hidup secara lebih mandiri di tengah masyarakat. Dengan sentuhan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang berada di luar sistem pesantren, yang telah banyak menjalankan dan mewujudkan pemikiran mutakhir pembangunan pedesaan, maka pesantren diharapkan akan dapat pula ikut menggerakkan dan mewujudkan pembangunan pedesaan berdasarkan pemikiran mutakhir yang berkembang tersebut. Lebih penting lagi, pesantren diharapkan dapat memberikan makna yang lebih mendalam terhadap pembangunan pedesaan dengan meletakkan gerak pembangunan itu di dalam kerangka pemikiran masyarakatnya.

Membaca kemandirian dan basis massa pesantren, van Bruinessen yang dikutip oleh Wahid (1999) percaya, di dalam tubuh pesantren terkandung potensi penting untuk mewujudkan *civil society* sebagai pilar penting demokrasi di Indonesia. Lebih jauh, Wahid menegaskan pesantren telah mengalami banyak perubahan yang sangat fundamental,

tetapi perubahan itu dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sangat rumit dan tersimpan; dan arena watak otentiknya yang cenderung menolak pemusatan/sentralisasi pemerintahan, bahkan pesantren adalah komunitas yang sangat terdesentralisasi dan berposisi di tengah masyarakat pedesaan, maka pesantren sangat dapat diharapkan memainkan peran signifikan dan efektif dalam pemberdayaan dan transformasi masyarakat. Catatan-catatan pembangunan yang hanya dijadikan proyek dan bisnis dengan wajah kapitalis-birokrat yang dilingkari semangat nepotisme yang sangat kuat, telah menjadikan praktek-praktek penyimpangan ekonomi-politik menjadi tidak terkendali lagi. Sehingga pembangunan hanya menguntungkan kelompok kecil elit ekonomi-politik dan kalangan lain yang turut menghamba kepada penyimpangan pembangunan tersebut. Sementara itu sebagian besar kelompok masyarakat menjadi terbelakang, miskin, marjinal dan tidak memiliki akses terhadap sumberdaya untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi-politik yang produktif dan mencukupi. Pada golongan masyarakat termarginalkan inilah sesungguhnya terletak wilayah penghidmatan bagi pesantren melakukan kerja-kerja pemberdayaan dan kemudian transformasi masyarakat (yang dilengkapi dengan nilai-nilai luhur pesantren) secara lebih luas.

Jika kesempatan sejarah ini tidak diambil dan diperankan secara tepat, proporsional dan efektif, maka diduga akan muncul etatisme dan elitisme gaya baru di tengah-tengah masyarakat bangsa ini. (mungkin dewasa ini tahun 2011 gejala tersebut semakin nyata adanya). Atau memang harus berlaku apa yang menjadi pandangan Kuntowijoyo (1998) yang menyatakan, peranan pesantren tentu bukan tanpa batas; sepanjang menyangkut pembangunan dengan konteks pedesaan, agraris, dan teknologi sederhana, maka pesantren merupakan

tempat persemaian yang baik. Santri dan lembaga pesantren sendiri merupakan agen yang sesuai dengan tingkat kemajuan seperti itu.

Kesimpulan

Pesantren telah melakukan kerja-kerja pengembangan masyarakat dan pembangunan pedesaan, namun yang telah ada sekarang itu, hendaknya jangan dijadikan model yang terlalu ideal apalagi menjadi mitos tanpa uji coba atau pembelajaran lokal lebih dahulu, jika akan diduplikasi lebih luas, karena pembangunan menuju masyarakat industri memerlukan lembaga yang lebih memadai. Pikiran dan konsep sederhana dan “kecil itu indah” harus diimbangi dengan pikiran dan konsep yang tinggi, besar dan sistematis. Catatan ini justru menekankan pentingnya peran pesantren dalam pembangunan masyarakat pedesaan, dan bukan sebaliknya, melalui lembaga-lembaga pengabdian masyarakat yang khusus dibentuk untuk itu, dengan mampu mengikuti perkembangan pemikiran mutakhir tentang pembangunan pedesaan. Demikian !

Daftar Pustaka

- Basyuni, Ison. 1985. Da'wah bil Hal Gaya Pesantren. dalam M. D. Rahardjo (editor). *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah*. Jakarta: LP3ES.
- De Guzman, Pablo. 1989. *People Participation : A Stimulus for Effecting and Sustaining Improvements in Famers Communities*. Laguna, Philipina: Peper Presented in the 22nd Regional Training on DSPC, SE-ARCA.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1985. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Hadimulyo. 1985. Dua Pesantren, Dua Wajah Budaya. dalam M. D. Rahardjo (editor). *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah*. Jakarta: LP3ES.
- Hidayat, Komaruddin. 1985. *Pesantren dan Elit Desa*. dalam M. D. Rahardjo (editor). *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah*. Jakarta: LP3ES.
- Ife, Jim. 1985. *Community Development : Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice*. Melbourn: Longman Australia Pty Ltd.
- Kartodirdjo, Sartono. 1978. *Pro-test Movement in Rural Java*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Kuntowijoyo. 1998. Peranan Pesantren dalam Pembangunan Desa : Potret Sebuah Dinamika. Dalam Kuntowijoyo. *Paradigma Islam Intepretasi untuk Aksi*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Madjid, Abdul. T. 1990. *Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Ket-rampilan Pertanian*. Bogor: Thesis Pasca sarjana IPB.
- Mudatsir, Arief. 1985. Kajen Desa Pesantren. dalam M. D. Rahardjo (editor). *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*. Jakarta: LP3ES.
- Munajat, Imam. 1991. *Peranan Pesantren dalam Pembangunan Pedesaan*. Thesis Pasca sarjana. Bogor: IPB.
- Mastuhu. 1989. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Bogor: Disertasi FPS IPB.
- Pesantren: *Membangun dari Bawah*. Jakarta: LP3ES.
- Prasojo, Soedjoko, et all. 1982. “Profil Pesantren: Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al-Falah dan Delapan Pesantren lainnya di Bogor”. Jakarta: LP3ES.
- Sahidu, Arifuddin. 1998. *Partisipasi Masyarakat Tani Pengguna Lahan Sawah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Disertasi PPS Bogor:IPB.

- Shaifullah, Ali. H. A. 1982. Darussalam, Pondok Pesantren Gontor. Dalam M. D. Rahardjo (editor). *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*. Jakarta: LP3ES.
- Soetrisno, Loeman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Uphoff, Norman. 1988. *Partisipasi*. Dalam Michael M Cernea (editor). Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Van Dusseldorp, D. B. W, M. 1981. *Participation in Planned Development Influenced by Government of Developing Countries at Local Level in Rural Areas*. UnPublished.
- Wahid, Abdurrahman. 1999. *Pesantren di lautan Pembangunanisme: Mencari Kinerja Pemberdayaan*. dalam M. Wahid, Suwendi, dan S. Zuhri. *Pesantren Masa Depan*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Widodo, Saleh. M. 1982. *Pesantren Darul Falah: Eksperimen Pesantren Pertanian*. dalam M. D. Rahardjo (editor). *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*. Jakarta: LP3ES.
- Yakub, H. M. 1985. *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Penerbit Angkas

PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN AKSES TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO : KASUS YAYASAN PERAMU BOGOR

Nunung Nuryartono, Miftahul Mashury, Sigit Yusdianto,
Nuning Kusumowardhani, Triana Anggraenie

Abstract: *Poverty as one of important issues in overall economic development requires continuous responses from all stakeholders. There are many poverty alleviation programs that have been designed and carried out by various institutions such as government institutions and non-governmental organizations. Ikhtiar Program is an NGO poverty alleviation program that providing access to financial services for the poor and this program shows significant results. There are differences in the changes of well-being levels as measured by poverty indicators among households of Ikhtiar Program members and control households that do not follow the program. The poverty rate of Ikhtiar Program households tends to decrease and so as the gap between the poor households. A variety of productive activities run by poor households financed through financing schemes designed by Ikhtiar program. Some features from Ikhtiar Program can be replicated to reach the poor in accessing financial services.*

Kata Kunci : kemiskinan, program, keuangan

PENDAHULUAN

Salah satu fokus penting dalam konteks pembangunan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, pembangunan ekonomi Indonesia masih menyisakan persoalan kemiskinan yang hingga kini masih memerlukan upaya serius dari berbagai kalangan. Secara global fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan secara eksplisit menjadi tujuan dari adanya kesepakatan *Millinium Development Goals* yang berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin dunia pada tahun 2015 menjadi setengahnya.

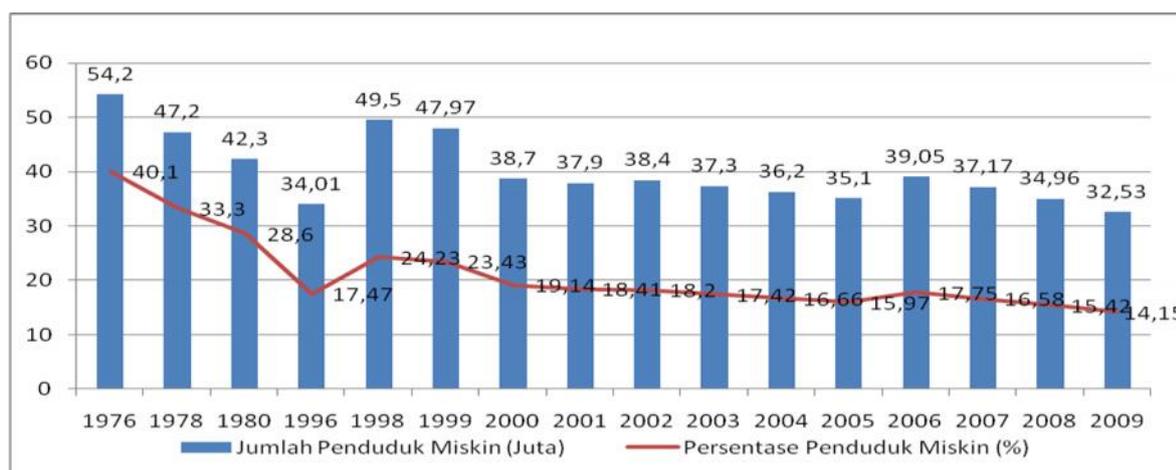
Berdasarkan data penduduk miskin di Indonesia sebagaimana yang tersaji pada Grafik 1 terlihat bahwa sampai dengan tahun 2009, jumlah penduduk miskin masih tercatat sebesar 14.15

persen. Dari jumlah tersebut mayoritas berada di wilayah pedesaan. Berbagai upaya juga telah dicoba untuk dilakukan terkait dengan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Salah satu hal yang ditengarai masih lambannya upaya pengentasan ke-miskinan adalah adanya ketimpangan yang cukup tinggi dalam berbagai hal termasuk di dalamnya akses terhadap kapital.

Akses rumahtangga terhadap jasa lembaga keuangan memiliki peran yang besar terhadap pengembangan ekonomi daerah, karena dengan mempermudah akses perbankan maka rumahtangga yang notabene tidak memiliki cukup modal dapat mengoptimalkan penghasilan mereka dengan investasi dan atau dengan modal kerja.

Nunung Nuryartono adalah Dosen Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor,
Miftahul Mashury adalah Alumni Ilmu Ekonomi IPB

Sigit yusdianto, Nuning Kusumowardhani dan Triana Anggraeni, adalah peneliti di Inter CAFE



Gambar 1. Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1976-2009

Sumber : BPS (berbagai tahun penerbitan)

Selain dapat mengembangkan ekonomi daerah, dengan mempermudah akses rumahtangga miskin terhadap kredit perbankan juga dapat menjadi salah satu instrumen yang tepat dalam pengurangan angka kemiskinan Indonesia khususnya dalam jangka panjang, dan akhirnya dapat menopang perekonomian secara makro.

PERMASALAHAN

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terpenting di Indonesia, kawasan ini memiliki tingkat pertumbuhan yang diindikasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar darga berlaku terbesar ketiga setelah Jakarta dan Jawa Timur, dengan PDRB sebesar 389.244.653,84 pada tahun 2004 dan terus meningkat sampai 602.420.555,35 pada tahun 2009 (BPS, 2009). Jumlah penduduk Jawa Barat hingga akhir tahun 2007 mencapai 41.483.729 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,83 persen dan tingkat kepadatan penduduk 1.157 jiwa/km. Lebih dari itu, provinsi Jawa Barat secara geografis lebih dekat dengan Ibu kota Indonesia yaitu DKI Jakarta, sehingga Jawa Barat disebut juga dengan kawasan *Hinterland* atau

daerah penyangga Jakarta. Ini mengindikasikan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan nasional secara makro.

Kota Bogor merupakan salah satu daerah penyambung antara Jawa Barat dan DKI Jakarta, pendapatan daerah Bogor mengalami peningkatan berkala pada periode 2001-2007. Pada tahun 2001, total pendapatan daerah yang diperoleh Kota Bogor sebesar 232.806,15 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga sebesar 707.545,38 juta rupiah pada tahun 2007. Dengan demikian, jika dilihat dari data ini dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi Kota Bogor mengalami perkembangan yang cukup baik. Tetapi jika ditinjau dari aspek pola penanganan kemiskinan di Kota Bogor, pertumbuhan ekonomi yang ada belum dapat berpengaruh secara signifikan pada perbaikan kehidupan sosial masyarakatnya, terutama persoalan kemiskinan.

Menurut BPS (2007) jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor pada tahun 2005 mencapai 476,7 ribu jiwa atau sebanyak 12,5 persen.

Tabel 1. Total Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2001-2007

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2001	232.806,15	
2002	289.468,15	24,34
2003	363.218,33	25,48
2004	398.659,59	9,76
2005	447.504,94	12,25
2006	589.273,20	31,68
2007	707.545,38	20,07

Sumber : BPS Kota Bogor, 2001-2007 (diolah).

Jumlah penduduk miskin tersebut kemudian meningkat menjadi 536,4 ribu jiwa atau sebanyak 13,83 persen pada tahun 2006. Tingginya angka kemiskinan di kabupaten Bogor pada tahun 2005 dan 2006 ini menempatkan kabupaten Bogor pada urutan kedua sebagai kota/kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di provinsi Jawa Barat.

Dalam beberapa tahun terakhir, di Bogor tumbuh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam penanggulangan kemiskinan ini. Salah satu yayasan yang *concern* terhadap pemberdayaan masyarakat ini adalah Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Mustadh'afin (Peramu), dengan membentuk Baytul Maal (BM) Bogor Yayasan Peramu berupaya melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dengan memanfaatkan dana Zakat, Infak, dan Shadakah (ZIS) melalui Program Ikhtiar. Program Ikhtiar merupakan program pendayagunaan dana ZIS berbasis pemberdayaan ko-munitas yang dilakukan melalui pelayanan keuangan mikro. Sasaran program ini adalah kaum perempuan dari keluarga yang berpenghasilan rendah tetapi masih memiliki potensi ekonomi produktif.

Program Ikhtiar terus mengalami peningkatan yang cukup pesat, baik dari sisi jumlah anggota maupun jumlah dana ZIS yang dikelola. Sejak pertama kali dijalankan pada tahun 1999, dana ZIS yang disalurkan kepada masyarakat

hingga tahun 2008 mencapai Rp 7,4 milyar, sedangkan anggota yang menggunakan dana tersebut berjumlah 5.115 orang (Baytul Maal Bogor, 2007). Dari keterangan tersebut dapat diketahui strategisnya peran Program Ikhtiar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kawasan Bogor, maka dari itu kajian guna meng-identifikasikan dan menganalisis pelaksanaan program Ikhtiar penting untuk dilakukan.

Penelitian Program Ikhtiar tidak hanya menarik karena program ini telah berumur 10 tahun lebih dan memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan *mustahiq* (masyarakat miskin), tetapi juga melibatkan dana zakat yang disalurkan secara produktif dalam melakukan pemberdayaan fakir dan miskin, yang merupakan bagian dari 8 *ashnaf* yang berhak menerima zakat. Dengan demikian secara garis besar penelitian ini ditujukan untuk melihat dan membuktikan bahwa program Ikhtiar memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya membantu pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah Kota Bogor dan sekitarnya.

METODOLOGI

Pada penelitian ini, data yang digunakan dalam bentuk data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara responden, responden yang diambil adalah anggota yang telah melakukan pengajuan dana

melalui Program Ikhtiar dan sebagai kontrol diwawancara rumah-tangga yang tidak mengikuti program. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Pemerintah Desa Sukadamai dan Desa Ciaruteun Ilir, Koperasi Baytul Ikhtiar, serta literatur-literatur lainnya seperti buku, jurnal, artikel maupun informasi lain.

Kemiskinan merupakan masalah fundamental yang banyak dialami oleh negara-negara berkembang. Berbagai macam cara telah digunakan baik oleh pemerintah sebagai (*policy maker*) maupun pihak swasta atau LSM untuk menanggulangi masalah kemiskinan tersebut. Salah satu program Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Mustadh'afin (Peramu) terkait masalah ini adalah dengan membuat dan menjalankan Program Ikhtiar. Pada penelitian ini, akan dibahas lebih dalam bagaimana pengaruh Program Ikhtiar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin (*mustahiq*). Menurut Sen dalam Sowwan (2008), perhitungan ukuran kemiskinan yang baik harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

- a) Aksioma fokus (*focus axiom*), yang menyatakan bahwa ukuran kemiskinan harus mengabaikan informasi yang berhubungan dengan pendapatan individu yang tidak miskin. Dengan kata lain, aksioma fokus melihat/mengukur tingkat kemiskinan tidak dengan membandingkan tingkat pendapatan orang miskin dengan orang yang memiliki pendapatan yang berkategori tidak miskin.
- b) Aksioma kesamaan (*monotonicity axiom*), menyatakan bahwa sebuah ukuran kemiskinan akan meningkat ketika pendapatan individu miskin menurun, begitu juga sebaliknya. Pada aksioma ini, di-ukur tingkat kemiskinan dengan cara melihat korelasi antara indeks dengan jarak orang miskin terhadap garis kemiskinan.

- c) Aksioma transfer (*transfer axiom*), menyatakan bahwa keparahan kemiskinan dapat dilihat dari tingkat pendistribusian pendapatan antara mereka. Jika tingkat pendistribusian tidak merata atau timpang, maka tingkat keparahan kamiskinan dikatakan tinggi, dan sebaliknya.

Untuk mengetahui berapa besar tingkat aksioma tersebut, dalam penelitian ini akan digunakan *FGT Index* (Foster, Greer and Thorbecke, 1984). Indikator yang diukur adalah *headcount ratio*, *poverty depth index*, dan *severity index*. Rumus dasar *FGT Index* adalah sebagai berikut :

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha \dots \dots \dots (1)$$

Karena $\alpha = 0$, maka persamaan berubah menjadi :

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0 \dots \dots \dots (2)$$

$$P_0 = H = \frac{1}{n} q = \frac{q}{n} \dots \dots \dots (3)$$

Dimana: H = *headcount ratio*
 q = jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan
 n = jumlah observasi

Penggunaan *headcount ratio* pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jumlah orang miskin yang dapat dikurangi melalui pendayagunaan dana zakat melalui Program Ikhtiar. Semakin kecil nilai *headcount ratio* menggambarkan bahwa jumlah rakyat miskin semakin sedikit. Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan *head-count ratio* telah memenuhi aksioma fokus, namun informasi kemiskinan yang diberikan masih sangat terbatas karena tidak bisa memberikan informasi seberapa miskin orang miskin yang diteliti (aksioma

kesamaan), serta dengan *headcount ratio* belum bisa mengidentifikasi aspek distribusi pendapatan diantara masyarakat miskin (aksioma transfer), maka dari itu diperlukan analisis *poverty depth index* (indeks kedalaman kemiskinan) yang menunjukkan aksioma kesamaan dan *severity index* (indeks keparahan kemiskinan) yang menunjukkan aksioma transfer, untuk bisa menutupi kekurangan pada alat analisis *headcount ratio*.

POVERTY DEPTH INDEX (INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN)

Poverty Depth Index merupakan alat analisis yang dapat menunjukkan kedalaman kemiskinan, maksudnya dengan *poverty depth index* dapat menunjukkan seberapa besar kesenjangan/selisih pendapatan orang miskin dengan standar garis kemiskinan, sehingga dapat digambarkan seberapa miskin orang miskin yang diobservasi. Sama seperti *headcount ratio*, semakin kecil nilai *Poverty Depth Index* semakin kecil pula jarak antara pendapatan orang miskin tersebut dengan garis kemiskinan. Dengan kata lain, jika nilai indeks ini kecil, maka keadaan orang miskin yang diobservasi kondisi pendapatannya lebih baik. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan bagian dari pengukuran *FGT Index* ketika $\alpha = 1$. Jadi, sama seperti halnya *headcount*, persamaan yang dibuat merupakan turunan dari formula *FGT Index* :

$$P1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^1 \dots \dots \dots (4)$$

karena nilai $\alpha = 1$, maka persamaannya menjadi :

$$P1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^1 \dots \dots \dots (5)$$

Dimana : P1 = indeks kedalaman kemiskinan

- n = jumlah observasi
- q = jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan
- z = garis kemiskinan
- yi = pendapatan orang miskin ke-i

Analisis kemiskinan dengan model ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kedalaman kemiskinan objek yang diobservasi serta dapat diketahui pula aksioma fokus dan kesamaan. Tetapi dengan alat analisis ini belum dapat memenuhi aksioma transfer, maka dari itu diperlukan alat analisis lain yaitu indeks keparahan kemiskinan (*severity index*) agar dapat memenuhi aksioma transfer tersebut.

SEVERITY INDEX (INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN)

Severity index merupakan alat analisis yang dapat menggambarkan ketimpangan yang terjadi antara orang miskin yang diobservasi. Sama seperti kedua alat analisis lainnya, semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, semakin kecil juga ketimpangan pendapatan yang terjadi. Dengan kata lain, distribusi pendapatan antara mereka dapat dikatakan merata. Indeks keparahan kemiskinan merupakan bagian dari *FGT Index* ketika $\alpha = 2$, maka formula dapat ditulis dengan turunan persamaan *FGT Index*, yaitu :

$$P2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^2 \dots \dots \dots (6)$$

Karena nilai $\alpha = 2$, maka persamaannya menjadi :

$$P2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^2 \dots \dots \dots (7)$$

Dimana: P2 = Indeks keparahan kemiskinan

- n = jumlah observasi
- q = jumlah orang yang ada dibawah garis kemiskinan
- z = garis kemiskinan
- yi = pendapatan orang miskin ke-i

Indeks keparahan kemiskinan ini digunakan untuk memenuhi tidak hanya aksioma fokus dan aksioma persamaan saja, tetapi juga dapat memenuhi aksioma transfer. Sehingga alat analisis ini dapat dikatakan lebih konprehensif dibandingkan dengan *headcount ratio* dan *poverty depth index*.

PENENTU RUMAH TANGGA BERPARTISIPASI DALAM PROGRAM IKHTIAR

Dalam menganalisis faktor-faktor yang menjadi penentu rumahtangga dalam mengakses lembaga keuangan semiformal, dalam hal ini Program Ikhtiar digunakan metode analisis deskriptif maupun statistik. Analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan data-data yang didapatkan terkait dengan penyebab kendala akses rumah-tangga terhadap Program Ikhtiar. Sementara itu, analisis statistik digunakan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang sebenarnya menjadi penyebab dari kendala rumahtangga dalam mengakses program tersebut.

Gujarati (2004) mengatakan bahwa untuk menduga faktor-faktor yang menjadi penyebab kendala akses rumahtangga terhadap Program Ikhtiar dianalisis dengan menggunakan model regresi logit yang dapat ditulis dengan persamaan berikut:

$$P_i = E(Y = 1 | X_i) = \beta_1 + \beta_2 X_i \dots\dots\dots(8)$$

Dimana X_i adalah variabel yang diduga mempengaruhi akses rumahtangga terhadap pinjaman Program Ikhtiar dan $Y = 1$ adalah rumahtangga yang dapat menjangkau Program Ikhtiar. Persamaan diatas dapat ditulis dengan persamaan berikut :

$$P_i = E(Y = 1 | X_i) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_1 + \beta_2 X_i)}} \dots\dots\dots(9)$$

Untuk lebih mudah, persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}} = \frac{e^{Z_i}}{1 + e^{Z_i}} \dots\dots\dots(10)$$

Dengan $Z_i = \beta_1 + \beta_2 X_i$

Jika P_i adalah rumahtangga yang dapat mengakses Program Ikhtiar, maka $(1 - P_i)$ dapat diketahui melau persamaan berikut:

$$1 - P_i = \frac{1}{1 + e^{Z_i}} \dots\dots\dots(11)$$

dimana:

- P_i = Proses peminjaman Kredit
- $P_i = 1$, jika dapat mengakses Program Ikhtiar
- $P_i = 0$, jika tidak dapat mengakses Program Ikhtiar
- X_1 = Status Pernikahan
- X_2 = Pendidikan
- X_3 = Tingkat Usia
- X_4 = Tingkat usia (kuadrat)
- X_5 = Jumlah Tanggungan
- X_6 = Jumlah Pengeluaran per bulan
- X_7 = Jenis Pekerjaan
- X_8 = Pekerjaan Pasangan

Hubungan antara peubah bebas dan peubah tidak bebas dalam *logistic regression model* dapat dilihat oleh *odds ratio*. Nilai *odds ratio* menunjukkan perbandingan peluang $P_i=1$ dan $P_i=0$. Nilai ini didapat dari perhitungan eksponensial dari koefisien estimasi (β) atau $\exp(\beta)$.

PERBANDINGAN FGT INDEKS

Hasil pengolahan data merupakan perbandingan pendapatan masing-masing rumahtangga sebelum dan sesudah mereka mengikuti program. *Headcount ratio* (H), *poverty depth index* (P1) dan *severity index* (P2) merupakan alat analisis yang digunakan dalam mengidentifikasi hal tersebut.

Tabel 2. Indeks Kemiskinan Rumah tangga Miskin Sebelum dan Setelah Program Ikhtiar

Indikator kemiskinan	Sebelum Program Ikhtiar	Setelah Program Ikhtiar
H	0,9167	0,7667
P1	0,3579	0,2393
P2	0,1776	0,1036

a. Headcount Ratio (H)

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa setelah mengikuti Program Ikhtiar, *headcount ratio* (H) atau jumlah orang miskin sebagai persentase dari populasi yang diobservasi mengalami penurunan dari 0,92 menjadi 0,77. Dengan kata lain, jumlah rumahtangga yang masuk kategori miskin berkurang dari 92 persen menjadi 77 persen setelah mengikuti Program Ikhtiar. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan pada pendapatan rumahtangga miskin setelah mengikuti program tersebut. Dari hasil penelitian, dari 60 responden anggota Program Ikhtiar terdapat 55 orang yang masuk kategori rumahtangga miskin, namun setelah mengikuti program Ikhtiar jumlahnya berkurang menjadi 46 orang.

Namun jika diteliti lebih dalam, perubahan pendapatan rumahtangga miskin anggota Program Ikhtiar tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan oleh masih adanya pinjaman yang digunakan untuk non-modal usaha, terdapat banyak rumahtangga yang meminjam dana dari program untuk keperluan sehari-hari seperti kebutuhan pangan, selain itu pinjaman banyak juga digunakan untuk merenovasi rumah peminjam. Dari data yang diperoleh, dari 60 responden terdapat 28 orang yang mengalokasikan sebagian pinjamannya untuk keperluan renovasi rumah, dan sebanyak 16 orang yang mengalokasikan sebagian pinjamannya untuk kebutuhan pangan dan kesehatan. Selain digunakan untuk renovasi rumah dan kebutuhan pangan, ada beberapa

responden anggota program yang mengalokasikan pinjamannya untuk biaya pendidikan keluarga.

Pinjaman program dalam bentuk biaya pendidikan ini tidak dapat dihitung dampak dan pengaruhnya dalam jangka pendek, karena biaya pendidikan merupakan salah satu bagian dari investasi jangka panjang. Maka dari itu, pinjaman rumahtangga miskin anggota Program Ikhtiar dalam bentuk pinjaman biaya pendidikan tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap perubahan pendapatan anggota program dalam jangka pendek, namun dampaknya akan lebih terasa dalam jangka panjang.

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Alat analisis kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks kedalaman kemiskinan (*depth poverty index*). Dengan alat analisis ini dapat diketahui pengaruh pinjaman Program Ikhtiar terhadap perubahan rata-rata pendapatan rumahtangga miskin pada garis kemiskinan. Jika terjadi penurunan, angka indeks, berarti pendapatan rata-rata rumahtangga miskin cenderung mendekati standar garis kemiskinan. Sebaliknya, jika terjadi peningkatan pada indeks kedalaman kemiskinan maka itu berarti tingkat pendapatan rata-rata rumahtangga miskin yang mengikuti program semakin menjauh dari standar garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan dalam penelitian ini mengalami penurunan dari 0,36 menjadi 0,24.

Ini menunjukkan bahwa dengan adanya pinjaman Program Ikhtiar, pendapatan rata-rata rumahtangga miski

cenderung meningkat mendekati garis kemiskinan. Dengan kata lain, kesenjangan yang terjadi antara pendapatan rata-rata rumahtangga miskin dengan garis kemiskinan cenderung lebih kecil dibandingkan sebelumnya.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, nilai rata-rata pendapatan rumahtangga miskin secara keseluruhan pada awalnya sebanyak Rp. 639521,2 meningkat menjadi Rp. 721638,9 setelah mengikuti Program Ikhtiar. Jika dilihat dari persentase perubahan pendapatan rata-rata rumahtangga miskin, peningkatan pendapatan rata-rata rumahtangga miskin yang terjadi setelah mengikuti program Ikhtiar adalah sebesar 11,38 persen. Perubahan ini bisa lebih optimal jika alokasi dana yang diperoleh dari Program Ikhtiar digunakan seutuhnya untuk pembiayaan produktif.

c. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa indeks keparahan kemiskinan (*severity index*) menurun dari 0,18 menjadi 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan antar rumahtangga miskin lebih merata dibandingkan sebelum mereka mengikuti Program Ikhtiar. Sehingga, dengan adanya distribusi pinjaman yang lebih merata menyebabkan lebih meratanya pendistribusian pendapatan diantara anggota.

Membaiknya tingkat pendistribusian pendapatan ini disebabkan oleh terbukanya akses rumahtangga miskin terhadap lembaga keuangan dalam

hal ini adalah Program Ikhtiar. Jangkauan program ini lebih baik jika dibandingkan dengan lembaga keuangan baik formal maupun informal, ini terbukti dengan adanya fasilitas peminjaman di kawasan yang sulit akses transportasi bahkan kendaraan roda dua.

RUMAHTANGGA NON-ANGGOTA PROGRAM

Untuk mengetahui lebih akurat pengaruh Program Ikhtiar dalam merubah indikator kemiskinan rumahtangga miskin, dalam penelitian ini juga dilakukan analisis indikator kemiskinan terhadap responden pembandingan/kontrol (responden yang tidak mengikuti program ikhtiar). Analisis ini dilakukan guna mengetahui apakah penurunan ketiga indeks yang terjadi pada responden anggota program juga dialami oleh responden kontrol. Jika terjadi penurunan indikator pada responden kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pendapatan masyarakat desa penelitian mengalami peningkatan. Dengan kata lain, bukan hanya Program Ikhtiar saja yang menjadi penyebab meningkatnya pendapatan rumahtangga, tetapi ada faktor eksternal lain yang menjadi penentu utama perubahan indikator kemiskinan tersebut.

Hasil pengolahan data pendapatan rumahtangga kontrol yang dianalisis menggunakan FGT *Indeks* dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Indeks Kemiskinan Rumahtangga Miskin Kontrol

indikator kemiskinan	Sebelum Program Ikhtiar masuk desa	Setelah Program Ikhtiar masuk desa
H	1	1
P1	0,474	0,472
P2	0,261	0,264

a. Headcount Ratio (H)

Dari hasil pengolahan data responden kontrol, kondisi *headcount ratio* tidak mengalami perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa keadaan ekonomi rumahtangga miskin yang tidak mengikuti Program Ikhtiar tidak berubah, pendapatan mereka tetap berada di bawah standar garis kemiskinan. Tingkat pendapatan yang relatif sama antara dua periode ini disebabkan oleh tidak adanya perubahan jenis mata pencaharian mereka selama dua periode tersebut sehingga pendapatan pun tidak berubah. Sebagian responden yang bekerja dalam sektor perdagangan pun tidak berubah pendapatannya karena tidak punya cukup modal untuk mengembangkan modal usaha.

Pada responden kontrol, jumlah rumahtangga yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan tidak berubah jika dihitung dari awal periode Program Ikhtiar masuk desa sampai saat ini, sama-sama berjumlah 60 orang.

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Berbeda dengan *headcount ratio*, indeks kedalaman kemiskinan pada responden kontrol mengalami penurunan yaitu dari yang semula sebesar 0,474 berubah menjadi 0,472, namun perubahan yang terjadi sangat kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pendapatan rata-rata rumahtangga non-anggota sehingga pendapatan rata-rata rumahtangga mereka mendekati angka garis kemiskinan, namun perubahan pendapatan rata-rata rumahtangga relatif kecil jika dibandingkan dengan rumahtangga anggota. Dari hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa secara umum pendapatan rata-rata masyarakat Desa Sukadamai dan Desa Ciaruteun Ilir baik anggota program maupun non-anggota

mengalami peningkatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada faktor eksternal selain Program Ikhtiar yang menjadi penyebab kenaikan pendapatan rata-rata tersebut.

Meski demikian, penurunan indeks kedalaman kemiskinan anggota program lebih besar dibandingkan dengan indeks non-anggota. Ini berarti dengan mengikuti Program Ikhtiar pendapatan rata-rata rumahtangga mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan rumahtangga yang tidak mengikuti program.

c. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Jika ditinjau dari indeks keparahan kemiskinan, terjadi kenaikan angka indeks dibandingkan dengan periode sebelum Program Ikhtiar masuk ke masing-masing desa, yaitu dari 0,2613 menjadi 0,2642. Peningkatan angka pada indeks ini menunjukkan terjadinya distribusi pendapatan rumahtangga miskin yang tidak mengikuti Program Ikhtiar, berbanding terbalik dengan rumahtangga anggota yang nota bene distribusi pendapatannya lebih merata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran Program Ikhtiar cukup besar bagi distribusi pendapatan masyarakat Desa Sukadamai dan Desa Ciaruteun Ilir.

ANALISIS PARTISIPASI DALAM PROGRAM IKHTIAR

Analisis faktor-faktor penentu rumahtangga dalam berpartisipasi dan mengakses program Ikhtiar menjadi penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui karakteristik rumah tangga yang mengikuti sekaligus sebagai bagian proses kebijakan selanjutnya. Tabel 4 menunjukkan hasil selengkapnya dari analisis yang menggunakan model Logit.

Tabel 4. Hasil Analisis Logit Faktor Penentu Partisipasi Rumah Tangga dalam Program Ikhtiar.

Variabel		
<i>Dependent</i> : partisipasi program Peramu (Dummy variabel, 1 = berpartisipasi, 0 = tidak berpartisipasi)	Coeff	Odd ratio
<i>Independent variabel</i>		
Status pernikahan (dummy variabel, 1 = menikah, 0= lainnya)	1.556 (1.073)**	1.1
Pendidikan	-0.399 (0.442)	1.000
Jumlah tanggungan	0.087	1.053
Usia	-0.152 (0.118)**	.997
Usia ²	0.001 (0.001)	.999
Pekerjaan (dummy, 1= berdagang, 0 = lainnya)	0.263 (0.604)	1.797
Pekerjaan Pasangan (dummy, 1= berdagang, 0 = lainnya)	0.283 (0.572)	1.888
Pengeluaran	6.15 ⁻⁰⁶ (1.37 ⁻⁰⁶)*	1.1

Ket : angka dalam kurung adalah *standard error*

*, ** dan *** = nyata pada taraf nyata 1, 15 dan 20 persen

Terdapat beberapa variabel yang berpengaruh signifikan yang menjadi penentu dalam berpartisipasi program Ikhtiar.

Parameter penduga dummy status menikah memiliki hubungan positif terhadap akses terhadap Program Ikhtiar, parameter ini signifikan pada taraf nyata persen 15 persen. Nilai odds ratio pada parameter penduga dummy status pernikahan anggota adalah 1.000. artinya jika anggota program berstatus menikah maka peluang anggota dalam menjangkau Program Ikhtiar adalah 1.1 kali dari calon anggota yang memiliki status belum menikah atau janda. Dari hasil pengolahan data, dapat dijelaskan bahwa rumahtangga yang berstatus menikah memiliki peluang lebih besar mengakses pinjaman Program Ikhtiar dibandingkan rumahtangga yang berstatus janda. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa resiko pengembalian pinjaman rumah-tangga yang memiliki status menikah lebih kecil dibandingkan dengan para janda.

Parameter penduga kategori tingkat pendidikan memiliki hubungan negatif terhadap akses terhadap Program Ikhtiar, namun tidak signifikan. Pinja-

man program yang disalurkan kepada rumahtangga tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri, artinya peluang rumahtangga yang tingkat pendidikannya rendah dalam mengakses pinjaman sama dengan peluang rumahtangga yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi.

Parameter penduga tingkat usia memiliki hubungan negatif terhadap proses peminjaman Program Ikhtiar, signifikan pada taraf nyata persen 20 persen. Nilai odds ratio pada parameter penduga tingkat usia anggota adalah 0,997, artinya jika usia bertambah satu tahun maka peluang rumahtangga tersebut dalam menjangkau dan mengakses peminjaman Program Ikhtiar adalah berkurang 0,997 kali daripada peluang tidak dapat menjangkau program ini, atau dengan kata lain peluang untuk mengakses Program Ikhtiar lebih kecil. Hal ini tentunya berkaitan dengan usia produktif seseorang. Dengan usia yang masih produktif dan memiliki kegiatan usaha/ekonomi, maka yang bersangkutan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam mengembalikan dana yang dipinjam.

Sebagai variabel kontrol dalam usia, maka digunakan variabel usia yang dikalikan dengan variabel usia itu sendiri. Namun demikian variabel ini tidak nyata dalam rumah tangga mengikuti proram Ikhtiar

Parameter penduga selanjutnya adalah jumlah tanggungan namun tidak signifikan pada taraf nyata 10 persen. Sama halnya dengan tingkat pendidikan dan tingkat usia, peluang rumahtangga yang memiliki banyak tanggungan sama dengan rumahtangga yang hanya memiliki sedikit tanggungan.

Variabel penting sebagai proxy kesejahteraan adalah pengeluaran rumahtangga. Pengeluaran rumah-tangga memiliki pengaruh yang signifikan, dengan taraf nyata sebesar 1 persen. Rumah tangga yang relatif memiliki pengeluaran lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk dapat mengakses program Ikhtiar. Program Ikhtiar memang diarahkan untuk rumah tangga miskin, namun demikian tetap memiliki pendapatan dari usaha sendiri maupun bekerja di tempat lain.

Sementara itu variabel pekerjaan dari kepala rumahtangga dan pasangannya tidak memiliki pengaruh yang nyata dalam menentukan akses terhadap program Ikhtiar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa bagi calon rumahtangga yang akan berpartisipasi secara prinsip tidak akan ada proses *screening* berdasarkan pekerjaan yang ditekuni.

Diskusi dan Kesimpulan

Program Ikhtiar yang dijalankan oleh yayasan Peramu sebagai salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Mikro semi formal telah mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya membantu pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap permodalan dan juga jasa pelayanan keuangan. Secara lebih khusus hasil penelitian ini mengkonfirmasi hasil-hasil tersebut sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pada semua angka indikator kemiskinan rumah-tangga anggota Program Ikhtiar, baik itu pada *headcount ratio*, *poverty depth index*, dan *severity index*. Nilai *headcount ratio* yang cenderung turun menunjukkan terjadinya penurunan jumlah rumahtangga miskin yang berada di bawah standar garis kemiskinan, yaitu yang semula berjumlah 55 orang menjadi 46 orang. Demikian pula dengan *poverty depth index*, penurunan indeks ini menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan rata-rata rumahtangga miskin sehingga cenderung mendekati garis kemiskinan. Dan terakhir *severity index*, penurunan indeks menunjukkan adanya distribusi pendapatan antar rumahtangga miskin yang lebih merata dibandingkan sebelum mereka mengikuti Program Ikhtiar.
2. Pada responden kontrol, penurunan indikator kemiskinan hanya terjadi pada *poverty depth index*, sedangkan untuk *headcount ratio* tidak terjadi perubahan sama sekali, bahkan pada *severity index*, angka indeks kemiskinan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan rumahtangga yang tidak mengikuti Program Ikhtiar tidak mengalami perubahan yang berarti, bahkan distribusi pendapatan antar rumahtangga miskin cenderung lebih tidak merata.
3. Mekanisme dalam menjangkau calon anggota yang diterapkan di program Ikhtiar memiliki keunikan, proses *screening* dengan menerapkan pertemuan Majelis Minggon memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk mengikuti program

Ikhtiar. Hal ini secara tidak langsung terlihat dari hasil analisis faktor penentu rumahtangga mengikuti program Ikhtir Indikator kesejahteraan masih tetap diperlukan sebagai salah satu upaya untuk bisa menjadikan kepercayaan bahwa calon anggota memiliki penghasilan yang kemudian dapat digunakan sebagai bagian dari cicilan pinjaman.

Daftar Pustaka

- Antonio, M.S. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik. 2009. "Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 1996-2008". Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kota Bogor. 2008. "Total Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2001-2007". Bogor BPS Kota Bogor.
- Baswir, Revrison. 1997. "Agenda Ekonomi Kerakyatan". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baytul Maal Bogor. 2007. "Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pendekatan Agama (Studi Kasus Pengembangan Program Ikhtiar oleh Baytul Maal Bogor)". Bogor: *Warta Gubernur*, 2: 48-68.
- Chamber, Robert. 1983. *Rural Development*. London: Putting the last First, Longman.
- Dowla, Asif dan Barua, Dipal. 2006. *The Poor Always Pay Back*. Connecticut: Kumarian Press.
- Foster, J., J. Greer, dan E. Thorbecke. 1984. Notes and Comments: A Class of Decomposable Poverty Measure. *Econometrica*, 52 (3): 761-766.
- Gujarati, D. 2004. *Basic Econometrics, Fourth Edition*. McGraw Hill, New York.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Handayani, Ning. 2004. *Peran Dana Kukesra dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Kelompok Uppks di Desa Tawang Sari kecamatan Teras Kabupaten Boyolali*. Surakarta: Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah.
- Ismawan, Bambang. "Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonom Daerah". www.jurnalekonomirakyat.org.
- Ismawan, Bambang. *Peran Lembaga Keuangan Mikro. Journal of Indonesia Economy and Business*. Yogyakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 2003.
- Jhingan, M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kashmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat. 2000. *Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, M. 2008. *Grameen Bank dan Lembaga Keuangan Mikro*. [http://www.mudrajad.com/upload/Grameen bank%20&%20olemb%20kekeuang%20mikro.pdf](http://www.mudrajad.com/upload/Grameen%20bank%20&%20olemb%20kekeuang%20mikro.pdf) [1 Juni 2010]
- Maulana, Erwin. 2008. *Dampak Kredit Mikro terhadap Kemiskinan : Studi Kasus LPP UMKM Kabupaten Tangerang*. Jakarta :

- Program Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta. [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Meylani, Wina. 2009. *Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sadaqah Sebagai Modal Kerja Terhadap Indikator Kemiskinan dan Pendapatan Mustahiq* [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Nasution, et al. 2008. *Indonesia Zakat dan Development Report 2009*. Depok : CID.
- Nuryartono, Nunung. 2010. *Lembaga Keuangan Mikro : Solusi untuk Mengatasi Persoalan Pengangguran dan Kemiskinan*. Bogor: Unpublish.
- Pemerintah Desa Ciaruteun Iilir. 2010. *Laporan Monografi Desa Ciaruteun Iilir*. Bogor: Pemerintah Desa Ciaruteun Iilir.
- Pemerintah Desa Sukadamai. 2010. *Laporan Monografi Desa Sukadamai*. Bogor: Pemerintah Desa Sukadamai.
- Rahmawati, Irma. 2005. *Analisis Dampak Pendistribusian Zakat Melalui Kredit Terhadap Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa)* [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Solihin, Tasliman. 2005. *Evaluasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat : Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukajaya, Kota Depok Provinsi Jawa Barat* [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sowwan, M. 2008. *Pengaruh Infrastruktur terhadap Kemiskinan di Indonesia: Analisis Data Panel 1990-2004* [Skripsi]. Depok: Universitas Indonesia.
- Sugiyarto, Guntur. 2007. *Poverty Impact Analysis Selected tools and Application*. ADB Avenue. Philippines: Mandaluyong City.
- Sumarto, et al. 2007. *Predicting Household Poverty Status in Indonesia*. ADB Regional Technical Assistance No. 6073 Report. Unpublished. Manila: ADB.
- Tampubolon, Joyakin. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendekatan Kelompok : kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama* [Disertasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Yunus, Muhammad. 2007. *Bank Kaum Miskin*. Jakarta: Marjin Kiri.
- World Bank. 2000. *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. New York: Oxford University Press. Available: <http://www.worldbank.org/poverty/health/data/index.htm>.
- Zeller, M and Richard L. Meyer. 2002. *The Triangle of Microfinance "Financial Sustainability, Outreach, and Impact"*. John London: Hopkins University Press.

KONTRIBUSI PENDAPATAN USAHA TERNAK SAPI POTONG PADA PROGRAM SARJANA MEMBANGUN DESA (SMD) TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETERNAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pridma Gusti, Jafrinur, Nofialdi

Abstract: *This study aims to: (1) describe the profile farming of beef cattle on SMD program at the South Coastal District, (2) determine the amount of revenue from the program farming cattle ranchers SMD obtained, and (3) determine the amount of donations (contributions) income from beef cattle in the SMD program on household income farmers in the South Coastal District. The number of research samples are 72 farmers. The data primary and secondary data was used in this research. The data were analyzed qualitatively and quantitatively. The results showed that farming profile SMD beef cattle in the program include: the implementation of the SMD program at the South Coastal District has not been based on criteria such as technical instructions SMD assistance which has not been performing its duties and functions set out in the technical guidance of SMD. In addition, technical application of beef cattle in maintenance farming SMD program based on the five farming. The average income from beef cattle farming SMD program is Rp 4,696,304, - /farmer/year with R / C ratio of 1.63. Contribution is equal to 23,64 percent of total household income, including rancher and typology sideline business.*

Kata Kunci: Pendapatan, Rumah Tangga Peternak, Usaha ternak sapi Potong, Program SMD.

Pendahuluan

Dinas Peternakan Provinsi Sumbar (2010) melaporkan bahwa populasi sapi potong di Sumbar meningkat dalam beberapa tahun terakhir (+4,23 % per tahun), sementara itu jumlah pemotongan meningkat (+6,38 % per tahun). Dimana besarnya peningkatan jumlah pemotongan tidak diimbangi dengan peningkatan populasi. Kesenjangan ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Untuk mengatasi kesenjangan ini diperlukan impor sapi potong dalam jumlah yang cukup besar, volume impor yang cukup besar ini kedepan perlu dicermati dan diantisipasi agar ketergantungan impor bisa berkurang. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk merespon situasi ini, seperti melalui program Swasembada Daging 2014 yakni meni-

ngkatkan produksi daging sapi dalam negeri sebesar 90-95 persen (Ditjen Peternakan, 2005) dan Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau 2014 (Ditjen Peternakan, 2009). Program ini pada intinya mengupayakan peningkatan produksi daging dalam negeri untuk mengatasi kesenjangan antara permintaan dan penawaran, akan tetapi hasil yang diperoleh belum signifikan.

Dalam rangka pencapaian Swasembada Daging Sapi 2014, penyediaan akan ternak sapi dalam negeri sangat potensial untuk ditingkatkan. Namun, yang menjadi permasalahan peternak dalam meningkatkan populasi ternak sapi adalah keterbatasan modal yang dimiliki peternak untuk meningkatkan skala usaha serta keterampilan peternak dalam penanganannya dirasakan belum optimal dalam hal peningkatan produksi dan produktivitasnya. Untuk itu Direktorat Jen-

dral Peternakan melaksanakan suatu program yaitu Sarjana Membangun Desa (SMD), dengan cara pemberian kredit murah jangka panjang dan atau modal abadi (dalam bentuk bantuan sosial) dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kepada kelompok peternak yang dimotori oleh peternak berpendidikan (minimal Sarjana/D3 Peternakan /Keswan) yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu (Ditjen Peternakan, 2010).

Adapun perumusan masalah yang di maksud adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profil usaha ternak sapi potong pada program SMD di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Berapa besarnya pendapatan yang diperoleh peternak program SMD dari usaha ternak sapi potong yang dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Berapa besar kontribusi dari usaha ternak sapi potong pada program SMD terhadap pendapatan rumah tangga peternak di Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan profil usaha ternak sapi potong pada program SMD di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Mengetahui besarnya pendapatan usaha ternak sapi potong pada program SMD yang diperoleh peternak.
3. Mengetahui besarnya sumbangan (kontribusi) pendapatan dari usahaternak sapi potong pada program SMD terhadap pendapatan rumah tangga peternak di Kabupaten Pesisir Selatan.

Metodologi Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*.

2. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah anggota kelompok dari program SMD komoditas sapi potong tahun 2008-2010 di Kabupaten Pesisir Selatan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 254 orang yang merupakan anggota kelompok dari program SMD komoditas sapi potong tahun 2008-2010. Jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah berjumlah 72 orang anggota kelompok program SMD komoditas sapi potong. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *probability sampling* jenis *pro-portionate random sampling* yaitu teknik sampling yang memperhatikan proporsi (perbandingan) sesuai dengan proporsi (Sekaran, 1997).

3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk melihat gambaran umum pelaksanaan program SMD komoditas sapi potong, karakteristik responden pada program SMD, penerapan teknis pemeliharaan usahaternak sapi potong yang dijalankan (bibit, pakan, tatalaksana pemeliharaan, pencegahan/pengobatan penyakit, pemasaran) dan beberapa hal lain yang terkait akan diuraikan secara deskriptif.

Sedangkan analisis kuantitatif disajikan dalam bentuk tabulasi untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dalam penelitian ini.

yang dilakukan dengan menggunakan program aplikasi komputer seperti *Microsoft excel*.

Berdasarkan pendapatan bersih dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\pi = TR - TC$$

Dimana :

π : Pendapatan Bersih
TR : Total Penerimaan (*total revenue*)
TC : Total Biaya (*total cost*)

Pengeluaran usahaternak sapi potong, dihitung dengan rumus:

$$TC = TFC + TVC$$

Dimana :

TC = Total Biaya (*total cost*)
TFC = Total Biaya Tetap (*total fixed cost*)
TVC = Total Biaya Variabel (*total variable cost*)

Untuk mengetahui apakah usaha ternak sapi potong pada program SMD yang dijalankan menguntungkan atau tidak, maka dilakukan penghitungan *Revenue and Cost Ratio* dengan rumus: $R/C \text{ Ratio} = TR/TC$

Apabila nilai R/C ratio lebih besar dari 1 (> 1), maka usaha tersebut dikatakan efisien secara ekonomis, dan layak dikembangkan dengan kata lain usaha tersebut menguntungkan. Apabila R/C ratio sama dengan 1 ($=1$), maka usaha tersebut berada dalam kondisi impas. Apabila R/C ratio kurang dari 1 (<1), maka usaha tersebut dikatakan tidak efisien secara ekonomis dan tidak layak untuk dikembangkan dengan kata lain usaha tersebut mengalami kerugian.

Kontribusi pendapatan usaha ternak sapi potong terhadap pendapatan rumah tangga peternak dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (Satria, 1998) :

$$K = \frac{Y_1}{Y_{total}} \times 100\%$$

Keterangan:

K = Kontribusi usaha ternak sapi potong pada program SMD terhadap

pendapatan rumah tangga peternak (%)

Y_1 = Pendapatan usaha ternak sapi potong pada program SMD (Rp/tahun)
 Y_{total} = Pendapatan rumah tangga peternak (Rp/tahun)

Hasil dan Pembahasan

A. Profil Usahaternak Sapi Potong Pada Program SMD

Gambaran Umum Pelaksanaan Program SMD

Pemberdayaan kelompok peternak sapi potong melalui program SMD di Kabupaten Pesisir Selatan telah dimulai semenjak tahun 2008 dan sampai sekarang. Dimana berada di 9 Kecamatan yaitu : Basa IV Balai, Pancung Soal, Ranah Pesisir, Leng-ayang, Sutera, Batang Kapas, IV Jurai, Bayang dan Koto XI Tarusan.

Program SMD ini merupakan program yang memfasilitasi bantuan modal yang langsung ditujukan pada SMD terpilih dan kelompok tani ternak binaannya, yang disalurkan melalui rekening kelompok yang berada di Bank sesuai dengan jumlah yang diu-sulkan oleh kelompok dalam rencana usulan kelompok (RUK). Dana penguatan modal usaha bersifat abadi, maka usaha budidaya ternak tidak boleh terputus dan harus dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperbesar modal usaha dan kelompok sampai mencapai kapasitas optimal dan skala ekonomis. Program ini menyediakan bantuan modal yang disalurkan melalui kelompok sebesar, Rp325.000.000,- sampai dengan 363.000.000 perkelompok untuk komoditas sapi potong, dimana tiap tahunnya jumlah dana yang dikucurkan berbeda sesuai dengan anggaran yang ada.

Karakteristik Peternak

1. Umur dan Jenis kelamin

Pada umumnya umur responden didaerah penelitian berkisar antara 36-47 tahun dengan rata-rata sebesar 42 tahun dari total responden. Dilihat dari jenis kelamin, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 62 orang dengan proporsi 86,11 persen dan selanjutnya berjenis kelamin perempuan sebanyak 10 orang dengan proporsi 13,89 persen.

2. Tingkat Pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan responden di daerah penelitian tamat SMA yakni sebesar 48,61 persen (Tabel 2). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan peternak di daerah penelitian rata-rata adalah tingkat menengah atas, hal ini mempermudah peternak dalam memahami dan menerima inovasi baru sehingga bukan merupakan halangan untuk mencapai su-atu kemajuan.

3. Pengalaman Beternak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden yang memiliki pengalaman beternak 3-8 tahun sebanyak 30 orang (41,67 persen), 9-14 tahun sebanyak 11 orang (15,28 persen) dan ≥ 15 tahun sebanyak 31 orang (43,06 persen). Responden pada umumnya memiliki pengalaman beternak yang cukup lama.

4. Kepemilikan Ternak

Pemilikan ternak sapi responden pada program SMD bervariasi. Pengelompokan berdasarkan jumlah ternak sapi potong yang dimiliki responden disajikan pada Tabel 3 yang menunjukkan jumlah rata-rata kepemilikan pada masing-masing kriteria pada Program SMD di Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Jumlah Anggota Rumahtangga

Dari data yang diperoleh dilapangan jumlah anggota rumahtangga responden dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

6. Pekerjaan Utama

Pekerjaan pokok atau pekerjaan utama merupakan mata pencaharian yang membutuhkan waktu curahan kerja yang lebih banyak apabila dibandingkan

dengan pekerjaan sampingan. Tabel 5 menunjukkan bahwa pekerjaan pokok dari responden adalah sebagai petani dengan persentase sebesar 56,94 persen. Besarnya jumlah responden yang bermata pencaharian dalam bidang pertanian. Peternakan merupakan urutan yang kedua setelah pertanian karena peternakan adalah usaha sampingan.

B. Penerapan Teknis Pemeliharaan Usahaternak Sapi Potong Pada Program SMD

Bibit

Bibit merupakan faktor penentu dalam keberhasilan usaha pemeliharaan sapi potong, oleh sebab itu cara untuk meningkatkan mutu ternak terutama berupa daging adalah dengan membeli dan memilih bibit unggul.

Dapat disimpulkan bahwa jenis bibit yang banyak dipelihara adalah jenis Pesisir (41,45%) kemudian diikuti oleh Bali (30,77%), Simmental (25,21%) dan Brahman Cross (2,56%). Alasan peternak menggunakan bibit Pesisir karena jenis bibit ini cocok di daerah tersebut, pertumbuhannya yang cepat serta harga bibit yang lebih murah dari pada jenis sapi yang lain. Pada awal kegiatan kelompok diwajibkan untuk menggunakan sapi Brahman Cross, akan tetapi setelah ± 1 tahun kemudian sapi Brahman Cross tersebut tidak berkembang dengan baik, sehingga peternak menjual sapi Brahman Cross dan menggantinya dengan sapi Pesisir, peternak mengatakan alasan mengganti bibit tersebut karena harga beli sapi Brahman Cross yang tinggi sementara harga jualnya rendah dan perkembangbiakan dari sapi ini tidak baik, tidak cocok dengan daerah penelitian, harganya yang relatif mahal, lambat perkembangannya, dan kegagalan inseminasi buatan.

Pakan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwa jenis pakan yang dibe-

Besarnya rata-rata Pendapatan dan R/C rasio usaha ternak sapi potong pada program SMD tersaji dalam Tabel 2

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan Tunai	
	Penjualan Ternak	8.541.667
	Penjualan Kotoran	79.167
	Total Penerimaan Tunai	8.620.834
	Penerimaan Non Tunai	
	Pertambahan Nilai Ternak	8.784.722
	Total Penerimaan Non Tunai	8.784.722
	Total Penerimaan	17.405.556
2	Biaya Tetap	
	Penyusutan Kandang	183.984
	Penyusutan Peralatan	77.364
	Sewa Tanah	70.146
	Total Biaya Tetap	331.494
3	Biaya Variabel	
	Pakan Penguat	3.555.000
	Hijauan	2.962.500
	Tenaga Kerja	3.762.500
	Obat-obatan	24.986
	IB	15.694
	Lain-lain	44.375
	Total Biaya Variabel	10.365.056
4	Pendapatan: 1- (2 + 3)	6.709.006
5	Pendapatan Usahaternak Sapi Potong Program SMD	4.696.304
6	R/C rasio	1,63

Tabel 2. Rata-rata Pendapatan dan R/Crasio dari Usahaternak Sapi Potong Pada Program SMD Juli 2011-Agustus 2012

Sumber : Data Primer Diolah, 2012

D. Kontribusi Pendapatan Usaha-ternak Sapi Potong Pada Program SMD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha ternak sapi potong pada program SMD memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga peternak di Kabupaten Pesisir Selatan rata-rata sebesar 23,64 persen. Sedangkan

usaha tani selain ternak sapi potong program SMD memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga peternak sebesar 19,65 persen. Usaha yang paling besar memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga peternak di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Non Usaha tani sebesar 56,71 persen.

Tabel 3. Rata-rata Kontribusi Pendapatan Usahaternak Sapi Potong di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012

No	Uraian	Rata-rata Pendapatan (Rp)	Persentase (%)
1	Pendapatan Usaha ternak Sapi Potong Pada Program SMD	4.696.304	23,64
2	Pendapatan Usaha tani Selain Ternak Sapi Potong Program SMD	3,904,215	19,65
3	Pendapatan Non Usah tani	11,267,361	56,71
	Rata-rata Pendapatan Rumahtangga (Rp)	19.867.881	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2012

Berdasarkan nilai kontribusi yang diberikan, maka usaha ternak sapi potong pada program SMD di Kabupaten Pesisir Selatan digolongkan ke dalam tipologi usaha sambilan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil penelitian, SMD belum melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan SMD.
2. Rata-rata pendapatan dari usaha ternak sapi potong pada program SMD sebesar Rp 4.696.304,/ peternak/tahun atau Rp391.359,-/peternak/bulan. Rata-rata nilai R/C ratio usaha ternak sapi potong pada program SMD ini 1,63 yang berarti usaha ternak sapi potong pada program SMD yang dilakukan layak untuk diusahakan.
3. Kontribusi pendapatan usaha ternak sapi potong pada program SMD terhadap pendapatan rumah tangga peternak di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 23,64 persen dari total pen-

dapatan rumah tangga peternak, maka usaha ternak sapi potong pada program SMD Kabupaten Pesisir Selatan digolongkan ke dalam tipologi usaha sambilan.

Saran

Berdasarkan kombinasi pendapatan Rumah tangga, usaha ternak sapi di Kabupaten Pesisir selatan memberikan kontribusi yang cukup besar (23,64%). Akan tetapi, untuk melihat hubungan atau pengaruh antara usaha ternak sapi terhadap pendapatan rumah tangga diperlukan penelitian yang lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Nazir, M. 1999. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rahim, A. dan Diah R. D. H. 2008. Pengantar, Teori, dan Kasus Ekonomika Pertanian. Cetakan Kedua. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Satria, H. R. Kontribusi Ternak Dalam Usahatani Terpadu di Sumatera Barat, Tesis. Padang: Program Pascasarjana Unand.
- Soeprapto, H dan Abidin, Z. 2010. Cara Tepat Penggemukan Sapi Potong. Jakarta: Agromedia Pustaka.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI PANGAN HEWANI PADA KONSUMEN RUMAHTANGGA DI KOTA PADANG

Noni Novarista, Rahmat Syahni, Jafrinur

Abstract: *The objectives of this research were to determine: (1) The level of animal food consumption in household consumer based on the level income in Padang City. (2) The factors that influence the level of animal food consumption in household based on the level income in Padang City and (3) The elasticity value of animal food consumption in household consumer based on the level income in Padang City. This research used econometric approach by developing a model of demand function for animal food commodity by using data from the National Socioeconomic Survey (SUSENAS) of Padang City in 2011, the data is cross section data. The number of samples are 77 households. The analysis is using the Almost Ideal Demand System (AIDS) model. The results of the research showed that the level of animal food consumption in household consumer based on the level income in Padang City has been over the national nutrient norm standard. Household demand in Padang City for animal food agregately was influenced by the price of commodity both price elasticity and cross price elasticity, household income, the number of household member and housewife age and specifically based on the level of income on each commodity were influenced by different denografi social factor. Both the price elasticity and cross price for household agregately, low income strata and medium income strata in inelastic. The price elasticity of chicken egg and chicken egg cross price to chicken meat is elastic for high income strata. The income/expenditure elasticity is elastic to fish demand of household agregately, low income strata and medium income strata and to milk demand of household in high income strata.*

Kata Kunci : Konsumsi Pangan Hewani, Almost Ideal Demand System (AIDS), Elastisitas, Konsumen Rumatangga.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendasar. Terpenuhinya pangan secara kuantitas dan kualitas merupakan hal yang sangat penting, selain itu juga diperlukan sebagai landasan pembangunan manusia Indonesia dalam jangka panjang. Perilaku konsumsi pangan merupakan salah satu indikator yang fungsinya menilai tingkat per-

ekonomian rumahtangga maupun perekonomian nasional, bahkan bisa menjadi salah satu indikator penentu Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Rumahtangga miskin atau kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah akan menggunakan pendapatannya lebih dari separuh (50%) untuk konsumsi pangan (Badan Pusat Statistik, 2010).

Kebutuhan kalori bisa didapatkan dari makanan pokok, sedangkan kebutuhan protein lebih

Noni Novarista adalah Mahasiswa Pasca Sarjana S2 Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Andalas

Rahmat Syahni dan *Jafrinur* adalah Dosen Pasca Sarjana S2 Ilmu Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Unand

banyak didapatkan dari konsumsi makanan hewani seperti daging, telur, susu dan ikan (Jafrinur, 2006).

Tingkat konsumsi komoditas ternak di Kota Padang, yang masih di bawah tingkat konsumsi yang disarankan, Menurut Norma Gizi Nasional tingkat konsumsi yang disarankan FAO untuk komoditas pangan hewani sebesar 35 kg/kap/tahun untuk ikan, 10,1 kg/kap/tahun untuk daging, 3,5 kg/kap/tahun untuk telur dan 6,4 kg/kap/tahun untuk susu dengan total untuk pangan hewani secara keseluruhan dengan jumlah sebesar 55 kg/kap/tahun (150 gr/kap/hari). Untuk Kota Padang konsumsi komoditas asal ternaknya masih dibawah tingkat konsumsi yang disarankan yaitu sebesar 36,47 kg/kap/tahun pada tahun 2009. Jika dirinci berdasarkan jenis komoditas berturut-turut untuk ikan, daging, telur dan susu sebesar 25,86; 7,73; 2,78 dan 0,1 kg/kap/tahun (Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Padang Tahun 2009).

Menurut teori ekonomi banyak variabel yang mempengaruhi tingkat konsumsi terhadap suatu komoditas, diantaranya harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain yang terkait, tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa mendatang, distribusi pendapatan dan usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan (Rahardja dan Manurung, 2010). Dalam rangka peningkatan konsumsi masyarakat terhadap komoditas ternak diperlukan informasi tentang faktor-faktor yang menentukan konsumsi masyarakat terhadap komoditas ternak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Faktor-faktor yang Mem-pengaruhi Konsumsi Pangan Hewani pada Konsumen Rumah-tangga di Kota Padang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa jumlah atau tingkat konsumsi pangan hewani pada konsumen rumahtangga di Kota Padang.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat konsumsi pangan hewani pada konsumen rumahtangga di Kota Padang.
3. Berapa nilai elastisitas permintaan pangan hewani pada konsumen rumahtangga di Kota Padang.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jumlah atau tingkat konsumsi pangan hewani pada konsumen rumahtangga di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi pangan hewani pada konsumen rumahtangga di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui nilai elastisitas permintaan pangan hewani pada konsumen Rumah-tangga di Kota Padang.

METODOLOGI PENELITIAN

Wilayah studi yang diambil adalah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Waktu penelitian dilakukan selama 12 bulan dimulai pada bulan Januari sampai bulan Desember 2012.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder yaitu data mentah (*raw data*) Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2011. Data tersebut merupakan data kerat lintang (*cross section*) untuk Kota Padang.

Variabel penelitian adalah: Tingkat konsumsi pangan hewani (ikan, daging ayam ras, telur ayam ras dan susu), Harga beli pangan hewani (ikan, daging ayam ras, telur ayam ras dan susu), Pendapatan Rt (total pengeluaran pangan hewani), dan Karakteristik Rt (Umur ibu Rt, Jumlah anggota Rt, Pendidikan ibu Rt dan Pekerjaan ibu Rt (*dummy*)).

Model matematika yang akan digunakan adalah aproksimasi linear dari model AIDS (LA/AIDS, *Linear Approximation/ Almost Ideal Demand System*). Penelitian ini menggunakan analisis model *Almost Ideal Demand System* (AIDS) yaitu sebagai berikut:

$$W_i = \alpha_i + \sum \gamma_{ij} \log P_j + \beta_i \log \left(\frac{x}{p^*} \right) + \theta_a \log JK + \theta_b \log UI + \theta_c \log Pdi + \theta_d D + u_i$$

Keterangan :

- Wi : Share/Proporsi pengeluaran pangan hewani ke-I terhadap total pengeluaran pangan hewani (i = 1,2,3,4)
 Pj : Harga agregat dari komodita pangan hewani ke-j (j = 1,2,3,4)
 X : Pengeluaran total untuk pangan hewani Rt
 p* : Indeks harga stone (indeks harga stone dicari dengan

- rumus: $\log p^* = \sum w_i \log p_i$
 JK : Jumlah anggota Rt (orang)
 UI : Umur Ibu Rt (tahun)
 Pdi : Pendidikan Ibu Rt (tahun)
 D : Dummy pekerjaan ibu
 D= 1 : jika ibu bekerja
 D= 0 : jika ibu tidak bekerja
 α, β, : Parameter regresi berturut-turut untuk intersep, pengeluaran dan harga agregat untuk masing-masing komoditas.
 θ_a, θ_b, θ_c, θ_d : parameter regresi berturut-turut untuk jumlah anggota Rt, umur ibu, pendidikan ibu Rt, dan dummy pekerjaan ibu Rt.
 u_i : faktor kesalahan.

Pendugaan parameter sistem persamaan dari model AIDS dilakukan dengan metode SUR (*Seemingly Unrelated Regression*) dengan menggunakan perangkat lunak *Statistical Analysis System* (SAS).

Untuk menjamin agar asumsi maksimasi kepuasan tidak dilanggar, maka terdapat tiga restriksi yang harus dimasukkan ke dalam model, yaitu restriksi penjumlahan (*aditivitas*), homogenitas dan simetri.

Untuk menganalisis tujuan penelitian ketiga: yaitu untuk mengetahui nilai elastisitas permintaan pangan hewani pada konsumen Rt berdasarkan tingkat pendapatan (pengeluaran) secara agregat dan disagregat di Kota Padang, maka besaran elastisitas permintaan untuk harga dan pengeluaran dihitung dari rumus yang diturunkan dari fungsi permintaan (Deaton dan Muellbeaur, 1980).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Konsumsi Pangan dan pangan Hewani di Kota Padang

Pola Konsumsi Pangan di Kota Padang

Pangsa pengeluaran untuk pangan lebih tinggi pada Rumah-tangga berpendapatan rendah. Makin tinggi strata pendapatan, makin kecil pula pangsa pengeluaran untuk pangan, dan sebaliknya pangsa pengeluaran untuk non pangan lebih tinggi pada rumah tangga berpendapatan tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa makin tinggi strata pendapatan, maka pangsa pengeluaran untuk non pangan akan semakin besar pula.

Pola Konsumsi Pangan Hewani di Kota Padang

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara pengeluaran pangan hewani dan strata pendapatan, yaitu semakin tinggi strata pendapatan semakin tinggi dana yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi pangan hewani di Kota Padang.

Begitu juga dengan pangsa pengeluaran pangan hewani terhadap pengeluaran total ditinjau menurut strata pendapatan rumah-tangga di Kota Padang menunjukkan adanya hubungan antara pangsa pengeluaran pangan hewani dan strata pendapatan, yaitu semakin tinggi strata pendapatan, maka semakin kecil pangsa pengeluaran yang digunakan untuk mengkonsumsi pangan hewani.

Tingkat Konsumsi Berbagai Jenis Pangan Hewani di Kota Padang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan menjadi sumber utama protein hewani masyarakat Kota Padang. Dipilihnya ikan sebagai sumber protein karena Kota Padang yang lokasinya berada dekat dengan pantai, sehingga ketersediaan ikan lebih mudah diperoleh dan harganya yang relatif lebih murah dibanding sumber protein hewani lainnya.

Begitu juga sebaliknya, tingkat konsumsi terendah terdapat pada komoditas susu. Rendahnya tingkat konsumsi rumah tangga terhadap susu disebabkan karena mahalnya harga komoditas tersebut, sehingga karena terbatasnya pendapatan, adanya peningkatan pendapatan dialokasikan untuk konsumsi pangan yang lain yang lebih pokok, seperti ikan.

Secara agregat di Kota Padang jika diambil total rata-rata konsumsi seluruh pangan hewani tiap rumah tangga per minggu adalah sebesar 5,97780 kg/Rt/minggu (197,22204 gr/kap/hari atau 71,98604 kg/kapita/tahun). Angka ini sudah berada di atas standar norma gizi nasional yang disarankan FAO untuk pangan hewani sebesar 150 gr/kap/hari atau 55 kg/kapita/tahun.

Konsumsi pangan hewani Rumah tangga menurut Strata Pendapatan di Kota Padang

Konsumsi pangan hewani pada strata pendapatan rendah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pangan hewani asal ternak yang relatif banyak dikonsumsi oleh rumah tangga berpendapatan rendah adalah daging

ayam ras, diikuti oleh susu dan telur ayam ras. Jika diambil total rata-rata konsumsi seluruh pangan hewani per Rumahtangga per minggu adalah sebesar 4,90407 kg/Rt/minggu atau 203,06708 gr/kap/hari. Angka ini sudah berada di atas standar norma gizi nasional yang di-sarankan FAO untuk pangan hewani 150 gr/kap/hari atau sebesar 55 kg/kapita/tahun.

Konsumsi pangan hewani pada strata pendapatan sedang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumahtangga pada strata pendapatan sedang mempunyai pola pengeluaran dan konsumsi yang tidak berbeda jauh dengan strata pendapatan rendah. Nilai pengeluaran pangan hewani yang paling tinggi dan yang terendah sama-sama pada komoditas ikan dan telur ayam ras. Jika diambil total rata-rata konsumsi seluruh pangan hewani per rumahtangga per minggu adalah 6,37377 kg/Rt/minggu (193,32029 gr/kap/hari atau sebesar 70,56191 kg/kapita/tahun). Angka ini sudah berada di atas standar norma gizi nasional yang disarankan FAO untuk pangan hewani sebesar 150 gr/kap/hari atau sebesar 55 kg/kapita/tahun.

Konsumsi pangan hewani pada strata pendapatan tinggi

Hasil menunjukkan bahwa Pola pengeluaran dan konsumsi pangan pada rumahtangga strata pendapatan tinggi sama dengan strata pendapatan sedang, baik jumlah pengeluaran maupun tingkat konsumsi. Pengeluaran dan konsumsi paling tinggi terdapat pada komoditas ikan. Jika diambil

total rata-rata konsumsi seluruh pangan hewani per Rumahtangga per minggu adalah sebesar 7,37854 kg/Rt/minggu atau 197,76307 gr/kap/hari. Angka tingkat konsumsi pangan hewani Rumahtangga pada strata pendapatan tinggi ini sudah berada di atas standar norma gizi nasional yang disarankan FAO untuk pangan hewani sebesar 150 gr/kap/hari atau 55 kg/kapita/tahun.

Konsumsi pangan hewani Rumahtangga menurut karakteristik Rumahtangga di Kota Padang

Umur Ibu Rumahtangga

Jika dilihat total rata-rata konsumsi per kapita yang relatif besar adalah untuk ibu Rumahtangga dengan kelompok umur ≥ 61 tahun yaitu sebesar 1,92010 kg/kap/minggu. Hal ini diduga karena paling rendahnya jumlah anggota rumahtangga pada kelompok umur ini, yaitu dengan rata-rata jumlah anggota rumah-tangga sebesar 2,92 orang, sedangkan rata-rata jumlah anggota Rumah-tangga pada kelompok umur lainnya sebesar 3,63; 4,81; 5,05 dan 4,37 orang.

Pendidikan Ibu Rumahtangga

Total konsumsi rata-rata per kapita terhadap pangan hewani paling besar berasal dari ibu rumahtangga yang mempunyai pendidikan lulus Perguruan tinggi yaitu 1,46560 kg/kap/minggu. Hal ini diduga juga disebabkan lebih baiknya kemampuan daya beli pada kelompok rumahtangga ini diantara rumahtangga dengan tingkat pen-

didikan lainnya, yang dapat dilihat pada rata-rata pendapatan setiap bulan sebesar Rp 4.868.264.

Pekerjaan Ibu Rumahtangga

rata-rata jumlah konsumsi pangan hewani baik konsumsi total ataupun untuk masing-masing jenis pangan hewani, konsumsi tertinggi terdapat pada ibu rumahtangga yang bekerja yaitu sebesar 6,72922 kg/Rt/minggu, dengan rata-rata konsumsi per kapita sebesar 1,69076 kg/kap/minggu.

Jumlah Pendapatan Rumahtangga

Rata-rata total konsumsi pangan hewani per kapita justru tidak pada rumahtangga dengan strata pendapatan tinggi. Hal ini diduga karena rata-rata jumlah anggota rumahtangga pada strata pendapatan ini relatif paling besar diantara strata pendapatan lainnya, jumlah anggota rumahtangga untuk strata pendapatan rendah, sedang dan tinggi berturut-turut sebesar 3,45; 4,71 dan 5,33 orang.

Jumlah Anggota Rumahtangga

total rata-rata konsumsi pangan hewani per kapita justru paling rendah pada Rumahtangga dengan jumlah anggota ke-luarganya ≥ 6 orang yaitu 1,01652 kg/kap/minggu. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota rumahtangga justru menurunkan tingkat konsumsi pangan hewani anggota keluarganya, berarti semakin besar jumlah anggota rumahtangga, maka semakin menurun tingkat kesejahteraan rumahtangga.

Koefisien Penduga Permintaan Pangan Hewani secara Keseluruhan

Hasil analisis pengaruh masing-masing variabel penjelas terhadap variabel dependen ditampilkan secara rinci pada tabel 1. Dilihat secara keseluruhan didapatkan 14 parameter mempunyai pengaruh yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99%, 95% dan 90%. Kedalamnya termasuk parameter harga ikan, harga daging ayam ras, harga telur ayam ras, harga susu, pengeluaran pangan hewani total, pendapatan, jumlah anggota Rt dan karakteristik ibu Rt (umur, tingkat pendidikan dan pekerjaan ibu Rt).

Tabel 1. Nilai Parameter Permintaan

Parameter	Share			
	Ikan	Daging ayam ras	Telur ayam ras	Susu
α	-0.02167	-0.03421	0.150038	0.905846***
γ_1	0.038682	-0.01773	-0.00097	-0.01998
γ_2	-0.01773	0.048565	0.033613**	-0.06444***
γ_3	-0.00097	0.033613**	-0.00394	-0.02871***
γ_4	-0.01998	-0.06444***	-0.02871***	0.113132***
β	0.187234***	-0.07584**	-0.02814*	-0.08326**
θ_a	-0.00561	0.064117*	0.012667	-0.07117*
θ_b	0.066308	0.060010	-0.01060	-0.11572**
θ_c	-0.04796	0.050211	0.014265	-0.01651
θ_d	0.027260	0.009892	-0.00668	-0.03047

Sumber : Susenas 2011, data diolah

Keterangan :

- *** = Signifikan pada taraf nyata 1%
- ** = Signifikan pada taraf nyata 5%
- * = Signifikan pada taraf nyata 10%
- α = intersep
- γ_1 = Harga ikan
- γ_2 = Harga daging ayam ras
- γ_3 = Harga telur ayam ras
- γ_4 = Harga susu
- β = Pengeluaran pangan hewani total
- θ_a = Jumlah anggota rumahtangga
- θ_b = Umur ibu rumahtangga
- θ_c = Pendidikan ibu rumahtangga
- θ_d = Dummy Pekerjaan Ibu rumahtangga

Koefisien Penduga Permintaan Pangan Hewani berdasarkan Strata Pendapatan

Berdasarkan strata pendapatan, rumah tangga di Kota Padang dibagi atas strata pendapatan rendah, sedang dan tinggi, yang mempunyai perilaku yang tidak selalu sama dalam merespon pengaruh harga dan pengeluaran suatu barang konsumsi, termasuk dalam mengonsumsi pangan hewani.

Pangsa pengeluaran ikan pada strata pendapatan rendah dipengaruhi oleh harga telur ayam ras dan pengeluaran rumah tangga. Pada strata pendapatan sedang dipengaruhi oleh harga telur ayam ras dan susu dan pengeluaran Rt. Pada pendapatan tinggi dipengaruhi oleh harga ikan sendiri dan harga susu.

Pangsa pengeluaran daging ayam ras pada strata pendapatan rendah dipengaruhi oleh harga daging ayam ras sendiri dan harga susu. Pada strata pendapatan sedang dipengaruhi oleh harga susu, umur dan pendidikan ibu Rt. Pada pendapatan tinggi dipengaruhi oleh harga telur ayam ras,

jumlah anggota Rt dan pekerjaan ibu Rt.

Pangsa pengeluaran telur ayam ras pada strata pendapatan rendah dipengaruhi oleh harga ikan dan susu, pengeluaran Rt dan pendidikan ibu Rt. Pada strata pendapatan sedang dipengaruhi oleh harga ikan dan susu, umur dan pendidikan ibu Rt. Pada pendapatan tinggi dipengaruhi oleh harga telur ayam ras, pengeluaran Rt dan jumlah anggota Rt.

Pangsa pengeluaran susu pada strata pendapatan rendah dipe-

ngaruhi oleh harga daging ayam ras, telur ayam ras dan harga susu sendiri. Pada strata pendapatan sedang dipengaruhi oleh harga ikan, daging ayam ras, telur ayam ras dan harga susu sendiri, jumlah anggota Rt, umur dan pendidikan ibu Rt. Pada pendapatan tinggi dipengaruhi oleh harga ikan dan susu sendiri dan pengeluaran Rt

Nilai Elastisitas Permintaan Pangan Hewani di Kota Padang

Elastisitas harga sendiri

Permintaan susu mempunyai nilai elastisitas yang bersifat inelastis di Kota Padang yang ditunjukkan oleh nilai elastisitas harganya sebesar $-0,57579$.

Elastisitas harga silang

Secara agregat semua komoditas pangan hewani tidak respon terhadap perubahan harga komoditas pangan hewani lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai elastisitas silangnya yang kecil dari satu.

Elastisitas pengeluaran

Nilai elastisitas pengeluaran semua jenis pangan hewani <1 (lebih kecil dari satu). Kecuali nilai elastisitas pengeluaran untuk komoditas ikan bernilai $1,46498$ (bersifat elastis). Berarti konsumsi untuk daging ayam ras, telur ayam ras dan susu tidak responsif terhadap perubahan pendapatan.

Nilai Elastisitas Permintaan Pangan Hewani Berdasarkan Strata Pendapatan

Elastisitas harga sendiri

Pada strata pendapatan rendah, variabel harga yang berpengaruh signifikan terhadap pangsa

pengeluaran komoditas itu sendiri adalah harga daging ayam ras dan harga susu. Elastisitas harga sendiri daging ayam ras dan susu semuanya bernilai kecil dari satu. Berarti permintaan daging ayam ras dan susu pada strata pendapatan rendah bersifat inelastis.

Pada strata pendapatan sedang, variabel harga yang signifikan pengaruhnya terhadap pangsa pengeluaran komoditas tersebut adalah harga susu. Namun nilai elastisitas harga susu bersifat in-elastis. Terdapat tanda negatif pada nilai elastisitas harga susu.

Pada strata pendapatan tinggi, variabel harga ikan, telur ayam ras dan susu berpengaruh signifikan terhadap pangsa pengeluaran masing-masing jenis komoditas. Nilai elastisitas harga yang paling elastis ditunjukkan pada permintaan telur ayam ras.

Elastisitas harga silang

Pada strata pendapatan rendah, juga terdapat tanda (positif-negatif) yang bervariasi. Terdapat sebanyak 8 nilai elastisitas harga silang yang bertanda negatif dan sebanyak 4 nilai elastisitas harga silang yang positif. Berarti ini menunjukkan bahwa terdapat 8 hubungan antar jenis pangan hewani yang bersifat komplementer dan 4 mempunyai hubungan substitusi.

Pada strata pendapatan sedang didapatkan sebanyak 8 nilai elastisitas silang yang bertanda negatif dan 4 nilai elastisitas silang yang positif. Berarti terdapat 8 hubungan antar jenis pangan hewani yang bersifat komplementer dan 4 hubungan bersifat substitusi.

Pada strata pendapatan tinggi didapatkan sebanyak 7 nilai elastisitas silang yang bertanda negatif dan 5 yang positif. Berarti terdapat

7 hubungan antar jenis pangan hewani yang bersifat komplementer dan 5 juga yang bersifat substitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua komoditas pangan hewani tidak respon terhadap perubahan harga komoditas pangan hewani lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai elastisitas silangnya yang sangat kecil atau bisa dikatakan mendekati nol. Nilai elastisitas silang yang bersifat elastis hanya terdapat pada permintaan telur ayam ras.

Elastisitas pengeluaran

Pada strata pendapatan rendah dan sedang, nilai elastisitas pengeluaran hanya elastis pada permintaan ikan. Sedangkan untuk permintaan daging ayam ras, telur ayam ras dan susu bersifat inelastis. Kenaikan pengeluaran Rumah-tangga sebesar 1% diikuti dengan peningkatan konsumsi ikan pada strata pendapatan rendah sebesar 1,36933% dan 1,44460% untuk strata pendapatan sedang.

Sedangkan pada strata pendapatan tinggi, nilai elastisitas pengeluaran bersifat elastis hanya untuk permintaan susu. artinya jika pengeluaran rumahtangga baik sebesar 1%, maka permintaan terhadap susu naik sebesar 1,95730%, hal ini didukung oleh pengaruh variabel pengeluaran yang signifikan terhadap pangsa pengeluaran untuk susu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tingkat konsumsi pangan hewani rumahtangga di Kota Padang secara agregat, pada strata

- pendapatan rendah, sedang dan
2. standar norma gizi nasional yang disarankan FAO.
 3. Tingkat konsumsi pangan hewani pada konsumen rumah-tangga di Kota Padang dipe-ngaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda. Secara agregat dipengaruhi oleh harga pangan hewani itu sendiri, pendapatan Rt, jumlah anggota Rt dan umur ibu Rt. Pada strata pen-dapatan rendah dipengaruhi oleh harga pangan hewani itu sendiri, pen-dapatan Rt dan pendidikan ibu Rt. Untuk Strata pendapatan se-dang dipengaruhi oleh harga pangan hewani itu sendiri, pen-dapatan Rt, jumlah anggota Rt, umur ibu Rt dan pendidikan ibu Rt. Sedangkan strata pendapatan tinggi dipengaruhi oleh harga pangan hewani, pendapatan Rt, jumlah anggota Rt dan status pekerjaan ibu.
 4. Permintaan rumahtangga di Kota Padang, secara agregat tidak responsif terhadap peru-bahan harga sendiri dan harga pangan hewani lainnya (nilai elastisitas bersifat inelastis atau < 1). Tetapi permintaan ikan responsif terhadap perubahan pengeluaran (nilai elastisitas bersifat elastis atau > 1). Strata pendapatan rendah dan sedang terhadap setiap komoditas pa-ngan hewani tidak responsif terhadap perubahan harga sen-diri dan harga pangan hewani lainnya (nilai elastisitas bersifat inelastis atau < 1). Namun per-mintaan ikan res-ponsif ter-hadap perubahan pen-dapatan (nilai elastisitas bersifat elastis atau > 1). Sedangkan pada ru-mahtangga strata pendapat-an tinggi, permintaan telur ayam ras responsif terhadap peruba-

tinggi sudah berada di atas han harga sendiri dan perubahan harga daging ayam ras (nilai elastisitas harga bersifat elastis atau > 1), permintaan susu res-ponsif terhadap perubahan pen-dapatan (nilai elastisitas bersifat elastis atau > 1).

Saran

Tingkat konsumsi di Kota Padang ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lain-nya. Untuk itu pemerintah perlu memperbaiki distribusi pendapatan rumahtangga. Melalui sosialisasi mengenai pangan dan gizi secara umum melalui penyuluhan, pen-didikan dan kampanye me-nge-nai peningkatan konsumsi pangan hewani.

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah variabel demografi yang belum dianalisis dalam pe-nelitian ini, misalnya tingkat pengetahuan gizi ibu rumah-tangga. Dalam menganalisis va-riabel-variabel demografi terse-but sebaiknya juga di-analisis secara mendalam me-nge-nai elastisitasnya (elastisitas pendi-dikan, elastisitas jumlah ang-gota Rt dan seterusnya),
2. Perlu terus diupayakan solusi-solusi untuk dapat menurunkan biaya produksi pada peternak sumber protein hewani, se-hingga akan dapat dihasilkan pangan hewani dengan harga yang terjangkau oleh ma-syarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Sumbar. 2010. "Konsumen Rumah-Deaton, A and J. Muellbauer. 1980. *An Almost Ideal Demand System*. The American Economic Review.
- Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Padang. 2009. "Data Statistik Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Padang Tahun 2009". Padang: Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Padang.
- tangga". Badan Pusat Statistik Propinsi Padang: Sumatera Barat.
- Jafrinur. 2006. Perilaku konsumen rumahtangga dalam mengkonsumsi daging (Kasus Propinsi Sumatera Barat). Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Rahardja, P dan Manurung, M. 2010. Teori Ekonomi Mikro, Edisi keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

**FORMULIR BERLANGGANAN
JURNAL AGRIBISNIS KERAKYATAN**

Mohon dicatat sebagai pelanggan JAK

Nama :
Instansi :
Alamat :
..... Kode Pos

.....,

()

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar:

Uang tersebut telah saya kirim melalui Bank BNI Cabang Padang, rekening nomor
0112114081 a.n. Widya Fitriana, SP, M.Si

Harga langganan untuk satu nomor (sudah termasuk ongkos kirim)

Rp 50.000 untuk wilayah Sumatera

Rp 60.000 untuk wilayah luar Sumatera

----- Gunting dan kirimkan ke alamat redaksi JAK -----

PEDOMAN PENULISAN JURNAL AGRIBISNIS KERAKYATAN

Naskah diketik pada kertas A4 dengan huruf Georgia , ukuran 12 pts, single spasi, margin kiri dan atas masing-masing 3,5 cm, margin kanan dan bawah masing-masing 2,5 cm.

JUDUL

(Georgia, font 14, Bold, Centre)

Nama Penulis¹

(tanpa gelar akademik, Georgia, font 12,Bold,Centre)

Abstract (ditulis dalam Bahasa Inggris, Georgia, font 12, justify, single spasi, maksimum 200 kata)

Kata Kunci : 3-5 kata

Berikutnya artikel ditulis dalam bentuk 2 kolom, Georgia, font 12, justify, single spasi, dan sub bab dibold dan rata tepi kiri, dengan sistematika sbb:

PENDAHULUAN (berisi latar belakang, tujuan dan ruang lingkup tulisan)

METODE PENELITIAN (berisi metode penelitian, metode pengambilan sampel atau responden, metode pengumpulan data, dan metode analisis data)

HASIL DAN PEMBAHASAN (dapat dibagi dalam beberapa sub-bagian)

PENUTUP (berisi kesimpulan dan saran)

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan model matematika, gambar dan tabel diberi nomor sesuai urutan kemunculan. Nomor model matematika ditulis di pinggir kanan, sedangkan nomor dan judul gambar ditulis dibawah gambar, dan nomor dan judul tabel ditulis diatas tabel.

Perujukan referensi menggunakan teknik rujukan berkurung (nama, tahun)

Penulisan daftar referensi disesuaikan dengan urutan nama abjad penulis dan disesuaikan dengan format lazimnya pada daftar pustaka.

¹ Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan dibawah judul artikel, jika penulis lebih dari 3 orang, yang dicantumkan dibawah judul artikel adalah nama penulis utama, nama penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah.

ISSN 1979-9470



9 771979 947016